



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PEMERINTAHAN KONSERVATIF LIKUD
TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ISRAEL PALESTINA
TAHUN 1996-2003**



SKRIPSI

**AJENG RIZQI RAHMANILLAH
NPM 0606087561**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI SASTRA ARAB
DEPOK
DESEMBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PEMERINTAHAN KONSERVATIF LIKUD
TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ISRAEL PALESTINA
TAHUN 1996-2003**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**AJENG RIZQI RAHMANILLAH
NPM 0606087561**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
DESEMBER 2009**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

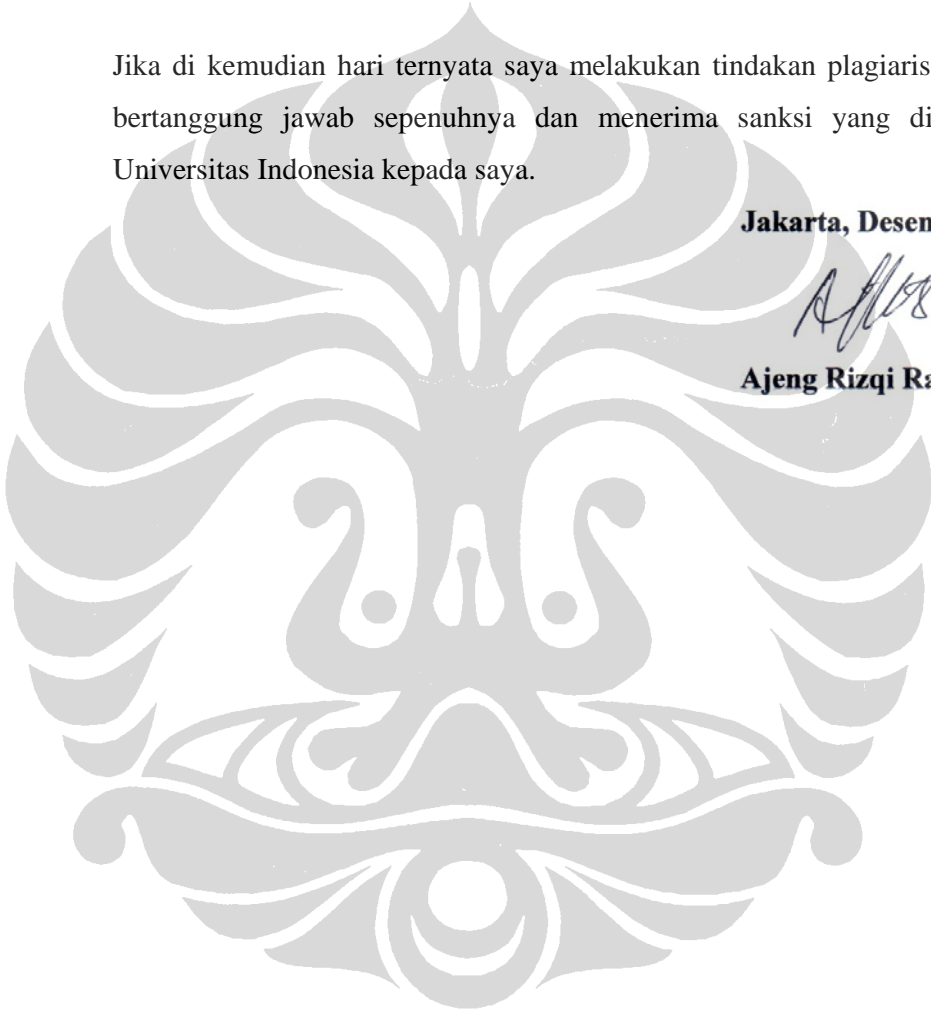
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Desember 2009



Ajeng Rizqi Rahmanillah



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

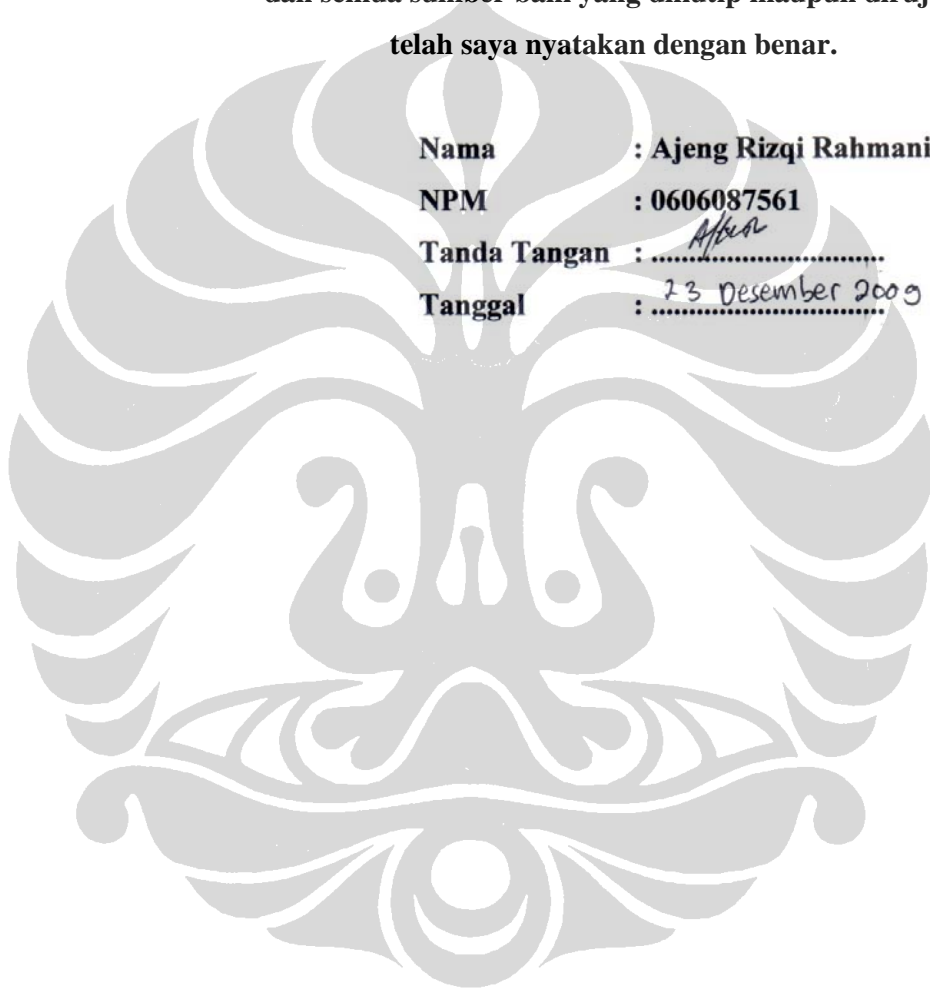
**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ajeng Rizqi Rahmanillah

NPM : 0606087561

Tanda Tangan : *Ajeng*

Tanggal : 23 Desember 2009




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Ajeng Rizqi Rahmanillah
NPM : 0606087561
Program Studi : Arab
judul : Pengaruh Pemerintahan Konservatif Likud
Terhadap Proses Perdamaian Israel Palestina Tahun
1996-2003

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yon Machmudi, Ph. D (.....) 
Penguji : Juhdi Syarif, M. Hum (.....)
Pembaca : Suranta, M. Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 23 Desember 2009

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.

NIP 131882263

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT atas segala petunjuk dan kemudahan, kekuatan jasmani, serta orang-orang yang senantiasa membantu dan memberi dukungan kepada penulis. Tidak ada kata yang dapat menyaingi segala anugerah tersebut selain ucapan syukur kepadaNya. Dengan segala anugerah tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Pemerintahan Konservatif Likud Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina Tahun 1996-2003” yang merupakan salah satu syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Konflik Israel Palestina salah satu subjek yang menarik untuk dikaji karena perkembangan konflik ini dapat mempengaruhi konstelasi politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. Skripsi ini membahas tentang pengaruh pemerintahan konservatif Likud terhadap proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Pemerintahan konservatif Israel merupakan suatu pemerintahan yang memegang teguh prinsip zionisme yaitu *Eretz Yisrael*. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam kebijakan luar negeri Israel dalam konflik Israel-Palestina. Kebijakan luar negeri pemerintah konservatif Likud kemudian memberikan dampak terhadap perkembangan proses perdamaian Israel-Palestina, dimana telah terjadi transformasi tahapan konflik dari pasca konflik menjadi tahapan krisis kembali.

Skripsi ini merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan bukan hanya kekuatan jasmani tetapi juga kekuatan rohani. Kekuatan itu muncul dari berbagai pihak yang dengan kekuatan ikhlas memberikan dorongan semangat dan dukungan yang sangat berharga dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu.

Rasa terimakasih yang besar penulis sampaikan kepada Bapak Yon Machmudi, Ph.D., selaku dosen pembimbing atas segala waktu, bimbingan, saran, dan masukan dalam proses pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, terimakasih yang terdalam penulis tujukan kepada keluarga besar Program Studi Arab

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Terimakasih kepada Bapak Dr. Afdol Tharik Wastono S.S, M.Hum sebagai Koordinator Jurusan Sastra Arab FIB UI, Bapak Dr. Maman Lesmana, sebagai pembimbing akademis penulis di FIB UI, Bapak Drs. Suranta M.Hum yang telah banyak memberikan masukan dalam skripsi ini, Bapak Minal Aidin Arrahim S.S, Ibu Siti Rohmah Soekarba M. Hum, Ibu Wiwin Triwinarti M.A, Bapak Dr. Fauzan Muslim, Bapak Dr. Muhammad Luthfi, Bapak Letmiros M.Hum, Bapak Juhdi Syarif M.Hum, Bapak Dr. Basuni, Bapak Aselih Asmawi S.S, Bapak Dr. Apipudin, Ibu Ade Solihat M.A, atas segala pengertian dan kebijakan yang mendukung penulis menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia.

Teman-teman Sastra Arab UI (khususnya angkatan 2006), Ica, Tia, Ima, Mbun, Lesti, Tifa, Dita, Ainul, Retia, dan yang lainnya terimakasih sekali atas segala perhatian dan pengertian, serta bantuan kalian selama ini. Teman-teman seperjuangan, Nisa, Ratih, Sakti, Santi, Yuni, Hafidzoh, Romi, Moli, dan Maya kalian membuat perjuangan ini terasa indah.

Rasa terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Firdaus Syam, Msi yang telah memberikan ilmu dan kesempatan berharga bagi penulis. Serta kepada Bapak Drs. Syamsumar Dam APU., Dosen FISIP Hubungan Internasional Universitas Nasional dan Peneliti LIPI yang memberikan masukan dan informasi yang berguna.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis tujukan kepada Ayah dan Ibu penulis yaitu, Agus Syamsudin Wajib dan Siti Sahro Wajib atas kasih sayang, perhatian, nasihat-nasihat, dan dorongan kuat yang tidak pernah berhenti agar penulis mampu menyelesaikan pendidikannya. Kepada keluarga besar Achmad Wajib dan keluarga besar Wiryorejo, terimakasih banyak atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini.

Terimakasih paling istimewa yang datang dari hati, jiwa, dan rasa rasionalitas untuk manusia-manusia istimewa ciptaan Allah SWT yang telah mengisi kehidupan penulis yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis. Tiara Putih Bastian, Ridha Kamaliyah, Rizky Agustina, R.G Asmarani Putri, Indah Pratiwi, Fenita Oktaviana, Vidya Nurina, Santi Ranidiati, Yulfyah Rahmawati, Shefy Sunarya, Farida Eka Safitri, Budi Santoso,

Fahmi Dzikirillah, Isman, Mahesa, dan Hendrian (entahlah apa yang telah kalian perbuat sehingga perjuangan ini begitu menyenangkan). Untuk sahabat-sahabat lama Maya Holipah, Budi Rahayu, Vira Sardika, Mekawati, Jabal Nugroho, Ferdiansyah, Eka, dan Vicky Ramadhan, Heni Agustiani, Endah Anggun Ningsih, Kartika Pertiwi, Sarastuti, Yeni Lusiani Martina, Robin Franando, Widya, terimakasih untuk tidak pernah berhenti mendoakan penulis.

Rasa terimakasih yang terbalut dengan kasih sayang tulus untuk sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan warna keindahan dalam perjalanan menuntut ilmu di Universitas Indonesia, Aliah Lestari Sayuti Asyatri, Putri Balqis, Sepriyanti Handayani Putri, Tara Thuraya Baraja, Safira Basandid, Fathia terimakasih atas segala perhatian, pengertian, dan dorongan kalian semua sehingga tidak ada lelah dalam perjuangan. Kak Romika dan Ragil, dukungan kalian adalah kekuatan penulis untuk dapat bertahan dalam perjuangan ini.

Akhir kata penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan anugerah dan hidayah kepada kita semua sehingga dapat menjalani hidup ini dengan baik. Amin.

Ajeng Rizqi Rahmanillah

27 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Rizqi Rahmanillah
NPM : 0606087561
Program Studi : Arab
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

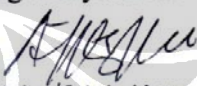
“Pengaruh Pemerintahan Konservatif Likud Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina Tahun 1996-2003”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 23 Desember 2009

Yang menyatakan


(AJENG RIZQI RAHMANILLAH)

DAFTAR ISI

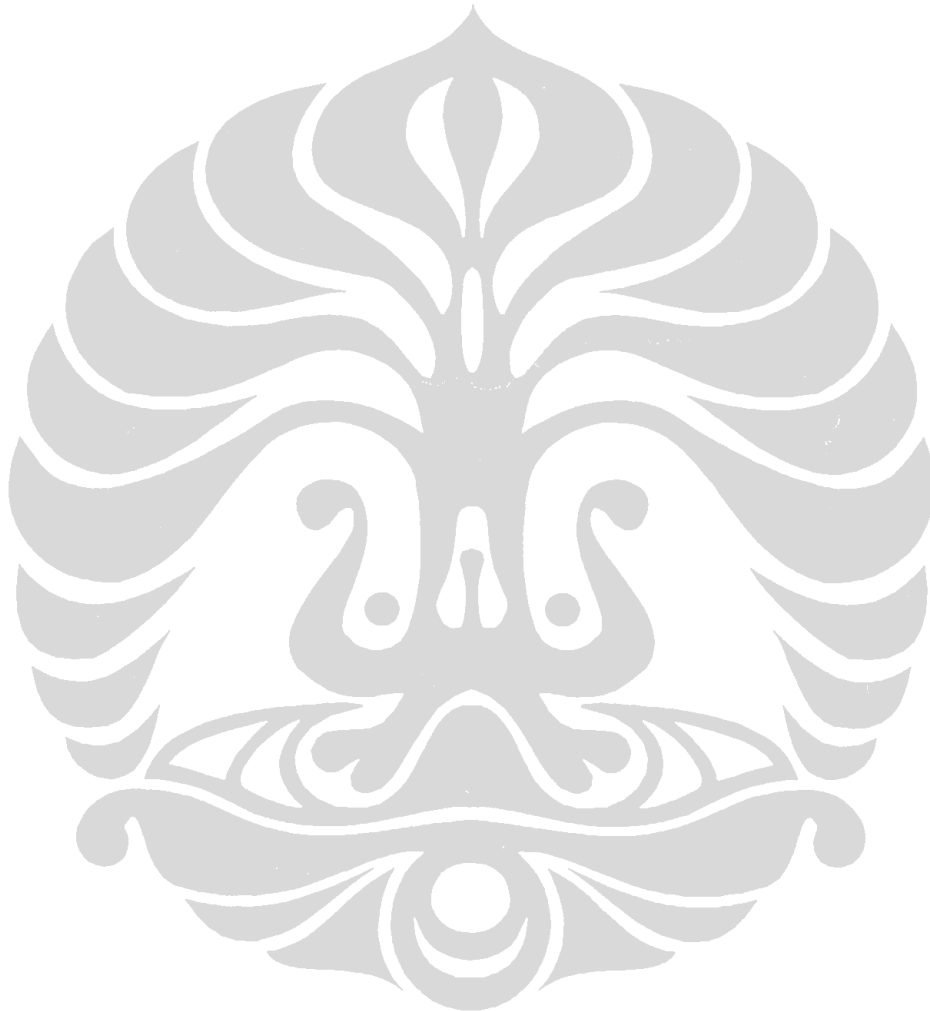
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	11
1.5 Batasan Penelitian.....	11
1.6 Model Operasional Penelitian.....	12
2. LANDASAN TEORI	13
2.1 Konteks Penelitian.....	13
2.2 Tahapan Konflik.....	15
2.2 Konsep Konservatisme.....	20
2.3 Zionisme.....	22
3. METODE PENELITIAN	25
3.1 Pengantar.....	25
3.2 Format Penelitian.....	26
3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Strategi Analisis Data.....	27
3.5 Sistematika Penulisan.....	29
4. KONFLIK ISRAEL-PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN LIKUD 1996-2003	30
4.1 Sejarah dan Perjalanan Konflik Israel-Palestina.....	30
4.2 Eksistensi Partai Likud di Israel.....	59
4.2.1 Sistem Politik Israel.....	59
4.2.2 Eksistensi Likud dalam Pemerintahan di Israel.....	61
4.3 Strategi Pemerintahan Likud dalam Konflik Israel Palestina 1996-2003.....	67
4.3.1 Pembangunan Pemukiman Yahudi dan Pembuatan Tembok Pembatas.....	67
4.3.2 Penguasaan Jerusalem.....	74

5. PENGARUH KONSERVATISME PEMERINTAHAN LIKUD TERHADAP KONFLIK ISRAEL-PALESTINA TAHUN 1996-2003.....	85
5.1 Perubahan Landasan Perdamaian <i>Land For Peace</i> Menjadi <i>Land For Security</i>	
5.1.1 Berorientasi Kepada Isu Keamanan untuk Kepentingan Nasional Israel.....	87
5.1.2 Meminimalisasi Jalur Perundingan sebagai Instrumen Perdamaian.....	91
5.2 Eskalasi Konflik Antara Israel dan Palestina: Penggunaan Instrumen Kekerasan dan Bom Bunuh Diri.....	97
6. KESIMPULAN.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peta Konflik Israel-Palestina
Lampiran 2	Resolusi DK PBB No. 242 Tahun 1967
Lampiran 3	Resolusi DK PBB No. 338 Tahun 1973
Lampiran 4	Platform Partai Likud



ABSTRAK

Nama : Ajeng Rizqi Rahmanillah
Program Studi : Arab
Judul : Pengaruh Pemerintah Konservatif Likud Terhadap Proses
Perdamaian Israel Palestina Tahun 1996-2003

Skripsi ini membahas pengaruh pemerintahan konservatif Likud di Israel terhadap konflik yang terjadi antara Israel-Palestina dalam kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2003. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai *analizing tools* dalam skripsi ini adalah teori konflik, konsep konservatif, dan teori zionisme. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Konservatif Likud di Israel memegang teguh prinsip zionisme yaitu menciptakan *Eretz Yisrael* atau Tanah Israel di Palestina. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Pemerintahan konservatif Likud membangun pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Selain itu, Pemerintahan Likud tidak mau berkompromi masalah Jerusalem. Bagi Likud, Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi. Konservatisme Likud telah membawa pengaruh terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Pemerintahan Likud mengubah landasan perdamaian *land for peace* menjadi *land for security*. Perubahan landasan ini telah meminimalisasikan jalur perundingan sebagai upaya perdamaian sehingga tidak tercapai sebuah kesepakatan antara Israel dan Palestina. Selain itu, landasan *land for security* telah meningkatkan tingkat eskalasi konflik dengan penggunaan instrumen kekerasan dan bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina.

Kata kunci:
Israel, konflik, konservatif

ABSTRACT

Name : Ajeng Rizqi Rahmanillah
Study Program : Arabic Major
Title : The Influence of the Conservative Likud Government to the
Israel-Palestine Peace Process Year 1996-2003

The focus of this graduation project is the impact of the Likud conservative government in Israel against the conflict between Israel and Palestine that occurred in the 1996 to 2003. Theoretical framework that would be used as analyzing tools this research are theory of conflict, conservative concepts, and theory of Zionism. The Research is a qualitative with descriptive analyzing. The conservative Likud in Israel took for granted the Zionism that is to establish Eretz Yisrael or the Land of Israel in Palestine. To reveal thus goal, Likud government built the Jewish settlements in the occupied territories even. In addition, the Likud Government would not compromise for the Jerusalem status. For Likud, Yerusalem is such not undivided and absolutely belong to Israel. Likud conservatism has brought the influence of the Israel-Palestinian peace process. Likud Government has changed the base line of peace process from "Land for Peace" into "Land for Security". This alteration has minimized the negotiation path as a way to create peace. Hence the agreement is unreachable. In addition to Land for Security has increased the conflict escalation within coercion instrument.

Key words:
Israel, conflict, conservative

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“*One Lands Two People*”, karangan Deborah J. Gerner, adalah salah satu dari sekian banyak literatur yang menceritakan bagaimana sepetak tanah (Palestina) diakui oleh dua bangsa, yaitu Palestina dan Israel. Masing-masing bangsa tersebut mengakui memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Hal inilah yang membuat mereka berjuang untuk memperoleh apa yang diakuinya sebagai milik kelompok. Perselisihan tentang keberadaan Israel di tengah negara-negara Arab yang berkepanjangan hingga kini belum mencapai kesepakatan yang pasti.¹

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina tidak terlepas dari karakteristik kawasan Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan yang rentan akan konflik. Pada dasarnya, hubungan antara negara-negara yang berdaulat di Timur Tengah sama dengan hubungan negara-negara di belahan dunia yang lainnya yaitu berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Akan tetapi, faktor geografis serta historis sangat kental mempengaruhi hubungan antara negara tersebut. Colbert C. Held mengatakan bahwa:

*“The Middle East has had its share of conflicts over borders, access to scarce resources, competing ideologies, leadership, and self-determination since the establishment of numerous newly independent states. Geographically, the conflicts may be across frontiers, sub regional, regional, or between the region and extra regional forces”.*²

(Timur Tengah memiliki pangsa konflik perbatasan, jalan menuju sumberdaya yang langka, persaingan ideologi, kepemimpinan, dan perjuangan penentuan nasib sendiri sejak pemebeentukan sejumlah negara-negara baru. Secara geografis, konflik lintas batas terjadi di dalam sub regional, regional, atau antara regional dengan kekuatan ekstra regional)

Sebenarnya, secara historis baik Israel maupun Palestina merupakan bangsa yang sudah menduduki tanah Palestina jauh sebelum Islam datang. Mereka hidup berdampingan bahkan sejak pertama kali Kerajaan Bani Israel

¹ Secara historis, imperium-imperium yang pernah berkuasa di kawasan Timur Tengah, baik Mesir, Persia, maupun Romawi dan bahkan Imperium Ottoman Turki, belum pernah berhasil menyepakati tapal batas yang jelas bagi keberadaan wilayah Israel

² Colbert C. Held, *Middle East Patterns: Places, Peoples, and Politics*, London: Westview Press, 1989, hlm. 57

didirikan. Walaupun hidup berdampingan, kedua bangsa ini memiliki hubungan yang tidak baik. Bani Israel dan bangsa Filistin (sebutan untuk bangsa Palestina saat itu) sering berperang untuk menundukan satu sama lain. Oleh karena itu, konflik kedua bangsa ini sebenarnya sudah ada, jauh sebelum Theodor Herzl³ merencanakan pembentukan “Negara Zionis Israel”.

Data-data sejarah dan berbagai kitab suci agama samawi telah memberikan fakta bahwa Bani Israel pernah mendirikan kerajaan di tanah Palestina sekitar tahun 1020 SM. Akan tetapi, sama seperti kerajaan lain yang ada pada saat itu, Kerajaan Bani Israel mengalami masa kejayaan dan kehancuran. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat bangsa Israel. Setelah berhasil mengalahkan Fir'aun, bangsa Israel berpindah dari Mesir menuju semenanjung Sinai dan Kanaan (Palestina). Kemudian, Nabi Daud, diberi perintah untuk memimpin Bani Israel dan mendirikan kerajaan Israel di Kanaan (Palestina). Kerajaan Israel mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Pada masa ini wilayah kerajaan Israel diperluas dari Sungai Nil di selatan hingga ke Sungai Efrat di utara.⁴

Kehancuran bangsa Israel terjadi ketika pemerintahan Nabi Sulaiman berakhir. Kerajaan Israel terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Israel di utara dengan pusatnya di kota Samaria dan Kerajaan Yahuda di bagian selatan dengan pusatnya di Yerusalem. Setelah kerajaan ini dibagi menjadi dua, keyakinan bangsa Israel mulai melemah. Hal inilah yang menjadi faktor kemunduran Kerajaan Bani Israel. Kemudian bangsa ini mulai ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Assyuria dan Babilon.⁵

³ Theodor Herzl dianggap sebagai *Founding Father* Negara Israel. Herzl lahir di Budapest tahun 1860. dia dididik dalam semangat primordialisme Yahudi Jerman. Tahun 1878 Herzl pindah ke Wina untuk belajar ilmu hukum. Setelah lulus dia menjadi wartawan koran liberal Wina *Neue Freie Presse* dan penulis naskah drama *the Ghetto*. Setelah peristiwa Dreyfus tahun 1894, eksklusifitas (ketertutupan) kaum Yahudi membuat mayoritas rakyat Jerman marah dan mengucilkan mereka. Oleh karena itu, Herzl merasa perlu memikirkan nasib kaum Yahudi agar punya Negara sendiri. Lalu dia menulis buku *der Judenstaat* (Negara Yahudi) pada 1896. Herzl bersikukuh terus mewacanakan Negara Yahudi. Diapun menggalang dana dari orang-orang Yahudi untuk merealisasikan cita-citanya. Sejak itulah istilah Zionisme muncul dan berkembang. Herzl meninggal pada tahun 1904. Lihat Anwar M. Aris, *Israel is not Real: Negara Fiktif di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing, 2009, hlm. 21-22.

⁴ Anton A. Ramdan, *Rahasia Bisnis Yahudi*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2009, hlm. 19-20.

⁵ *Ibid.*,

Akibat dari penaklukan ini, sebagian besar bangsa Israel berpencar ke berbagai belahan dunia. Akan tetapi, sekitar pada tahun 539 SM, Raja Persia Cyrus Agung mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka, Jerusalem. Namun, banyak di antara mereka yang tidak kembali ke kampung halaman dan tetap tinggal di daerah perantauan masing-masing. Akan tetapi, pada tahun 63 SM, kerajaan Romawi berhasil menaklukan wilayah Palestina, tempat di mana kerajaan Israel pernah berjaya. Kehancuran secara *de facto* Kerajaan Israel menyebabkan kerajaan tersebut terhapus dari percaturan kekuasaan dunia.⁶

Kemudian, pada tahun 1948 terbentuklah suatu negara berdaulat yang bernama Israel. Negara ini merupakan sebuah negara Yahudi di wilayah Timur Tengah.⁷ Negara ini terbentuk oleh pemikiran seorang Yahudi asal Budhapest, yaitu Theodor Herzl, mengenai *der Judenstaat* yang mengungkapkan tentang pentingnya untuk membentuk sebuah negara Yahudi. Pemikiran ini terealisasi dengan diproklamasikannya Israel sebagai sebuah negara pada tanggal 14 Mei 1948 di Tel Aviv.

Eksistensi Israel dalam peta dunia, perlahan-lahan memudahkan eksistensi negara yang sudah terbentuk sebelumnya yaitu Palestina.⁸ Sejak didirikan, wilayah Israel terus mengalami perluasan. Perluasan ini dilakukan dengan mengambil tanah-tanah bangsa Palestina, yang kini hanya tersisa dua daratan saja yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat.⁹ Hal ini memicu kemarahan negara-negara Timur

⁶Mungkin hal ini yang menyebabkan penggunaan kata Israel semakin pudar dan tergantikan dengan kata Yahudi sesuai dengan keyakinan agama mereka yaitu Yahudi. Jika diperhatikan bangsa Israel yang dibebaskan oleh Cyrus Agung adalah bangsa Israel dari Kerajaan Yahuda di Palestina Selatan. Kerajaan Israel di selatan memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan Kerajaan Israel di utara. Setelah kerajaan utara hancur banyak bangsa Israel yang pindah ke Israel selatan dan ikut menyebar ke segala penjuru dunia setelah kerajaan selatan hancur. *Ibid.*, hlm. 21.

⁷Perselisihan tentang keberadaan Israel di tengah negara-negara Arab yang berkepanjangan hingga kini belum mencapai kesepakatan yang pasti. Secara historis, imperium-imperium yang pernah berkuasa di kawasan Timur Tengah, baik Mesir, Persia, maupun Romawi dan bahkan imperium Ottoman Turki, belum pernah berhasil menyepakati tapal batas yang jelas bagi keberadaan wilayah Israel.

⁸ Sebelum berdiri pada Mei 1948, daerah yang disebut Israel pada saat itu, merupakan tempat tinggal bangsa Palestina. Pada saat itu, umat Islam, Kristen, dan Yahudi tinggal berdampingan secara damai. Sebelum Perang Dunia II, Palestina merupakan wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang diambil alih oleh pemerintahan Inggris dengan mandat LBB (Liga Bangsa-Bangsa) sebagai sebuah wilayah Mandat Britania (Inggris). *Ibid.*, hlm 42-43.

⁹ Pada 29 November 1947, PBB (perserikatan Bangsa-Bangsa) telah membagi wilayah Mandat Britania atas Palestina. Meski ditentang keras oleh Negara-negara Timur Tengah dan negara-

Tengah dan negara-negara Islam lainnya. Sehari setelah diproklamasikannya negara Israel, negara Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya menyerbu Tel Aviv sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan tersebut.

Pada 1 Agustus 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan mengakhiri Mandat Britania untuk Palestina dengan tujuan mengakhiri perang. Kemudian PBB membagi wilayah tersebut dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) No. 181 yang disetujui oleh Majelis Umum PBB.¹⁰ Akan tetapi, Resolusi ini tidak membuahkan perdamaian yang diinginkan. Kemudian konflik semakin berkembang bukan hanya menjadi konflik Israel-Palestina tetapi menjadi konflik Arab-Israel.¹¹

Konflik Israel-Palestina berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai saat ini konflik masih berlangsung. Berbagai konflik yang disertai perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel menjadi sebuah indikasi bahwa Israel merupakan sebuah negara yang kuat untuk mempertahankan keyakinan mereka tentang tanah yang dijanjikan kepada mereka. Keyakinan inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses perdamaian Israel dan Palestina.

Sebenarnya, Israel sendiri telah melakukan usaha untuk menciptakan perdamaian dengan konsep "*land for peace*" yang diusung oleh Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin. Konsep ini menghasilkan perundingan damai yang ditandatangani oleh pihak Israel maupun Palestina. Perundingan ini dikenal dengan Perundingan Damai Oslo. Perundingan ini berlangsung di Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan ditandatangani secara resmi di Washington D.C. pada 13 September 1993 oleh Mahmud Abbas mewakili PLO dan Shimon Peres mewakili Israel. Peristiwa itu disaksikan oleh Warren Christoper dari Amerika Serikat dan

negara Islam lainnya, keputusan tersebut tetap diterapkan secara sepihak dengan ketentuan bahwa umat Yahudi mendapat 70% dari seluruh wilayah bumi Palestina.

¹⁰ Dalam resolusi tersebut, terdapat 33 negara setuju, 13 negara menolak, dan 10 negara netral. Resolusi tersebut membagi wilayah Palestina untuk dimiliki kaum Zionis yang didatangkan dari Inggris, Amerika Latin, Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara lainnya.

¹¹ Konflik antara Arab-Israel yang terjadi antara lain Tragedi Kanal Suez Mesir (1956), Konflik Air di Yordania (1964), Genosida Pengungsi Palestina di Es Samu Yordania (1966), pencaplokan Daratan Tinggi Golan (1966), Perang Enam Hari (1967), Perang Abu-Ageila (1967), Perang Yom Kipur (1973), Pembasmian Pengungsi Palestina di Lebanon Selatan (1982), Intifadah Pertama (1987), Intifadah Kedua (2000), konflik Israel-Lebanon (2006), dan Operasi Cast Lead tahun 2009.

Andrei Kozyrev dari Rusia, di depan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO, Yasser Arafat.

Pada awalnya, perjanjian ini diterima oleh kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina.¹² Akan tetapi, perjanjian ini harus terhenti di tengah jalan. Hal ini disebabkan oleh peristiwa yang mengejutkan dunia dan masyarakat Israel yaitu terbunuhnya Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin pada tanggal 4 November 1995. Rabin dibunuh oleh anggota kelompok garis keras yang dilakukan oleh Yigal Amir tidak lama setelah Rabin selesai menyampaikan pidato kenegaraan pada acara reli perdamaian yang diadakan secara meriah di Tel Aviv. Alasan utama peristiwa ini adalah karena langkah perdamaian Rabin dinilai terlalu banyak memberikan konsesi kepada pihak Palestina. Hal ini mengindikasikan bahwa ide *land for peace* tidak sepenuhnya mendapat dukungan.

Peristiwa pembunuhan Rabin menjadi salah satu faktor penghambat proses perdamaian Israel-Palestina. Peristiwa ini kemudian terkait dengan meningkatnya fundamentalisme Yahudi Israel yang pro kepada Zionis. Meningkatnya fundamentalisme di kalangan masyarakat Yahudi telah menghambat proses perdamaian. Lalu Suryade dalam tesisnya yang berjudul “Politik Kekerasan Israel di Bawah Perdana Menteri Ariel Sharon dalam Konflik Israel Palestina” menjelaskan bahwa proses perdamaian Israel Palestina terhambat oleh ideologi partai-partai kanan dan agama, yang mendominasi perpolitikan Israel.¹³

¹² Awalnya, para pemimpin Palestina melihat Deklarasi Prinsip yang disetujui PLO Israel merupakan kemenangan PLO. Berbeda dengan anggapan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker, bahwa dengan Deklarasi tersebut Israel telah menjadi wakil rakyat Palestina karena adanya konsesi-konsesi yang diberikan PLO sebagai pembatalan Piagam PLO, penolakan penggunaan kekerasan, serta pembatalan pengakuan terhadap seluruh resolusi PBB, kecuali Resolusi 242 dan 338. Padahal, banyak Resolusi PBB yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi para pengungsi Palestina, termasuk hak kompensasi dan hak repatriasi. Bagi Israel, yang paling penting dengan Deklarasi tersebut adalah berhentinya aksi Intifadah (perlawanan), dan ketentuan akan keharusan Pemerintah Otonomi Palestina (*Palestinian Authority*) untuk menghentikan perlawanan bersenjata dari semua kelompok garis keras Palestina. Intifadah sesungguhnya sangat penting bagi rakyat Palestina, karena dengan itu dunia mengakui Israel sebagai kekuatan pendudukan yang harus meninggalkan tanah Palestina. (M. Amien Rais, “Proses Perdamaian Timur Tengah Sepeninggal Rabin”, disampaikan dalam seminar pusat Pengkajian Masalah-Masalah Timur Tengah di FISIP UGM, Yogyakarta, 16 November 1995). Lihat, Lalu Suryade, “Politik Kekerasan Israel di Bawah Perdana Menteri Ariel Sharon dalam Konflik Israel Palestina”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 12.

¹³ Lalu Suryade, *ibid.*,

Suryade menjelaskan pula bahwa kemenangan kandidat Partai Buruh, Ehud Barak atas Benjamin Netanyahu pada pemilu 1999 yang sempat membangkitkan harapan perdamaian, akhirnya memudar setelah partai-partai agama seperti Partai Ortodoks Shas¹⁴ mulai meninggalkan koalisi pimpinan Ehud Barak ketika dia memutuskan ikut berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Camp David II (KTT Camp David II) pada Juli 2000. Setelah itu, pemerintah koalisi pimpinan Perdana Mentrei Barak semakin lemah dan akhirnya bubar. Kekalahan telak Ehud Barak dari Ariel Sharon dalam pemilu Februari 2001, semakin menunjukkan bahwa rakyat Israel lebih memilih kubu kanan. Kaum Israel lebih kuat memegang aspek ideologi Zionis Yahudi dalam pandangan-pandangan politiknya. Sehingga, lebih sulit memberikan konsesi-konsesi politik seperti *land for peace* kepada Palestina.¹⁵

Kubu Kanan dikenal juga sebagai kelompok konservatif. Konservatif berarti kehendak mempertahankan, mengawetkan dan tidak mau melepas semua yang baik dan sehat dari masa lampau, dari sejarah yang mulia dari suatu bangsa atau negara. Dalam politik, konservatisme merupakan suatu paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata-pranata yang sudah ada, menghendaki perubahan bertahap serta menentang perubahan yang radikal.¹⁶

Suryade mengatakan bahwa menguatnya kubu konservatif dalam Politik Israel akan membawa negara Israel kepada konsepsi awal berdirinya negara Yahudi di atas landasan Zionisme yang dinyatakan oleh Theodore Herzl dalam *der Judenstaat*.¹⁷ Konsep zionisme yang diungkapkan oleh Theodore Herzl mengenai tanah yang dijanjikan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Partai Orthodox Shas merupakan partai politik orang-orang Sephardi. *Sephardi* merupakan salah satu etnis utama Yahudi yang berasal dari Spanyol. *Sephardik* sendiri secara etimologis berasal dari kata Ibrani yang berarti Spanyol (*Spain*) dan orang-orang Yahudi dari etnis ini disebut *Sephardim*. Secara umum, kepercayaan-kepercayaan orang *Sephardi* lebih condong kepada agama Yahudi Orthodox. Pemikiran orang *Sephardi* banyak sekali dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Arab yang banyak mengandung unsur mistik.

¹⁵ Mustafa Abd. Rahman, *Dilema Israel: antara Krisis Politik dan Perdamaian*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2002, hlm: 64-65.

¹⁶ B.N. Marbun, SH., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, hlm. 264.

¹⁷ Lalu Suryade, op., cit.,

“Once the jews were fixed in their own land, it would no longer be possible to scatter them all over the world. The diaspora cannot take place again, unless the civilization of the whole earth shall collapse. Here it is fellow jews! Neither fable nor deception! Everyman may test its reality for him self, for every man will carry over with him a portion of the promised land-one in his head, another in his arms, another in his acquired possessions.”¹⁸

(Setelah bangsa Yahudi berkumpul di tanah mereka sendiri, itu berarti waktu penyebaran mereka ke seluruh dunia akan berakhir. Diaspora tidak boleh berlangsung lagi, kecuali peradaban di bumi ini runtuh. Di sinilah para sesama Yahudi! Bukan dongeng atau penipuan! Setiap manusia boleh menguji kebenarannya, untuk setiap manusia akan membawa sebuah bagian dari tanah yang dijanjikan satu di kepalanya, lainnya di kedua tangannya, lainnya berada didalam apa yang dia miliki.)

Bagi kelompok kanan Yahudi, prinsip-prinsip dasar Zionisme tersebut yang dihubungkan dengan legitimasi kitab suci, mejadi acuan dasar dalam pengambilan kebijakan politik. Sebagai contoh beberapa bulan sebelum Perdana Menteri Yitzak Rabin terbunuh, sekitar 1.500 Rabbi mengeluarkan fatwa yang menyerukan kepada pasukan Israel agar tidak mematuhi instruksi pemerintah menarik diri dari Tepi Barat sesuai Kesepakatan Oslo. Mereka mengutuk Rabin karena bersedia melepaskan Tepi Barat yang mereka anggap secara ideologis merupakan tanah Israel sesuai dengan penuturan kitab suci Taurat. Para Rabbi itu mengutip ayat-ayat suci dalam seruan tersebut.¹⁹

Kelompok kanan di Israel, didominasi oleh partai konservatif Likud. Partai ini menggunakan prinsip Zionisme dan tidak mau berkompromi dengan Palestina. Para pejabat Likud tidak mau melakukan kepura-puraan dengan mengikuti berbagai perundingan perdamaian yang hanya akan memberi konsesi bagi Palestina. Bagi mereka, memberikan konsesi kepada Palestina sama saja mengancam keamanan nasional mereka. Selain itu, mereka tidak mau menerima gagasan tentang pembagian Palestina sesuai dengan Resolusi PBB 242. Prinsip utama Likud adalah mewujudkan *Eretz Yisrael* secara utuh.²⁰

¹⁸ Martin Gilbert, *Israel: A History*, Black Swan, London, 1999, hlm. 12.

¹⁹ Mustafa Abd. Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina: dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002, hlm.171.

²⁰ Paul Findley, *Diplomasi Munafik Zionis Israel: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*, Bandung: Penerbit Mizan, 2006, hlm. 112.

Perubahan kekuasaan politik Israel pasca Kesepakatan Oslo 1993 tidak berhasil menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perdamaian. Terbunuhnya Rabin memberikan isyarat bahwa upaya damai yang dilakukan oleh elit pemerintah Israel, mendapat perlawanan keras dari kelompok kanan. Ehud Barak dan Simon Peres yang lebih pro-perdamaian tidak dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya karena adanya perlawanan dari kubu konservatif dan kelompok garis keras. Hal ini terlihat saat pemerintahan Partai Likud berkuasa, yaitu pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu dan Ariel Sharon. Orientasi terhadap perdamaian kemudian memudar dan berganti kepada orientasi keamanan nasional.

Setelah pemerintahan Rabin jatuh, konsep "*land for peace*" masih coba diusahakan oleh para penerus Rabin seperti Perdana Menteri Shimon Peres dan Perdana Menteri Ehud Barak. Akan tetapi, usaha mereka mendapat tekanan-tekanan dari kaum konservatif yang kemudian menjadi salah satu faktor utama kejatuhan pemerintahan mereka masing-masing. Perdana Menteri Shimon Peres dari Partai Buruh kemudian dikalahkan oleh Benjamin Netanyahu dari Partai Likud yang berasal dari kelompok konservatif. Begitupula, Ehud Barak, Perdana Menteri setelah Netanyahu yang berkuasa sejak tahun 1999 hingga awal 2001 terlibat dalam pertarungan kepentingan, antara upaya meneruskan proses perundingan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Camp David II, dengan tekanan-tekanan politik domestik yang dihadapinya.

Benjamin Netanyahu telah mengangkat isu proses perdamaian di Timur Tengah dengan mengatakan bahwa Israel akan meninjau kembali proses perdamaian Timur Tengah yang disepakati dalam Perundingan Madrid. Terhadap proses perdamaian sikap Netanyahu adalah didasarkan pada tiga hal yaitu, tidak akan ada negara Palestina merdeka, tidak akan ada perundingan mengenai status kota Yerusalem, tidak akan mengembalikan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah. Walaupun begitu, Netanyahu masih bersedia duduk dalam beberapa perundingan damai seperti Konferensi Tingkat Tinggi Wye Plantation, Wye River I dan Wye River II. Akan tetapi, jika sebelumnya Rabin membawa visi "*land for peace*" untuk mengajak pihak Palestina berunding dengan Israel, Netanyahu mengubahnya menjadi tanah dengan jaminan keamanan, "*land for security*".

Eskalasi konflik terjadi ketika Sharon menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Pihak garis keras Palestina mengobarkan serangan-serangan bom bunuh diri (*suicide bombing*) dengan target-target sipil dan militer.²¹ Israel membalas dengan serangan militer dari darat maupun udara yang menghancurkan berbagai sarana, baik kawasan pemukiman padat maupun *camp* pengungsi, juga dengan serangan peluru kendali kepada sasaran pejuang Palestina.

Lalu Suryade menggambarkan tindakan saling balas dengan dua puncak utama. Puncak pertama adalah kunjungan Ariel Sharon yang memasuki Masjid Al-Aqsa yang dilakukannya untuk memperlihatkan simbol kedaulatan Israel atau seluruh tanah pendudukan. Tindakan Sharon tersebut disambut munculnya gerakan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan Intifadah al-Aqsa pada 28 September 2000. Dalam Intifadah Al-Aqsa, perlawanan rakyat Palestina menggunakan peralatan yang lebih rumit dibanding Intifadah I yang muncul pada 1987. Intifadah Al-Aqsa menggunakan bom-bom bunuh diri (*suicide bombing*) kepada sasaran sipil dan militer Israel, baik di tanah pendudukan maupun di wilayah Israel sendiri.²²

Titik balik kedua dari proses perdamaian yang berlangsung sejak Kesepakatan Oslo adalah serangan militer Israel ke wilayah Palestina, termasuk Istana Yasser Arafat di Ramallah, atas perintah Perdana Menteri Ariel Sharon mulai Jumat 29 Maret 2002. Serangan militer ini adalah yang terbesar sejak Perang Lebanon 1982. Warga Palestina yang ditampung di kamp pengungsi Jenin diserang dengan peralatan militer canggih yang menimbulkan korban mencapai 2000 orang. Hal ini mendorong PBB membuat tim pencari fakta yang ditolak kehadirannya oleh Ariel Sharon dan akhirnya dibubarkan.²³

²¹ Pihak pejuang palestina menyebut bom bunuh diri itu sebagai bom syahid, yang menunjukkan orientasi perjuangan pada perang suci (*holy war*) melawan pendudukan Israel. Lalu Suryade, *op. cit.*, hlm. 15.

²² Sebelumnya, Intifadah I muncul sebagai sambutan atas seruan tokoh spiritual Palestina, Syaikh Ahmad Yasin pada 1987 yang menyebabkan tokoh lumpuh tersebut dijebloskan ke dalam penjara Israel.

²³ *ibid.*,

Baik Netanyahu maupun Sharon, keduanya berasal dari kubu kanan yang sangat menekankan terhadap masalah teritorial wilayah Israel. Kelompok ini beracuan kepada Zionisme Israel tentang tempat yang dijanjikan. Konsep “*land for peace*” banyak mendapat kritikan dari kaum konservatif karena dianggap memberi celah kepada pihak Palestina untuk menguasai kembali tanah Israel. Mereka tidak mau memberi konsensi apapun yang menguntungkan pihak Palestina. Penggunaan instrumen militer dalam kebijakan kaum konservatif menunjukkan ketegasan mereka mengenai kedaulatan negara Israel sesuai dengan ideologi Zionisme.

1.2 Perumusan Masalah

Partai Buruh merupakan partai moderat yang lebih berorientasi menggunakan jalur perundingan untuk menciptakan perdamaian. Hal ini yang menyebabkan pemerintahan Partai Buruh selalu bersedia untuk duduk dalam suatu perundingan damai sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Israel ketika berada di bawah pemerintahan Partai Likud. Partai ini merupakan sebuah partai yang sangat konservatif dan menjaga prinsip Zionisme yang utama yaitu menciptakan *Eretz Yisrael* atau Israel Raya. Prinsip ini tentunya akan mempengaruhi pilihan kebijakan yang akan diambil oleh Israel. Begitu pula dengan proses perdamaian Israel-Palestina, yang termasuk kebijakan luar negeri Israel. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan konflik Israel-Palestina sampai tahun 2003?
2. Bagaimana strategi pemerintahan konservatif Likud dalam konflik Israel-Palestina dalam kurun waktu 1996 sampai 2003 ?
3. Bagaimana pengaruh konservatisme Likud terhadap proses perdamaian Israel-Palestina dalam kurun waktu tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemerintahan Konservatif Likud Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina Tahun 1996-2003” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Sebagai karya tulis ilmiah, skripsi ini memiliki beberapa tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya mengenai dinamika masyarakat Timur Tengah. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mengetahui sejarah perkembangan konflik Israel Palestina sampai tahun 2003.
2. Mengetahui strategi Israel terhadap proses perdamaian Israel-Palestina di bawah pemerintahan konservatif Likud tahun 1996 sampai 2003.
3. Mengetahui pengaruh berkuasanya pemerintahan konservatif terhadap proses perdamaian Israel-Palestina pada kurun waktu tersebut.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini merupakan suatu kajian ilmiah yang membahas salah satu peristiwa dalam sejarah masyarakat Timur Tengah. Pengkajian ini bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan mengenai sejarah masyarakat Timur Tengah. Sehingga karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu analisis dan dapat menjadi suatu referensi bagi perkembangan pengetahuan tentang masyarakat Timur Tengah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh konservatisme Likud terhadap proses perdamaian Israel-Palestina pada kurun waktu 1996-2003, merupakan suatu bentuk usaha untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan konflik Israel dan Palestina pada kurun waktu tersebut. Dengan mengetahui perkembangan konflik Israel Palestina, pengetahuan mengenai dinamika hubungan di kawasan Timur Tengah akan semakin bertambah. Pengetahuan ini kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu *input* dalam kegiatan analisis sejarah masyarakat Timur Tengah.

Pada masa pemerintahan Netanyahu sampai Ariel Sharon terjadi perubahan orientasi proses perdamaian antara Israel-Palestina. Perubahan orientasi tersebut kemudian diimplementasikan menjadi kebijakan dalam menangani konflik Israel Palestina. Kemenangan Netanyahu dari partai Likud dan peningkatan perolehan kursi partai-partai agama sesungguhnya menunjukkan perubahan peta sosial dan kecenderungan masyarakat Yahudi di Israel.

Walaupun setelah Netanyahu pemerintahan Israel dipegang oleh kelompok kiri, tetapi Ehud Barak sebagai Perdana Menteri tidak mampu menahan gelombang kekuatan konservatif. Ehud Barak yang berkuasa sejak tahun 1999 hingga awal 2001 terlibat dalam pertarungan kepentingan, antara upaya meneruskan proses perundingan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Camp David II, dengan tekanan-tekanan politik domestik yang dihadapinya. Akhirnya, Ehud Barak dikalahkan Ariel Sharon dalam pemilu 6 Februari 2001.

Ariel Sharon menempuh langkah-langkah yang berbeda dengan perdana menteri sebelumnya. Ia tidak berupaya meneruskan proses-proses perundingan dengan pihak Palestina. Oleh karena itu, kegiatan analisis dalam skripsi ini akan dibatasi dari masa pemerintahan Netanyahu (1996) sampai masa pemerintahan Ariel Sharon (2003).

1.6 Model Operasional Penelitian

Skripsi ini terdiri dari dua variabel analisis, yaitu *variable dependent* dan *variable independent*. *Variable dependent* adalah variable yang dalam proses analisis tidak bisa berdiri sendiri tanpa variable lain. Sedangkan *variable independent* adalah variable yang bebas dan tidak terikat.

Variable terikat dalam skripsi ini adalah proses perdamaian Israel-Palestina. Sedangkan variable bebas atau *variable independent* adalah pemerintahan konservatif Likud. Hal ini mengindikasikan bahwa perdamaian Israel-Palestina pada tahun 1996-2003 memiliki keterkaitan dengan pemerintahan konservatif Likud. Keterkaitan ini akan membawa dampak atau pengaruh terhadap proses perdamaian Israel Palestina.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konteks Penelitian

Penjelasan mengenai konteks dalam kegiatan penelitian merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu untuk dikaji dan dianalisis. Kamus Politik karya B.N. Marbun menjelaskan bahwa konteks merupakan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam pengertian mengenai suatu konteks, Marbun menambahkan bahwa konteks dapat diartikan sebagai bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menjelaskan kejelasan makna. Dari kedua pengertian yang diberikan oleh Marbun, dapat diambil suatu intisari mengenai suatu konteks yaitu apa-apa saja yang dapat mendukung suatu hal dan dapat memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.²⁴ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kegiatan penelitian maka konteks penelitian adalah suatu upaya untuk menjelaskan apa-apa saja yang berhubungan serta mendukung suatu penelitian dalam rangka memperjelas fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pemerintahan Konservatif Likud Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina Tahun 1996-2003” merupakan suatu upaya untuk memaparkan pengaruh apa saja yang ditimbulkan oleh suatu perubahan dalam suatu konflik. Konservatisme Israel pada masa pemerintahan Likud tahun 1996, telah menimbulkan suatu perubahan mendasar yaitu landasan proses perdamaian Israel-Palestina. Pada masa pemerintahan Partai Buruh, landasan utama proses perdamaian adalah “*land for peace*”. Akan tetapi, pada saat Partai Likud berkuasa, landasan tersebut diubah menjadi “*land for security*”. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh Partai Likud, menimbulkan eskalasi konflik. Hal ini diindikasikan tingkat penggunaan kekerasan yang meningkat baik dari pihak Israel maupun Palestina.

Dalam usaha untuk menjelaskan mengenai dampak atau pengaruh konservatisme Likud terhadap proses perdamaian Israel-Palestina, diperlukan suatu pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu yang akan mendukung

²⁴ B.N. Marbun, SH., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, hlm. 267.

kegiatan analisis. Konsep²⁵ merupakan hal penting dalam melakukan kegiatan analisis. Konsep-konsep tersebut akan dieksplorasi dengan merangkum dan membahas konsep dan teori dari hasil penelitian orang lain yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Setelah itu, pemahaman tentang konsep-konsep tersebut dilanjutkan dengan menjelaskan perspektif teoritis yang akan digunakan dalam kegiatan analisis dan bagaimana pengoperasian konsep tersebut.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan beberapa konsep terkait yang akan menunjang kegiatan deskripsi dan analisis mengenai pengaruh konservatisme Likud terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Konsep pertama yang akan digunakan adalah konsep tahapan konflik. Konsep mengenai konflik digunakan untuk menjelaskan mengenai konflik yang sedang terjadi antara Israel-Palestina. Konsep selanjutnya adalah konsep konservatisme. Konsep ini akan mengeksplorasi apa dan bagaimana ideologi suatu konservatisme. Terakhir, adalah konsep Zionisme, yang merupakan konsep penjelas dari konsep konservatisme yang dipegang oleh Partai Likud. Konsep-konsep tersebut kemudian akan dieksplorasi dengan melihat bagaimana bentuk kedua konsep menurut para ahli hubungan internasional. Penggalian konsep tersebut kemudian akan menjadi bekal untuk mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam analisis kasus.

²⁵ Konsep merupakan suatu kata atau frase yang mewakili deskripsi suatu hal. Menurut Mohtar Masoed konsep merupakan salah satu simbol yang penting dalam ilmu atau sains untuk mendeskripsikan dunia empiris. Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau fenomena. Pada intinya konsep merupakan sebuah kata atau frase yang melambangkan suatu gagasan yang digunakan untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-ciri yang relevan bagi kita. (Mochtar Masoed, *Metodologi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994. Hlm. 93-94)

2.2 Tahapan Konflik

Konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin “*confligere*” yang dalam pengertian sederhana berarti menyerang secara bersama-sama (*strike together*). Menurut C.R Mitchell konflik adalah sebuah situasi dimana dua atau lebih orang saling mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya, tetapi hanya salah satu yang berhasil mencapainya. Intinya pasti ada sedikitnya dua bagian, masing-masing bagian menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuannya objek atau situasi yang diinginkan dan masing-masing bagian beranggapan bahwa yang lainnya sebagai penghalang tujuannya tersebut.²⁶

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.²⁷

Menurut James A. Schellenberg, konflik sosial adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain dalam rangka memperebutkan sesuatu yang dikehendakinya, berdasarkan pada persaingan kepentingan-kepentingan, karena perbedaan identitas atau sikap. Levi berpendapat bahwa karakter yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan memberikan nuansa khusus bagi hubungan antar negara. Hal ini akan mengakibatkan penggunaan ancaman atau kekuatan oleh suatu negara dalam menyelesaikan konflik akan lebih menonjol. Jika suatu negara dapat menggunakan kekuatannya dengan sewenang-wenang dengan sepihak, potensi destruktif yang diakibatkan oleh konflik tersebut menjadi semakin besar dan dampak sosial yang harus dipikul untuk mengatasi konflik tersebut akan sangat luas. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya penggunaan kekerasan dalam masyarakat internasional, penyelesaian konflik yang bersifat konstruktif seperti negosiasi, cenderung dibanalkan.²⁸ K.J. Holsti dalam *International Politics: A Framework For Analysis* mengungkapkan bahwa konflik

²⁶ .Zulkarnain, “Diktat Mata Kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik Internasional”, Jakarta: Universitas Nasional, Januari 2005. hlm.6

²⁷ .Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. Resolusi Damai Konflik Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .2000.hlm.7

²⁸ Werner Levi, *International Politics Foundation of the System*, Minneapolis USA: University of Minnesota Press, 1974, hlm. 172.

internasional terjadi ketika suatu kelompok berusaha untuk memperoleh kepentingannya seperti wilayah, keamanan, pasar dan sebagainya.²⁹

Menurut keempat pendapat diatas, dapat diambil *keyword* mengenai konflik yaitu, benturan antara dua kepentingan dalam suatu interaksi antar dua individu atau lebih. Edward Azar memberikan suatu konsep pelengkap mengenai konflik yang berkepanjangan atau *protracted social conflict*. Konflik ini disebabkan bukan karena persoalan ekonomi dan kekuasaan tetapi *the denial of elements necessary to the development of all people*. Perasaan ketidaknyamanan, perbedaan identitas seperti etnik, ras, agama, pengakuan sosial, dan partisipasi yang efektif dalam interaksi sosial dan politik menjadi faktor-faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam masyarakat seperti ini, umumnya konflik dipertajam oleh keterbelakangan ekonomi sosial, ketimpangan struktural, dan ketidak paduan sistem sosial maupun politik.³⁰

Konflik Israel-Palestina telah berumur lebih dari setengah abad. Namun, Zionisme mendasarkan ideologi atas klam-kalim biblikal yang telah berumur ribuan tahun. Kisah-kisah dari kitab suci sering kali dikutip untuk melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang diambil untuk mendapatkan tanah dan memperluas wilayah kekuasaan Israel. sehingga menurut pandangan Edward Azar, konflik semacam ini sangat tepat jika dikatakan sebagai konflik yang berkepanjangan.³¹

Konflik antara Israel dan Palestina telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam jangka waktu tersebut, konflik Israel dan Palestina mengalami pasang surut. Berbagai upaya perundingan perdamaian dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi tetap saja belum dapat menyelesaikan konflik diantara keduanya. Dinamika konflik ini dapat diperhatikan melalui tahapan-tahapan dalam sebuah konflik yang dijelaskan oleh Simon Fisher.

²⁹ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework For Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1992., 396-397.

³⁰ Hug Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse., *Resolusi Damai Konflik Kontermporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 125.

³¹ Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban: Dan Masa Depan Politik Dunia*, Penerbit Qalam: Yogyakarta, 2001, hlm. 499-500.

Tahapan konflik merupakan suatu usaha untuk melihat bagaimana perkembangan suatu konflik. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dihubungkan dengan garis yang menjelaskan hubungan diantara mereka. Selain itu garis hubungan juga menunjukkan permasalahan yang ada. Pemetaan konflik ini dapat membawa pihak- pihak yang terlibat konflik untuk saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing pihak terhadap permasalahan yang mereka miliki.

Tujuan dari pemetaan konflik adalah untuk memahami situasi dengan lebih baik, untuk melihat hubungan diantara berbagai pihak secara lebih jelas, untuk menjelaskan letak kekuasaan, untuk melihat keseimbangan antar pihak, untuk melihat para sekutu ataupun mencari sekutu yang potensial, untuk mengidentifikasi awal intervensi, dan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.³²

Pertama, tahap prakonflik merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangann umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Terdapat ketegangan hubungan diantara pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.³³

Kemudian tahapan konflik berubah menjadi tahapan konfrontasi. Tahapan Konfrontasi merupakan tahap dimana konflik berubah menjadi konflik terbuka. Jika hanya pada satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak. Masing-masing pihak mengumpulkan sumberdaya dan kekuatan dan mungkin juga mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan

³² Fisher, Simon, Jawed Ludin, and Steve Williams. "Understanding Conflict" and "Tools for Conflict Analysis," chapters 1 and 2 in *Working With Conflict: Skills and Strategies for Action*. New York: Zed Books, 2000. Lihat di <http://csps.ugm.ac.id/Download-document/Pemetaan-Konflik-UMY-200810.html> (Diakses pada tanggal 30 November 2009)

³³ *Ibid.*,

konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat tegang.³⁴

Puncak dari tahapan ini adalah tahapan krisis. Tahapan krisis merupakan puncak konflik dimana ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar ini merupakan periode perang ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara kedua belah pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lawan muncul dipermukaan.³⁵

Konflik mulai menurun pada tahapan akibat. Tahapan akibat terjadi setelah konflik berlangsung. Satu pihak mungkin menaklukan pihak lain atau mungkin melakukan gencatan senjata. Satu pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Satu pihak yang memiliki otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua belah pihak menghentikan pertikaian. Apapun keadaan tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan ada penyelesaian.

Terakhir adalah tahapan pasca-konflik. Tahapan pasca-konflik adalah akhir dari situasi tegang. Hal ini diindikasikan dengan adanya usaha untuk mengakhiri konfrontasi kekerasan, mengurangi ketegangan, dan menjalin hubungan kepada yang lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak dapat diatasi dengan baik, tahapan ini sering kembali lagi menjadi situasi konflik.³⁶

Ada beberapa definisi yang mencoba mendeskripsikan bagaimana kondisi dari akhir suatu perang. Wallensteen dan Sollenberg menggunakan definisi minimal yakni tidak ada kekerasan bersenjata. Sebuah pandangan konvensional mengatakan bahwa akhir dari sebuah perang adalah ketika satu pihak atau pihak yang lain memperoleh kemenangan militer, atau ketika kedua belah pihak sepakat untuk menarik diri. Tetapi, yang lebih sering terjadi, konflik bersenjata gagal berlanjut tanpa kemenangan militer atau sebuah penyelesaian semata-mata karena

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

pihak-pihak yang bertikai tidak lagi menginginkan atau mampu melanjutkan pertempuran. Mungkin ada gencatan senjata tetapi pihak-pihak yang bertikai tetap tidak mampu mencapai kesepakatan.³⁷

Upaya untuk menyelesaikan masalah ini diusahakan baik dari pihak Israel maupun pihak Palestina. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan dalam upaya tersebut. Seperti apa yang dijelaskan dalam buku “Resolusi Damai Konflik Kontemporer” karya Hugh Miall mengenai dilema strategis dalam proses perdamaian. Hambatan bagi sebuah proses perdamaian hampir selalu berat. Pihak-pihak yang bertikai dalam konflik dengan kekerasan berkeinginan untuk menang, dan karenanya mereka terkunci dalam sebuah proses interaksi strategis yang membuat mereka secara sangat sensitif bagi prospek kalah dan menang. Setiap konsesi melibatkan landasan politik yang diabaikan, maka dari itu setiap penarikan dari posisi yang telah diduduki dalam waktu lama merupakan hambatan yang menyakitkan.³⁸

Jalan keluar yang diperlukan untuk dilema ini adalah dengan sepakat untuk bergerak bersama-sama ke arah pilihan penyelesaian damai dan karenanya mencapai sebuah pilihan dimana sebelumnya mereka masing-masing lebih menyukai konflik untuk dilanjutkan. Agar dapat melakukan hal ini, pihak-pihak yang bertikai harus menciptakan rasa saling percaya yang memadai, atau menjadikan bahwa mereka akan mendedikasikan diri mereka sendiri pada apa yang mereka janjikan. Bagi kedua belah pihak, ada resiko bahwa yang lain akan mengingkari kesepakatan yang pernah ada. Satu cara membuat komitmen bagi para pemimpin kedua belah pihak adalah dengan mengunci keberuntungan politik personal mereka dengan begitu kuatnya untuk satu pilihan di mana mereka tidak dapat melewati jalan yang lain tanpa lebih dahulu mengundurkan diri.³⁹

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Hugh Miall, *op. cit.*, hlm.280-283

³⁹ *Ibid.*,

2.3 Konsep Konservatisme

Dalam Kamus Politik B.N. Marbun, konservatisme diartikan sebagai paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata-pranata yang sudah ada serta menentang perubahan secara radikal.⁴⁰ Budi Suryadi mengatakan bahwa pada dasarnya, konservatisme tidak sepenuhnya menolak adanya suatu perubahan. Akan tetapi, perubahan tersebut haruslah dipertimbangkan dengan matang dan tidak berpengaruh pada status quo dan kestabilan politik.

Konservatisme tidak secara tegas diwujudkan dalam seperangkat doktrin. Konservatisme lebih merupakan sikap politik ketimbang filsafat atau gerakan. Istilah konservatisme itu secara tidak langsung menyatakan ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dahsyat, penghormatan terhadap pranata dan aturan yang telah mapan, dukungan terhadap elit dan serta hirarki serta ketidakpercayaan umum terhadap teori yang berlawanan dengannya. Semangat konservatisme menekankan pada asal-usul, tradisi dan pengalaman bersama, untuk memberikan landasan yang amat kuat bagi pembangunan dan kebebasan politik yang stabil.⁴¹

Budi Suryadi, mengutip pendapat Puntsch mengenai nilai-nilai konservatif. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah keteraturan, statu quo, keadilan, perlawanan terhadap kebebasan, keyakinan untuk mempertahankan keyakinan, memperkuat struktur dan berbasis pada legitimasi tradisional. Keteraturan merupakan akar konservatisme. Pengaturan masyarakat yang tradisional hirarkis dan struktur negara yang sesuai dengan mempertahankan hal-hal baik serta tidak begitu saja menerima hal-hal yang baru. Status quo atau adanya dominasi keinginan untuk mempertahankan keadaan yang ada. Keadilan diperlukan untuk mencapai keteraturan tersebut. Penguasa akan melakukan apapun, langkah-langkah yang harus bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Konservatisme menolak kebebasan karena kebebasan merupakan lawan dari keteraturan. Dalam konservatisme, keyakinan digunakan untuk mempertahankan sesuatu berdasarkan keyakinan dan menolak prinsip orang lain. Menurut konservatisme, memperkuat struktur agar negara lestari dan stabil serta memaksa individu lainnya menyesuaikan diri. Biasanya pemerintahannya bersifat otoriter dimana negara

⁴⁰ B. N. Marbun, *op., cit.*, hlm. 264.

⁴¹ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah Definisi, dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2007, hlm. 65.

berbasis pada legitimasi tradisional, mengontrol masyarakat dan membatasi kegiatan masyarakat.⁴²

Carlton Slymer Rodee mengatakan bahwa pada dasarnya, konservatif ingin melestarikan apa yang ada dan terpelihara status quo dengan sedikit perubahan.⁴³ Oleh karena itu, orang yang konservatif sangat enggan untuk memprakarsai perubahan. Khususnya lembaga-lembaga masyarakat yang telah lama berdiri-gereja, struktur sosial-ekonomi, dan lembaga-lembaga politiknya-harus diperhatikan dengan penuh rasa hormat, dan unsur-unsurnya yang kecil diubah, kalau semuanya harus dirubah, perubahan itu haruslah dilakukan dengan hari-hati. Suatu kebijakan baru haruslah melalui proses pertimbangan yang mendalam serta diskusi yang mendalam sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tetapi tidak mengubah sesuatu yang sudah ada. Menurut kaum konservatif, kebijakan umum yang baik adalah mencakup fungsi percobaan yang hati-hati, prosedur yang teratur lebih penting daripada akal sehat, serta penilaian yang didasari atas dasar prinsip-prinsip yang abstrak.⁴⁴

Kaum konservatif berpendapat bahwa apa yang terjadi di masa lalu pasti membawa sanksi moral di masa depan. Jadi kaum konservatif tidak terganggu oleh lemahnya argumentasi liberal klasik tentang hak-hak dasar dan milik pribadi. Bagi kaum konservatif, tidak ada hak-hak dasar, dan juga tidak ada hak mutlak dalam milik pribadi. Hakikat dari asas-asas ini, bagaimanapun, bisa mempunyai sanksi moral jika tradisi yang telah berlangsung lama telah melembagakan hak-hak kehidupan, kebebasan, dan pemilikan. Manakala pemilikan telah menjadi dasar organisasi sosial bagi warga negara secara turun menurun, maka tidak dibutuhkan lagi argumentasi abstrak seperti teori buruh tentang nilai. Waktu dan kelangsungan hidup adalah ujian utama bagi segala keabsahan setiap lembaga. Dan usaha melakukan pembenaran oleh akal murni untuk setiap lembaga atau praktek yang telah berlangsung lama berarti mengancam kredibilitas tradisi itu sendiri.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 66-67.

⁴³ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Press 1988, hlm 175

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 177.

⁴⁵ *Ibid.*,

Akan tetapi, konservatisme tidak menampik adanya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan merupakan suatu hukum alam yang pasti terjadi. Oleh karena itu, konservatisme harus bisa menyusun suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah perubahan tersebut dengan kebijakan yang tepat. Itulah sebabnya mengapa dalam demokrasi perwakilan, kaum konservatif sering menemukan dirinya sendiri pada pihak yang bertahan, terpaksa mengakui kenyataan bahwa mayoritas rakyat tidak selalu mengambil caranya.⁴⁶

2.4 Konsep Zionisme

Zionisme mulai digerakan secara terorganisir pada pertengahan abad ke 19. Mula-mula mereka memandang integrasi Yahudi di Eropa Tengah dan Barat sebagai suatu cita-cita yang ideal dan mereka menamakan gerakannya sebagai *Haskalah* atau suatu pencerahan. Cita-cita ini kemudian berkembang dengan mengintegrasikan cita-cita tersebut dan mulai menonjolkan identitas Yahudi mereka. Parets Smolensk dan Moshe Lilienblum adalah dua tokoh yang menjadi promotor dalam mempropagandakan nasionalisme Yahudi yang sekuler dan kolonisasi Palestina sebagai jalan paling efektif bagi kepentingan Yahudi di zaman modern.⁴⁷

Pada gilirannya Haskalah seperti tersebut di atas mendorong munculnya gerakan pecinta zion (*choveve zion*) yang dipimpin oleh Leo Pinsker (1821-1891). Para pendukung gerakan ini memperoleh inspirasi bahwa masa depan Yahudi akan lebih cerah bila kaum Yahudi melakukan emansipasi diri dengan jalan melakukan migrasi ke Palestina dan mendirikan koloni-koloni pertanian di sana. Dalam sejarah terbukti bahwa sejumlah kelompok kecil orang Yahudi memang pergi ke Palestina dan mengadakan pemukiman Zionis gelombang pertama.⁴⁸

Pada akhir abad 19 ideologi Zionisme dicoba dirumuskan oleh berbagai mazhab, yang pada garis besarnya dapat digolongkan menjadi tiga mazhab, yaitu Zionisme praktis, Zionisme politik dan Zionisme kultural. Zionisme praktis meneruskan tradisi Choveve Zion sambil menekankan bahwa pertanian kolektif

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Minal Aidin A. Rahiem, "Teori Zionisme dalam Masalah Palestina Suatu Tinjauan Historis", Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996, hlm. 6.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7

Yahudi di Palestina akan mempunyai dampak emansipasi terhadap masyarakat Yahudi dunia. Aron David Gordon (1856-1922) dapat dikatakan menjadi tokoh penting zionisme praktis dan bapak pendiri Mapai di Israel.⁴⁹

Sementara itu, Zionisme politik bercita-cita mendirikan sebuah negara Yahudi yang secara politik merdeka dan berdaulat walaupun tempat negara ini tidak harus di Palestina. Anggapan dasar di kalangan penganut Zionisme politik adalah bahwa emansipasi Yahudi di Eropa merupakan kemustahilan, sehingga mutlak diperlukan adanya suatu program politik menuju negara Yahudi yang berdaulat dan sekaligus sebagai solusi bagi *udeophobia* atau ketakutan kepada orang Yahudi di kalangan masyarakat Eropa. Tokoh-tokoh Zionisme politik ini antara lain adalah Leo Pinsker dari Eropa Timur dan Yahudi Hongaria yang sangat terkenal, Theodo Herzl (1860-1904). Herzl pada mulanya berpendirian bahwa negara Yahudi yang dicita-citakan tidak harus berada di Palestina, tetapi juga di Argentina, Cyprus, Sinai, dan Uganda, mengingat daerah ini masih kekurangan penduduk.⁵⁰

Zionisme kultural memiliki persamaan dengan Zionisme praktis dan Zionisme politik dalam hal orientasi sekulernya. Akan tetapi lebih menekankan pendekatan metafisik terhadap gagasan-gagasan Zionis. Para pendukung Zionisme kultural sangat mendambakan kebangkitan atau kelahiran kembali kultur Yahudi, penegasan identitas Yahudi yang murni dan bersih dari pengaruh asing dan kegiatan diaspora. Dalam pandangan mereka, proyek Palestina terutama dilihat bukan dari nilai politik atau ekonomi, melainkan sebagai pusat untuk mengembangkan budaya Yahudi. Ahad Ha'an merupakan salah satu tokoh Zionisme kultural yang beranggapan bahwa bangsa Yahudi merupakan bangsa pilihan yang memiliki serba superioritas dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Hal inilah, menurut Ha'an, Yahudi bukan hanya sebagai sebuah etnik tetapi Yahudi adalah *super-nation*. Sekalipun Zionisme kultural di atas permukaan tidak bersifat politik, namun dalam kenyataannya malahan mendorong aktivisme agresif di kalangan para pengikutnya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 7

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

Ketiga aliran Zionisme di atas akhirnya digabung menjadi suatu sintesa oleh Theodore Herzl yang meretakkan fondasi institusional Zionisme pada 1897. Herzl berhasil menggabungkan berbagai akar ideologi Zionisme ke dalam suatu sintesa yang memberi tempat dan klan Yahudi yang baru dan pandangan-pandangan pragmatik maupun metafisik yang mendasari pemikiran politik Eropa abad 19. Kongres Zionis yang dibentuk Herzl berfungsi sebagai forum demokratis dimana semua aspirasi dari berbagai mazhab bisa dibicarakan. Walaupun kongres Zionis secara formal bersifat demokratis, tetapi kepemimpinan Zionis sesungguhnya berwatak otoriter, mengingat kebijakan-kebijakan yang diambil ditentukan oleh para pemimpin Zionis secara sepihak. Tokoh-tokoh Zionis lainnya adalah Dr. Chaim Weizman. Weizman merupakan salah seorang pemimpin Zionis yang sempat menyaksikan berdirinya negara Israel.⁵²

Pemukiman Yahudi terus berlangsung sejak akhir abad 19 sampai berdirinya negara Israel pada tahun 1948 telah merampas tanah bangsa Arab Palestina dan menggusur serta mengusir bangsa ini ke berbagai negara tetangga dan menjadikan mereka berstatus “pengungsi”. Masalah Palestina ini menjadi akar konflik Arab Israel yang berkepanjangan dan pada gilirannya mempengaruhi stabilitas perdamaian dan keamanan, tidak saja di kawasan Timur Tengah, tetapi juga dunia internasional pada umumnya.⁵³

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 9-10.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengantar

McGaw dan Watson mengatakan bahwa sains adalah metode analisa yang objektif, logis dan sistemis untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena yang bisa diamati.⁵⁴ Hal ini berarti bahwa sains adalah suatu metode analisis, bukan suatu kumpulan pengetahuan. Sains adalah suatu aktivitas, suatu proses, dan bisa dibedakan dengan hasilnya. Mereka juga mengatakan bahwa tujuan akhir dari sains adalah deskripsi, eksplanasi, dan prediksi.

Karya tulis ilmiah ini merupakan suatu kajian mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya konflik antara Israel dan Palestina. Fokus penelitian dalam kajian ini adalah pengaruh konservatisme pemerintahan Likud terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Oleh karena itu, tujuan akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh dari konservatisme pemerintahan Likud terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Hal ini menyebabkan karya tulis ini bersifat deskriptif.

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik dengan melakukan riset kepustakaan (*library research*). Penelusuran penelitian ini dimulai sejak Partai Likud berkuasa di Israel pada tahun 1996 sampai tahun 2003. Hal ini berarti penelitian dalam karya tulis ilmiah ini akan terfokus pada pengkajian konflik Israel-Palestina pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sampai pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon. Penelitian ini memanfaatkan data-data referensi yang terdokumentasi seperti buku, thesis, skripsi, jurnal, makalah-makalah, surat kabar, dan *data online* dari situs terpercaya. Hasil yang didapat dari studi kepustakaan tersebut diolah untuk menghasilkan data-data yang akurat serta efektif dalam menjawab pokok permasalahan dalam karya tulis ini.⁵⁵

⁵⁴ Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. 1994. Hlm 67-68.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosda Karya, 1998, hlm. 3

3.2 Format Penelitian

Format penelitian dalam penelitian mengenai konflik antara Israel dan Palestina ini merupakan studi kasus (*case study*) yang memerlukan kajian secara intensif, mendalam, mendetail, serta komprehensif terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh pemerintahan Likud dalam proses perdamaian Israel-Palestina dalam rentang waktu tahun 1996 sampai 2003. Fokus penelitian ini diletakan pada penelaahan materi penelitian secara mendalam dari sudut teoritik yang diklarifikasikan dengan data-data referensi terkait.

Penelitian ini memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan konflik Israel-Palestina dalam rentang waktu 1996 sampai 2003. Kegiatan analisis dimulai dengan melihat bagaimana perkembangan konflik Israel-Palestina pada masa Partai Likud berkuasa, terutama dalam rentang waktu pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sampai Ariel Sharon. Perkembangan konflik tersebut, menunjukkan beberapa kecenderungan perilaku dan orientasi nilai dari Partai Likud dalam konflik ini.

Untuk memahami berbagai peristiwa tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami secara mendalam mengenai teori konflik dan teori konservatif. Pemahaman terhadap kedua teori ini akan memberikan sudut pandang yang jelas dan objektif mengenai fenomena yang sedang terjadi. Sudut pandang tersebut akan memberikan kerangka sistematis untuk melakukan kegiatan analisis. Fenomena yang sedang terjadi kemudian dapat dikaji lebih mendalam dan komprehensif.

Metode ini memberikan gambaran dalam setiap aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan materi penelitian dari berbagai referensi yang terkait dengan kasus. Gambaran tersebut akan mampu untuk dikaji secara spesifik dalam topik atau keadaan sosial tanpa mengabaikan keseluruhan permasalahan. Akan tetapi, metode ini memiliki beberapa kelemahan yaitu keterbatasan generalisasi melakukan dalam menelaah aspek-aspek spesifik serta memakan waktu yang lebih lama dibandingkan menggunakan metode lain seperti metode survei.⁵⁶

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

⁵⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 17-22.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak memakai sumber sekunder. Meskipun demikian, data referensi yang terkait dengan konflik Israel-Palestina dan partai Likud dapat dijangkau karena data-data mengenai konflik ini sudah dipublikasikan. Sumber sekunder merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan orang lain dengan maksud tertentu dan memiliki kategori klasifikasi berdasarkan keperluan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pencarian secara khusus untuk mendapatkan data-data referensi tersebut.

Bahan-bahan sekunder dipandang kalangan akademisi sebagai data yang dikumpulkan sendiri, karena itu diberi perlakuan dan pengelolaan yang seksama. Hal ini mengindikasikan bahwa data-data tersebut memerlukan proses seleksi, penggolongan, dan penyeleksi mengenai validasi dan realibilitasnya. Meski demikian, data-data tersebut dapat digunakan untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah atau memperoleh pengetahuan ilmiah yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Pada intinya, data tersebut juga dapat memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada. Signifikansi kegunaan data-data sekunder sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam memanfaatkan data-data tersebut bagi penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁷

3.4 Strategi Analisis Data

Strategi merupakan rencana yang cermat dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Strategi analisis data berarti suatu rencana yang cermat dalam melakukan penelitian sehingga mencapai kesimpulan yang tepat. Rencana ini dimulai dengan bagaimana mengolah data yang telah diperoleh menjadi data yang valid dan efektif untuk digunakan dalam kegiatan analisis. Data yang secara bertahap diperoleh diklasifikasi, disaring, digeneralisasi, dan kemudian ditarik konstruksi-konstruksi teoritisnya sehingga data tersebut memiliki makna untuk menjawab pokok masalah tersebut. Melalui proses tersebut, peneliti berusaha memahami, menyusun kategori-kategori, menginventarisasi karakteristik masing-masing kategori sehingga menjadi jelas perbedaan satu dengan yang lain. Pekerjaan semacam itu memakan waktu lama

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm.143-145.

dan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Rumusan yang dihasilkan pun tidak bisa dihasilkan sekali jadi. Jika pada fase tertentu diperoleh data yang tidak mendukung rumusan yang telah dihasilkan, terpaksa hasil sementara harus diubah atau diganti dengan yang lain. Proses ini akan berjalan sepanjang kegiatan penelitian sampai ditemukan rumusan yang tepat. Dalam proses seperti ini kegiatan pengumpulan dan analisis data senantiasa beranjak dari hasil pengumpulan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk mempertajam kepekaan, peneliti menempuh dua cara. Pertama, peneliti selalu memeriksa kembali hasil penelitian tentang topik serupa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kedua, melakukan penulisan bertahap atau membuat laporan bertahap. Laporan sementara tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai masalah yang sedang diteliti, terutama pembimbing. Laporan singkat tersebut selain dijadikan sebagai bahan diskusi terbatas juga disampaikan kepada beberapa pihak yang dianggap menguasai bidang ini dengan tujuan memperoleh umpan balik sebagai bahan perbaikan maupun penajaman beberapa aspek yang dianggap penting.

Kegiatan selanjutnya adalah merekonstruksi data mentah dari bentuk awalnya menjadi bentuk yang dapat memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang diamati. Beberapa tingkatan kegiatan yang perlu dilakukan dalam fase ini meliputi antara lain pemeriksaan data mentah secara lebih teliti lagi, membuatnya dalam bentuk kronologi. Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan di dalam fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan hubungan-hubungan dalam fenomena lain yang terkait namun berada di luar bidang penelitian.

Sementara untuk memperoleh dan memahami kesimpulan yang valid tentang realitas konflik Palestina-Israel, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan hermeneutik dan analisis isi terhadap dokumen-dokumen dan sejumlah teks tentang konflik Israel-Palestina. Dengan memakai pendekatan hermeneutik, peneliti bermaksud melakukan penafsiran

terhadap teks dengan tujuan teks tersebut dapat dipahami secara utuh dan objektif.⁵⁸

Lewat kegiatan analisis seperti itu dapat diperoleh pemahaman yang dirasa memadai baik dari sisi kedalaman maupun reliabilitasnya, karena telah didukung data yang memadai. Pada sisi lain, menggunakan metode analisis isi teks yang terdapat dalam data yang tersedia dimaksudkan untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dari kebenaran data dengan memperhatikan relevansi konteksnya. Pada akhirnya, berdasarkan analisis dan penafsiran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang mampu menjawab pokok permasalahan.⁵⁹

3.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini adaterbagi dalam enam bab. Bab 1 berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, serta metode operasional konsep. Bab 2 dalah tempat penulis untuk mengeksplorasi teori-teori yang akan digunakan dalam kegiatan analisa. Bab ini berusaha untuk mengeksplorasi konsep konflik serta tahapan-tahapannya, konsep konservatisme, dan konsep zionisme. Kemudian, skripsi ini dilanjutkan dengan mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Metode penelitian ditempatkan di Bab 3. Bab pembahasan selanjutnya adalah Bab 4 yang berjudul “Konflik Israel Palestina Pada Masa Pemerintahan Likud 1996-2003”. Setelah mendeskripsikan metode penelitian, skripsi ini akan mendeskripsikan mengenai konflik Israel-Palestina. Mulai dari sejarah, latar belakang konflik, sampai perjalan konflik sampai tahun 2003. Pada bab ini pula, bentuk-bentuk konserfatisme Israel akan dideskripsikan. Setelah mendeskripsikan fenomena atau kasus yang terjadi, kegiatan analisis dimulai dan ditempatkan di Bab 5 dengan judul “Analisis Pengaruh Konservatisme Pemerintahan Likud Terhadap Konflik Israel Palestina”. Setelah melakukan analisis, Bab 6 Kesimpulan adalah kegiatan terakhir adalah menarik kesimpulan dari keterkaitan bab-bab terdahulu dengan dibantu dengan konsep-konsep sebagai *analizing tools*.

⁵⁸ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 23.

⁵⁹ Zis Muzahid, *Konflik Timur Tengah Sebagai Strategi untuk Mengukuhkan Eksistensi Israel (Studi Kasus Konflik dan Proses Perdamaian Palestina-Israel)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003, hlm.26

BAB IV
KONFLIK ISRAEL-PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN
LIKUD 1996-2003

4.1 Sejarah dan Perkembangan Konflik Israel-Palestina

Eksistensi bangsa Israel dapat dilihat beriringan dengan perkembangan peradaban agama Yahudi. Jika dilihat dari sejarah, Yahudi berpangkal pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki dua orang putera bernama Ishak dan Ismail. Ishak merupakan keturunan dari istri pertama yaitu Sarah, sedangkan Ismail adalah anak dari istri kedua yaitu Hajar. Ishak dan Ismail menurunkan dua bangsa yang berbeda yaitu bangsa Israel, keturunan Ishak dan bangsa Arab dari keturunan Ismail.⁶⁰ Bani Israel adalah bangsa keturunan Nabi Yakub, yang merupakan anak dari Nabi Ishak. Nabi Yakub mempunyai 12 putera laki-laki, yang kemudian akan menjadi asal-usul suku-suku Bani Israel. Oleh karena itu, keberadaan Bani Israel di Timur Tengah tidak terlepas dari kedatangan Nabi Ibrahim ke Kana'an atau Palestina.⁶¹

Bani Israel meninggalkan Mesir pada tahun 1234 SM menuju Palestina. Sebelum sampai di Palestina, Nabi Musa meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal, Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israil untuk memasuki Palestina, karena Tanah Suci itu telah ditentukan Tuhan untuk menjadi tempat kediaman Bani Israel. Bani Israel sampai ke bumi Kana'an dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu sekitar 40 tahun.⁶² Mereka memasuki Kana'an dari arah Timur, lewat Syarqul Urdun atau Trans-Yordania dan berhasil merebut daerah-

⁶⁰ Nabi Ishak, memiliki anak yaitu Yakub, yang juga merupakan seorang Nabi. Sebelum kedatangan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, hampir semua Nabi, dari Nabi Yakub sampai dengan Isa, merupakan keturunan Ishak atau Bani Israel. Keturunan Ismail yang menjadi rasul hanyalah Nabi Muhammad. Mereka (keturunan Ibrahim) adalah penganut agama Tauhid atau monoteisme, dengan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Anton A. Ramdan, *Rahasia Bisnis Yahudi*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2009., hlm. 17-18.

⁶¹ Penduduk Kana'an (Palestina) berasal dari suku Amaliqah. Mereka telah bermukim di Kana'an sejak lama yaitu sekitar tahun 2500 SM. Mukhtar Yahya, *Perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1985, hlm. 44.

⁶² Dalam masa 40 tahun, angkatan tua bani Israel yang ikut hijrah bersama Nabi Musa dari Mesir habis dan yang tersisa hanyalah dua orang yaitu Yusya' Bin Nun dan Kalib Bin Yofanna. Kemudian setelah angkatan itu habis, muncullah generasi muda yang mempunyai semangat kemerdekaan dan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka inilah yang berani memasuki Palestina untuk merebut tanah Palestina dari bangsa Kana'an. *Ibid.*, hlm 54.

daerah Edom, Moab, dan seluruh Syarqul Urdun. Akan tetapi, setelah Syarqul Urdun dikuasai Nabi Musa wafat, yaitu sekitar tahun 1194 SM.⁶³ Kemudian, kedudukan Nabi Musa digantikan oleh Yusya' Bin Nun. Di bawah kepemimpinan Yusya' Bani Israel akhirnya dapat memasuki Palestina dan berhasil merebut seluruh bumi Kana'an dari Selatan sampai Utara.⁶⁴

Puncak kerajaan Bani Israel berada pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman (961-922 SM). Dalam masa pemerintahan ini, kerajaan berada dalam kemakmuran dan tidak ada pemberontakan yang terjadi. Hubungan dengan negara-negara tetangganya juga sangat baik. Bahkan Fir'aun Mesir pada saat itu sangat mengagumi sosok Sulaiman dan bahkan mengawinkan seorang puterinya dengan Nabi Sulaiman. Sulaiman juga membuat hubungan perniagaan yang baik dan menguntungkan dengan raja Hiram atau Tyrus di Phunicia dengan memanfaatkan letak geografis Palestina.⁶⁵

Hubungan baik antara Sulaiman dengan raja-raja di sekitarnya dan adanya perniagaan yang luas itu telah membuat Sulaiman menjadi kaya raya sehingga dia dapat melakukan pembangunan kerajaan Israel dengan pesat. Pembangunan Haikal Sulaiman dapat berlangsung dengan baik sampai akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu 7 ½ tahun. Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaan dibangun dengan pagar dan tembok yang kokoh serta bala tentara yang kuat sebagai pertahanan negara. Selain itu, Nabi Sulaiman juga membangun kota-kota dan desa-desa untuk menghindari kepadatan penduduk di Yerusalem.⁶⁶ Setelah memerintah kerajaan Israel selama 39 tahun, Nabi Sulaiman wafat. Meninggalnya Raja Bijaksana ini juga mengakhiri kesatuan kerajaan Bani Israel.

⁶³ Nabi Musa belum sempat memasuki Palestina. Akan tetapi, Allah SWT telah memberinya kesempatan untuk menikmati panorama tanah suci yang dijanjikan Tuhan untuk Bani Israil yaitu pemandangan dari puncak gunung Nebo di Pegunungan Abarim yang terletak di tanah Moab, di Syarqul Urdun.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

⁶⁵ Dalam perjanjian itu, Sulaiman mengirimkan armada lautnya yang membawa perdagangan bersama armada laut Raja Hiram dari pantai Timur Lautan Tengah sampai ke Spanyol di pantai Barat.

⁶⁶ Sulaiman merupakan seorang nabi dan raja yang bijaksana dan berhasil dalam pemerintahannya. Keberhasilan Nabi Sulaiman tidak terlepas dari kepatuhannya menjalankan seluruh amanah dari ayahnya, Nabi Daud. Kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan membuat Nabi Sulaiman mendapat penghormatan "*Sulaiman Al Hakim*" (Sulaiman yang bijaksana).

Setelah Sulaiman meninggal Kerajaan Israel terpecah menjadi dua yaitu di Kerajaan Israel di Utara dan Yahuda di Selatan.

Kemunduran bangsa Israel terjadi ketika pemerintahan Nabi Sulaiman berakhir. Kerajaan Israel terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Israel di utara dengan pusatnya di kota Samaria dan Kerajaan Yahuda di bagian selatan dengan pusatnya di Yerusalem. Setelah kerajaan ini dibagi menjadi dua, keyakinan bangsa Israel mulai melemah. Hal inilah yang menjadi faktor kemunduran Kerajaan Bani Israel. Kemudian bangsa ini mulai ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain seperti bangsa Assyria dan Babilonia.

Akibat dari penaklukan ini, sebagian besar bangsa Israel berpencar ke berbagai belahan dunia. Akan tetapi, sekitar pada tahun 539 SM, Raja Persia Cyrus Agung mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka yaitu Yerusalem. Namun, banyak di antara mereka yang tidak kembali ke kampung halaman dan tetap tinggal di daerah perantauan masing-masing.⁶⁷

Pada tahun 63 SM, kerajaan Romawi berhasil menaklukkan wilayah Palestina, tempat di mana kerajaan Israel pernah berjaya. Kehancuran secara *de facto* Kerajaan Israel menyebabkan kerajaan Israel terhapus dari percaturan kekuasaan dunia.⁶⁸ Kehancuran inilah yang kemudian menjadi titik tolak terjadinya diaspora bangsa Israel ke seluruh penjuru dunia.

Diaspora Yahudi dalam bahasa Ibrani berarti *tefutzah* yang berarti “tersebar”. Akan tetapi, diaspora juga diartikan dengan kata *galut* yang berarti “pembuangan”. Oleh karena itu diaspora adalah penyebaran orang-orang Yahudi ke seluruh dunia. Secara umum pengertian diaspora dianggap telah dimulai dengan pengusiran orang-orang Yahudi pada 597 SM.⁶⁹ Kekalahan orang-orang Yahudi pada pemberontakan besar Yahudi pada tahun 70 M dan pemberontakan Bar Khoba pada tahun 135 M dalam menghadapi kekaisaran Romawi merupakan

⁶⁷ Jika diperhatikan bangsa Israel yang dibebaskan oleh Cyrus Agung adalah bangsa Israel dari Kerajaan Yahuda di Palestina Selatan. Kerajaan Israel di selatan memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan Kerajaan Israel di utara. Setelah kerajaan utara hancur banyak bangsa Israel yang pindah ke Israel selatan dan ikut menyebar ke segala penjuru dunia setelah kerajaan selatan hancur.

⁶⁸ Mungkin hal ini yang menyebabkan penggunaan kata Israel semakin pudar dan tergantikan dengan kata Yahudi sesuai dengan keyakinan agama mereka yaitu Yahudi. Anton A. Ramdan, *op. cit.*, hlm. 21.

⁶⁹ Pada waktu itu terdapat sebuah pusat kehidupan Torah dan Yudaisme yang terbentuk oleh komunitas Yahudi Timur Tengah .

salah satu faktor penting yang menyebabkan besarnya bangsa Yahudi yang melakukan diaspora. Mereka terpecah belah dan hidup terpisah di berbagai daerah. Pada fase “*great diaspora*” pada masa Titus tahun 70 M sampai pada masa Hadrianus tahun 132 M, umat Yahudi diusir dan dibuang ke berbagai wilayah yang tidak memiliki tanah air. Mereka banyak melarikan diri dan pindah ke Hijaz, diantaranya Bani Qainuqa’, Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, yang merupakan suku-suku Arab, untuk menyelamatkan diri dari keganasan penguasa Romawi.⁷⁰

Dalam fase diaspora, bangsa Yahudi seringkali dikatakan sebagai bangsa yang memiliki tingkat eksklusivisme Yahudi yang tinggi. Sikap eksklusif ini sering menimbulkan konflik dengan komunitas lain dan memicu kebencian suku-suku Arab pada bangsa Yahudi. Selain itu, orang-orang Yahudi juga berusaha memecah belah suku-suku Arab dengan cara mengadu domba mereka sehingga terjadi pertempuran antara suku Aus dan Khazraj. Permusuhan ini berlangsung sampai Islam lahir di Jazirah Arab.⁷¹

Setelah kekuasaan Kerajaan Israel di Palestina berakhir, daerah Palestina menjadi kekuasaan imperium yang berkuasa sampai bangsa Arab datang dan menguasainya pada tahun 641 M.⁷² Kehadiran bangsa Arab secara cepat diterima dan berbaur dengan kehidupan masyarakat setempat. Banyak diantara mereka yang kemudian melangsungkan pernikahan dengan penduduk Palestina. Pada masa inilah orang-orang Palestina mengalami proses Arabisasi, baik secara etnis maupun kultur, serta sebagian besar kemudian memeluk agama Islam. Bangsa Arab berhasil membangun suatu kehidupan masyarakat madani dengan menjadi Palestina sebagai tempat terbuka bagi berbagai suku termasuk Yahudi.

Dalam berbagai dinamika politik yang terjadi di dunia Arab, Palestina menjadi tempat yang penting dan menjadi kepentingan dalam setiap ekspansi yang dilakukan baik oleh bangsa Arab maupun bangsa Eropa. Perang Salib pada abad ke-11 berhasil membuat bangsa Eropa merebut Palestina dari kekuasaan

⁷⁰ Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005, hlm 69.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 72-73.

⁷² Palestina dikuasai oleh bangsa Arab ditangan Khalifah Umar Bin Khattab yang berhasil merebutnya dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Khalifah Umar menerima penyerahan kota Jerusalem yang sebelumnya beragama Kristen dan mengikat perjanjian damai, yaitu semua penganut agam bebas melaksanakan ibadahnya di kota suci Jerusalem. *Ibid.*, hlm 73.

bangsa Saljuk. Pasukan Perang Salib kemudian mengeksekusi dan mengusir orang-orang Arab dan bangsa lainnya yang hidup di daerah tersebut. Bangsa Eropa menjadikan Jerusalem sebagai pusat agama Nasrani dan bagian dari wilayah keuskupan Eropa.⁷³

Kekuasaan bangsa Eropa terus berlangsung sampai Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem dan wilayah Palestina pada tahun 1187 M. Kekuasaan di Palestina berpindah ketika Dinasti Mamluk menguasai Kota Yerusalem pada sekitar abad ke-13 hingga ke-16. Di bawah kekuasaan Dinasti Mamluk, Yerusalem dijadikan sebagai pusat keagamaan dan Palestina berkembang menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam.⁷⁴ Pada tahun 1517 M, Palestina dan kota Yerusalem jatuh ke tangan Turki Utsmani. Pada masa kekuasaan Turki Utsmani, Palestina mengalami kemajuan pesat. Pada masa pemerintahan Mohammad Ali, Palestina memiliki persenjataan yang modern dan tangguh. Ali juga mengadakan modernisasi disegala bidang seperti pertanian, perekonomian, dan melakukan industrialisasi. Pada masa pemerintahan Mohammad Ali, banyak orang Yahudi yang kembali datang dan menetap di Palestina. Populasi Yahudi terus bertambah, terutama setelah bencana gempa bumi yang menghancurkan pemukiman Yahudi di Galilea pada tahun 1837.

Pada awal abad 20, Imperium Turki Utsmani mengalami kemunduran. Pemerintahan yang lemah, perpecahan internal, serta persaingan negara-negara besar Eropa dalam melakukan ekspansi telah membawa imperium Turki Utsmani kepada kehancuran. Kegagalan yang terjadi, baik dalam pertempuran fisik maupun diplomasi, mulai dialami oleh Turki. Selama masa tahun 1912-1913, Turki Utsmani telah banyak kehilangan wilayah kekuasaan di Eropa. Selain itu, nasionalisme bangsa Arab juga ikut mengambil peran dari pengurangan wilayah kekuasaan Imperium Turki Utsmani. Antara tahun 1912 sampai 1920, Turki Utsmani telah kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya di Balkan. Negara-negara baru bermunculan, seperti Lebanon, Syria, Palestina, Yordania, dan Irak. Mesir memperoleh kemerdekaan penuh dari Turki oleh Pemerintahan Mandat Inggris. Tahun 1914, Turki Utsmani terseret dalam Perang Dunia I. Turki yang

⁷³ *Ibid.*, hlm 89.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 112.

kerika itu bersekutu dengan Jerman, harus menghadapi kekuatan negara-negara Eropa. Perang Dunia I telah mengakhiri kelangsungan Imperium Turki Utsmani.⁷⁵

Pada tanggal 24 April 1920, dalam konferensi perdamaian di San Remo, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Mandat Inggris. Pada tanggal 1 Juli 1920, pemerintahan militer digantikan dengan pemerintahan sipil. Pada tanggal 23 September 1922, Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Pemerintahan Mandat Inggris atas wilayah Palestina. Sejak itu dimulailah babak baru dalam sejarah Palestina, yaitu persengketaan antara bangsa Palestina dan bangsa Yahudi atas wilayah Palestina.

Konflik Israel-Palestina berawal dari terbentuknya negara Israel di Palestina. Peristiwa ini sangat terkait dengan keikutsertaan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I. Akhir dari perang ini merupakan titik awal berkembangnya konflik antara kelompok Yahudi dan Arab menjadi konflik yang berskala luas. Setelah Perang Dunia I, Palestina jatuh ke tangan pemerintahan kolonial Inggris. Sebelum Perang Dunia I berakhir, pemerintah Inggris menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Arab jika mereka bersedia melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Turki Usmani.⁷⁶ Akan tetapi, strategi Inggris untuk mengalahkan Jerman pada Perang Dunia I ini, bukan hanya melibatkan bangsa-bangsa Arab, tetapi juga memanfaatkan bantuan dari orang-orang Yahudi. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Zionis seperti Dr. Chaim Weizman. Proses *bargain* antara Inggris dan bangsa Yahudi inilah yang menjadi cikal bakal realisasi pembentukan negara Israel dimulai.

Dalam negosiasi dengan pemerintah Inggris, Weizman mengatakan bahwa orang-orang Yahudi khususnya yang ada di Eropa dan Amerika bersedia membantu pembentukan negara Yahudi di Palestina. Kesediaan Inggris dinyatakan dalam surat yang dikirim oleh Lord Balfour, Menteri Luar Negrei Inggris, kepada Presiden Kehormatan Federasi Zionis untuk wilayah Inggris dan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

⁷⁶ Janji Inggris tersebut secara implisit dinyatakan dalam korespondensi antara Sir Henry McMahon, Komisioner Tinggi Inggris di Mesir dan Syarif Hussein, penguasa Mekkah pada tahun 1915. Pemberontakan ini dimaksudkan untuk memperlemah kekuatan Turki Utsmani yang dalam perang tersebut berada pada blok yang berbedda dengan Inggris. Pada Perang Dunia I (1914-1918), Turki Usmani bergabung dalam kelompok *Central Forces* bersama dengan Jerman. *Central Forces* harus berhadapan dengan kelompok Sekutu (*Allied Forces*) yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, dan Italia.

Irlandia, yaitu Rothchild. Pernyataan Lord Balfour tersebut dikenal juga sebagai deklarasi Balfour yang oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai dasar hukum yang kuat untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Deklarasi ini memperoleh dukungan dari negara-negara lain seperti Perancis, Italia, dan Amerika Serikat.⁷⁷ Perang Dunia berakhir dengan kemenangan sekutu dimana Inggris termasuk di dalamnya. Janji Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada negara-negara Arab ternyata tidak terealisasi. Inggris bersama Perancis membagi wilayah-wilayah Arab untuk mereka jadikan negara proktetorat. Akan tetapi, Inggris memenuhi janjinya kepada bangsa Yahudi untuk memberikan Palestina kepada bangsa Yahudi.

Perjanjian San Remo pada tahun 1920, merupakan suatu kesepakatan antara Inggris dan Prancis untuk membagi mandat atas wilayah Timur Tengah bekas propinsi Kesultanan Turki Usmani. Suriah dan Lebanon berada di bawah mandat Prancis, sedangkan Irak dan Palestina termasuk Yordania berada di bawah mandat Inggris. Wilayah Hijaz dijadikan sebagai wilayah yang merdeka.

Pemberian mandat Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris pada bulan Juli 1922. Di bawah mandat Inggris, *alijah* kembali terjadi. Gelombang *alijah* terbesar terjadi sepanjang tahun 1932-1938. Munculnya Nazisme di Jerman yang anti Yahudi yang kemudian melakukan ekspansi ke Eropa Tengah dan Timur, menyebabkan orang-orang Yahudi secara besar-besaran keluar dari negara asalnya seperti Jerman, Austria, Chekoslovakia, Hongaria, Polandia, dan Yunani. Total orang Yahudi yang masuk ke Palestina selama periode 1932-1938 berjumlah 217.000 orang.⁷⁸

Migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ini telah memicu kemarahan bangsa Arab. Hal ini karena tujuan dari migrasi ini adalah membangun sebuah *home land* atau tanah air bagi bangsa Yahudi. Kenyataan inilah yang kemudian membangkitkan rasa permusuhan antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi. Orang-orang Arab Palestina juga semakin menunjukkan rasa permusuhannya kepada orang-orang Yahudi. Beberapa kali terjadi konflik komunal antara

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 27.

⁷⁸ Sebagian besar adalah keluarga kelas menengah, berpendidikan, dan merupakan para profesional termasuk profesional di bidang bisnis. Sebagian besar dari mereka datang ke Palestina dengan membawa uang yang cukup besar. *Ibid.*, hlm. 30.

kelompok Arab dan kelompok Yahudi. Kelompok komunal yang cukup besar terjadi pada bulan April 1920 dan pada tahun 1929 (*wailing wall incident*). Kedua konflik komunal ini banyak memakan korban di kedua belah pihak.⁷⁹

Peristiwa migrasi bangsa Yahudi ke Palestina disebut dengan *aliyah*.⁸⁰ Jika *diaspora* dianggap sebagai penyebaran bangsa Yahudi ke seluruh dunia dan membentuk komunitas-komunitas Yahudi yang berbeda-beda sesuai dengan regionalnya, maka peristiwa *aliyah* adalah sebuah peristiwa yang berusaha menyatukan komunitas-komunitas tersebut dalam satu negara, yaitu Israel. Banyak orang Yahudi yang menganggap bahwa peristiwa *aliyah* adalah kepulangan ke tanah yang sudah dijanjikan kepada para keturunan leluhur Ibrani, Abraham, Ishak, dan Yakub. Minal Aidin menganggap peristiwa *aliyah* bukan saja hanya konsep budaya, tetapi juga sebagai diskursus politis Yahudi yang mendasar dari Zionisme. Oleh karena itu, konsep ini ditempatkan dalam “Undang-Undang Kepulangan ke Israel”. Undang-undang ini memberikan hak bagi semua bangsa Yahudi untuk mendapatkan bantuan bermigrasi dan menetap di Israel, bahkan secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Israel.⁸¹

Dalam diskursus kaum Zionis, istilah *aliyah* mencakup baik migrasi sukarela karena alasan-alasan ideologis, emosional, atau praktis dan sebaliknya pengungsian massal dari populasi orang Yahudi yang teraniaya. Kebanyakan orang Yahudi Israel di masa kini menelusuri akar-akar keluarganya ke luar negaranya. Sementara banyak yang secara aktif memilih untuk menetap di Israel ketimbang di suatu negara lainnya. Selain itu banyak pula yang memiliki sedikit saja atau bahkan tidak punya sama sekali pilihan untuk meninggalkan negara asal mereka. Oleh karena itu, Israel umumnya diakui sebagai sebuah “negara imigran” atau negara pengungsi.⁸²

Setelah diadakannya kongres Zion di Basel, upaya-upaya dan langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara Yahudi di Palestina semakin terorganisasi dan solid. Berkat bantuan kelompok-kelompok Zionisme

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 28.

⁸⁰ Seorang Yahudi yang melakukan aliyah disebut *oleh* (laki-laki tunggal) atau *olah* (wanita tunggal), bentuk pluralnya adalah *olim*.

⁸¹ Minal Aidin Rahiem, “Persaingan Komunitas Etnis Yahudi Ashkenazi dengan Sephardi”, *Jurnal Arabia*, Vol.9, Nomor 18/Oktober 2006-2007, hlm. 57.

⁸² *Ibid.*, hlm. 57.

yang banyak muncul setelah kongres salah satunya *the Jewish National Fund*, orang-orang Yahudi *diaspora* secara bergelombang mulai bermigrasi ke Palestina. Selama Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Ustmani, terjadi dua kali *alياهو*. Total jumlah orang Yahudi yang masuk ke Palestina selama dua kali *alياهو* tersebut kurang lebih 70.000 orang.⁸³

Di wilayah yang baru ini, para *alياهو* ini kemudian membuat komunitasnya sendiri-sendiri dengan membentuk *kibbutz* (komunitas pertanian). Dengan kerja keras yang tinggi, *kibbutz* ini akhirnya dapat menjadi suatu entitas ekonomi yang berkembang di Palestina. Namun *kibbutz* ini cukup eksklusif karena tidak bersedia mempekerjakan orang-orang Arab. Kondisi ini turut memberikan kontribusi pada menyemainya konflik diantara suku Yahudi dan Arab.⁸⁴

Sebagai respon atas kebijakan Inggris yang telah memberikan kebebasan bagi peristiwa *alياهو* bangsa Yahudi, bangsa Arab mulai melakukan perlawanan. Dinnosius menceritakan bahwa awal gerakan perlawanan tersebut dilakukan dengan cara-cara non kekerasan, namun memasuki tahun 1930-an, gerakan perlawanan dengan cara-cara kekerasan mulai dilakukan. Pada tahun 1936, orang-orang Arab Palestina melakukan mogok massal yang berlangsung selama enam bulan. Mogok massal ini kemudian diikuti oleh aksi pemberontakan di daerah-daerah pinggiran yang berlangsung selama dua tahun. Aksi pemberontakan ini dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Arab termasuk para pedagang dan profesional. Para elit Arab kemudian membentuk Komite Tinggi Arab (*Arab Higher Committee*) yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi orang-orang Arab kepada Inggris.⁸⁵

Pemerintah Inggris menjawab aksi-aksi pemberontakan ini dengan tindakan tegas. Inggris melarang keberadaan Komite Tinggi Arab pada tahun 1937 yang menang selama ini tidak diakui oleh Inggris. Inggris juga melakukan penangkapan terhadap anggota-anggota Komite Tinggi Arab. Untuk menghindari

⁸³ Dionnisius Elvan Swasono, "Kebijakan Luar Negeri Israel Mengenai Penyelesaian Konflik Israel-Palestina pada Masa Pemerintahan Yitzhak Rabin (1992-1995)", Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 25.

⁸⁴ Hemawati, *op., cit.*, hlm. 96

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

penangkapan ini, banyak anggota komite yang mengasingkan diri ke wilayah lain di sekitarnya. Tindakan-tindakan tegas Inggris tersebut menyebabkan aksi-aksi pemberontakan tidak lagi memiliki kepemimpinan yang efektif.⁸⁶

Untuk mengatasi kekisruhan di Palestina, pada waktu itu Inggris mulai mencari jalan penyelesaian. Pada bulan Juli 1937, pemerintahan Inggris membentuk komisi khusus untuk melakukan riset terhadap masyarakat Palestina. *Peel Commission* ini ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk mengadakan penelitian terhadap masyarakat yang tinggal di Palestina, baik bangsa Arab maupun Yahudi. Dari hasil penelitian tersebut, *Peel Commission* merekomendasikan pembagian wilayah Palestina yaitu, 30% wilayah Palestina dialokasikan untuk negara Yahudi. Yerusalem tetap berada di bawah kontrol Inggris. Sisa wilayah Palestina yang digabung ke dalam wilayah Trans-Jordania diberikan kepada bangsa Arab.⁸⁷

Bangsa Arab Palestina merasa dirugikan oleh rekomendasi ini. Mereka kemudian menolak usulan *Peel Commission* ini. Alasannya, usulan pembagian tersebut mengabaikan kemerdekaan bangsa Arab Palestina atas seluruh wilayah Palestina dan akan mengusir orang-orang Arab Palestina yang sudah lama tinggal di wilayah yang akan menjadi wilayah negara Yahudi.⁸⁸

Dionnisius menceritakan respon Inggris terhadap penolakan rekomendasi tersebut. Pada bulan Mei 1939, Inggris menyampaikan usulan baru yang cukup berbeda dari rekomendasi *Peel Commission*. Dalam usulan tersebut Inggris akan membatasi masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina, hanya 15.000 orang setiap tahunnya hingga tahun 1944. Penambahan jumlah imigran dapat dilakukan tetapi harus dengan persetujuan orang-orang Arab. Dalam usulan tersebut Inggris juga melarang pembelian tanah oleh orang-orang Yahudi. Inggris juga mengusulkan membentuk sebuah negara dimana kelompok Arab dan Yahudi nantinya akan berbagi kekuasaan, usulan ini tertuang dalam *white paper* tahun 1939 yang dikeluarkan oleh Inggris dengan maksud untuk menarik simpati kelompok Arab sehingga kelompok Arab bersedia membantu Inggris dalam perang menghadapi Jerman pada Perang Dunia II. Usulan ini ditolak baik oleh orang-orang Arab

⁸⁶ Dionnisius, *op., cit.*, hlm. 29.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

maupun Yahudi. Meskipun orang-orang Arab nantinya akan tetap menjadi mayoritas di negara tersebut, namun kelompok Arab khawatir negara tersebut tidak akan dapat bertahan lama mengingat tingginya rasa nasionalisme di kalangan kedua kelompok bangsa tersebut. Sedangkan bagi orang Yahudi, menjadi satu negara dengan bangsa Arab akan melencengkan cita-cita mereka untuk membentuk sebuah negara Yahudi.⁸⁹

Untuk membuat Inggris tetap konsisten dengan janjinya terhadap pembentukan the *Jewish National Home in Palestine*, orang-orang Yahudi terus melakukan tekanan-tekanan. Aksi-aksi teror pun dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menekan Inggris seperti yang dilakukan oleh kelompok paramiliter Irgun Tzvei Leumi yang dipimpin oleh Vladimir Jabotinsky dan Stren Gang yang dipimpin oleh Menachem Begin. Kedua kelompok ini meledakan bangunan-bangunan dan instalasi Inggris di Palestina yang menyebabkan instabilitas keamanan di Palestina.⁹⁰

Tekanan-tekanan yang datang baik dari kelompok Arab maupun Yahudi, membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengintervensi masalah Palestina tersebut pada tahun 1947. Kemudian, pada bulan November 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang menyerukan rencana pembagian Palestina. Dalam rencana pembagian tersebut diputuskan bahwa 55% wilayah Palestina akan dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan 40% dikuasai oleh kelompok Arab. Yerusalem dan Betlehem berada di bawah pengawasan PBB dan ditetapkan sebagai zona internasional. Wilayah-wilayah yang akan dikuasai oleh kelompok Yahudi meliputi Jaffa, daerah pantai dari Haifa ke selatan Jaffa dan sebagian besar daerah Negev. Sedangkan wilayah Palestina yang dikuasai oleh kelompok Arab meliputi bagian tengah dan timur Palestina, dari lembah Esdradon sampai ke Beersheba, Galilee Barat, dan tanah membujur dari pantai Laut Tengah di Gaza ke selatan dan sepanjang perbatasan Mesir ke Laut Merah.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm 34.

⁹¹ Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Luar Negeri RI, *Masalah Palestina Sejak Tahun 1977 Sampai Sekarang*, Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1986, hlm. 32.

Orang-orang Arab Palestina menolak rencana pembagian ini dan bertekad untuk mempertahankan wilayah Palestina secara utuh. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, meskipun mereka tidak begitu puas, kelompok Yahudi menerima rencana pembagian ini. Tepat pada saat pasukan terakhir Inggris meninggalkan Palestina pada tanggal 14 Mei 1948, kelompok Yahudi memproklamasikan kemerdekaan negaranya yang diberi nama Israel.

Tidak lama setelah Israel memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara Arab yang berada di sekitar Palestina yaitu Mesir, Yordan, Irak, Syria, dan Lebanon melancarkan serangan gabungan ke Israel dengan maksud untuk menghancurkan negara Yahudi yang baru terbentuk tersebut. Serangan ini dilakukan karena negara-negara Arab itu menganggap masalah Palestina adalah masalah bersama bangsa Arab.⁹² Meskipun mendapat serangan yang bertubi-tubi dari kelima negara Arab tersebut, Israel berhasil mempertahankan diri bahkan memukul mundur tentara gabungan Arab. Perang ini berhenti pada bulan Januari 1949 berkat mediasi PBB. Mesir bersedia menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Israel sebulan setelah perang berhenti. Langkah perjanjian Mesir ini diikuti oleh negara-negara Arab yang lain. Lebanon menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Israel pada bulan Maret 1949, Yordania pada bulan April 1949, dan Syria pada bulan Juli 1949. Irak menolak menandatangani perjanjian gencatan senjata dan hanya menarik pasukannya dari Palestina.⁹³

Setelah perang usai, Israel memperoleh wilayah tambahan sebesar 30% lebih banyak dari wilayah yang ditentukan dalam rencana pembagian. Wilayah tambahan tersebut termasuk Galilea Barat dan sebagian Palestina tengah. Tidak hanya Israel, Yordania pun memperoleh tambahan wilayah setelah perang yaitu Tepi Barat serta Mesir yang menguasai Jalur Gaza. Penguasaan Yerusalem terbagi dua, Yerusalem Barat dikuasai oleh Israel dan Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Meskipun Israel menang dalam perang ini, namun juga banyak rakyat Israel yang menjadi korban. Penduduk Israel di palestina sebelum perang adalah

⁹² Negara yang pertama kali mengakui Israel secara *defacto* adalah AS. Pengakuan AS diberikan beberapa menit setelah proklamasi kemerdekaan Israel dikumandangkan. Uni Soviet, salah satu negara besar yang cukup disegani pada waktu ini, memberika pengakuan terhadap negara Israel tiga hari setelah proklamasi kemerdekaan Israel. Dionnisius, *op.cit.*, hlm. 31.

⁹³ Michael D, Wormser (ed.), *The Middle East, 5th edition*, Washington: Congressional Quartely Inc., 1981, hlm. 15-16.

sekitar 650.000 orang dan 1% dari jumlah tersebut tewas dalam perang 1948. Perang 1948-1949 ini disebut oleh Israel sebagai perang kemerdekaan (*war of independence*).⁹⁴

Perang di tahun 1948 telah menciptakan rasa permusuhan dan kecurigaan yang mendalam antara Israel dan negara-negara Arab. Sebagai dampak dari rasa permusuhan dan kecurigaan tersebut, perang besar kembali terjadi pada tahun 1956, namun perang ini hanya antara Israel dan Mesir yang kemudian dikenal dengan Perang Suez. Perang ini ditandai dengan penyerangan Israel ke Mesir. Hal ini dilakukan karena Israel ingin menghentikan serang-serangan yang dilakukan oleh para gerilyawan Palestina di perbatasan dengan Mesir khususnya di Jalur Gaza. Israel juga ingin merusak konsentrasi Mesir yang tengah giat-giatnya meningkatkan kemampuan militernya. Keinginan Mesir untuk meningkatkan kemampuan militernya ini dipandang Israel sebagai suatu ancaman yang serius. Selain itu, aksi yang dilakukan oleh Israel ini merupakan suatu bentuk respon atas tindakan Gamal Abdul Naser karena telah melarang kapal-kapal Israel berlayar di Teluk Aqaba. Tindakan Nasser ini telah merusak rencana Israel untuk membangun pelabuhan Elat yang dibutuhkan oleh Israel.⁹⁵

Untuk melakukan penyerangan ke Mesir, Israel memperoleh bantuan persenjataan dari Perancis. Niat Israel untuk melancarkan serangan ke Mesir mendapat dukungan dari Perancis dan Inggris. Kedua negara Eropa tersebut ingin menjadikan penyerangan Israel ke Mesir sebagai dalih untuk mengirimkan pasukannya ke Terusan Suez yang pada saat itu baru saja di nasionalisasi oleh Nasser. Inggris dan Perancis tidak setuju dengan tindakan Nasser yang menasionalisasi Terusan Suez karena tindakan tersebut telah merugikan kedua negara tersebut baik secara ekonomi maupun politis. Pengiriman pasukan Inggris dan Perancis ke Mesir sebenarnya bertujuan untuk kembali menguasai Terusan Suez.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

⁹⁵ Ross, Dennis, 2004, *The Missing Peace*, New York: Farrar Straus Giroux., hlm 20. (Lihat Dinnoisus, *op., cit.*, hlm. 33).

⁹⁶ *Ibid.*,

Israel menyerang Mesir pada tanggal 30 Oktober 1956. Dalam waktu singkat Israel berhasil menduduki Sinai. Pada tanggal yang sama, Inggris dan Perancis mengirimkan pasukannya ke Mesir dan langsung menuju Terusan Suez. Inggris dan Perancis kemudian menyerukan kepada Israel dan Mesir untuk menjaga jarak dan terusan minimal 10 mil dari posisi mereka masing-masing. Tindakan Israel, Inggris, dan Perancis yang melakukan penyerangan ke Mesir tersebut dikecam oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Atas desakan dan tekanan dari kedua negara adidaya tersebut Israel, Inggris dan Perancis akhirnya menarik pasukannya dari Mesir. Israel adalah negara yang terakhir menarik pasukannya dari Mesir. Israel bersedia mundur setelah Amerika Serikat bersedia menjamin kebebasan berlayar bagi kapal-kapal Israel di Teluk Aqaba. Selain itu, kesediaan Israel untuk mundur juga disebabkan karena PBB akan menempatkan *United Nation Emergency Force* (UNEF) di Sharm el-Sheikh dan Jalur Gaza untuk mengawasi perbatasan. Adanya pasukan PBB ini cukup melegakan Israel karena dapat membatasi aktivitas gerilyawan Palestina.⁹⁷

Setelah ketegangan di wilayah Palestina sempat mereka beberapa saat, perang antara Israel dan negara-negara Arab kembali terjadi tahun 1967. Dampak yang ditimbulkan dari perang yang berlangsung selama enam hari ini (*the six-day war*) membuat konflik antara negara-negara Arab dan Israel semakin sulit untuk diselesaikan. Pasalnya dalam perang ini Israel mencaplok wilayah-wilayah Arab yang sampai saat ini beberapa diantaranya belum dikembalikan Israel. Sama seperti perang tahun 1956, dalam perang tahun 1967 ini Israel kembali melakukan penyerangan terlebih dahulu.⁹⁸

Perang 1967 ini dipicu oleh adanya serangan-serangan gerilyawan Palestina yang diarahkan ke wilayah Israel. Serangan gerilyawa tersebut banyak datang dari wilayah Syria dan diduga banyak dibantu oleh pemerintah Syria. Serangan-serangan gerilyawan ini membuat Israel merasa terganggu. Untuk menghentikan serangan gerilya ini, Israel kemudian melakukan serangan balasan ke Syria. Serangan ini mengakibatkan hancurnya sebuah bendungan di Syria.⁹⁹ Serangan yang dilakukan oleh Israel ke Syria ini mendorong keterlibatan Mesir.

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Lalu Suryade, *op.cit.*, hlm. 32.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

Dengan semangat persatuan Arab, Nasser kemudian memberlakukan kembali blokade di Teluk Aqaba kemudian diikuti dengan tuntutan Nasser agar PBB segera menarik UNEF dari Jalur Gaza dan Sharm el-Sheikh. Keinginan Nasser dipenuhi oleh PBB dan pada saat yang sama Mesir memindahkan pasukannya ke Semenanjung Sinai. Tindakan Mesir ini memicu kekhawatiran Israel dan seperti yang pernah dikatakan oleh Israel bahwa menyingkirkan UNEF dari Gaza dan Sharm el-Sheikh berarti perang.¹⁰⁰

Merasa dirinya terancam, Israel kemudian melancarkan serangan *preemptive* secara berturut-turut ke Mesir, Syria, dan Yordania. Serangan *preemptive* terjadi pada tanggal 5 Juni 1967 dan berhenti pada tanggal 10 Juni 1967. Dalam serangan tersebut Israel berhasil menghancurkan kekuatan militer ketiga negara Arab. Setelah perang berakhir, Israel menduduki wilayah dua kali lebih besar dari wilayah Israel, yaitu Semenanjung Sinai sampai ke Terusan Suez, Jalur Gaza, seluruh Tepi Barat termasuk Yerusalem, dan Dataran Tinggi Golan milik Syria. Pada tanggal 28 Juni 1967, pemerintah Israel mengeluarkan dekrit “unifikasi administratif” Yerusalem. Dengan dekrit ini, Israel melakukan aneksasi Yerusalem. Para pemimpin Israel berkali-kali mengatakan bahwa unifikasi Yerusalem dan integrasinya ke dalam wilayah Palestina merupakan keputusan final dan tidak *negotiable*.¹⁰¹

Untuk menghindari situasi yang lebih buruk lagi, DK PBB mengeluarkan Resolusi No. 242 tanggal 22 November 1967. Banyaknya kepentingan negara-negara besar terhadap konflik ini menyebabkan DK PBB baru dapat mengeluarkan Resolusi beberapa bulan setelah perang berlangsung. Meskipun resolusi ini mengandung ambiguitas, Resolusi ini ke depannya menjadi dasar perjanjian damai antara Israel dan negara-negara Arab. Resolusi ini menyerukan:

*(1) Withdrawal of Israeli forces from the occupied Arab areas; (2) An end to the state of belligerency between the Arab nations and Israel; (3) Acknowledgement of and respect for the sovereignty; territorial integrity and political independent of every nation in the area; (4) The establishment of “secure and recognized boundaries”; (5) A guarantee of freedom of navigation through international waterways in the area; and, (6) A just settlement of the refugee problem.*¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁰¹ Dionnisius Elvan Swasono, hlm. 35.

¹⁰² *Ibid.*, hlm, 36.

(1. Penarikan pasukan Israel dari daerah okupasi Arab; 2. Sebuah penyelesaian untuk negara-negara yang berperang, yaitu negara-negara Arab dan Israel; 3. Pengakuan dan penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan kebebasan politik setiap negara di daerah tersebut; 4. Penegakan keamanan dan batas-batas wilayah; 5. Jaminan terhadap kebebasan dalam bidang navigasi melalui jalur laut internasional di dalam area tersebut; 6. Sebuah penyelesaian yang adil dalam persoalan pengungsi.)

Perang pada bulan Oktober 1973 kembali terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab. Perang ini merupakan perang besar yang keempat. Dibandingkan dengan perang-perang besar sebelumnya, perang ini adalah perang yang paling besar karena selain banyak memakan korban jiwa juga banyak menghancurkan persenjataan. Perang ini diawali dengan serangan mendadak Mesir dan Syria ke Israel. Serangan ini dilakukan tepat pada saat Israel merayakan hari besar keagamaannya, Yom Kippur yang bertepatan pula pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, perang tahun 1973 dikenal pula dengan perang Yom Kippur atau Perang Ramadan.

Tidak menentunya nasib wilayah-wilayah Arab yang diduduki Israel mendorong Sadat melancarkan perang ini. Perang ini dilancarkan juga untuk membuat masyarakat dunia memperhatikan kembali masalah Arab-Israel. Serangan ini juga mengembalikan citra negara-negara Arab yang turun setelah kekalahan pada perang-perang sebelumnya dan ingin menghilangkan anggapan bahwa Israel adalah negara yang cukup hebat yang tidak dapat dikalahkan.

Perang ini dapat dihentikan setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet campur tangan. Atas dukungan Amerika Serikat dan Uni Soviet, DK PBB mengeluarkan Resolusi No. 338 tanggal 22 Oktober 1973. Resolusi ini menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata, menghentikan aktivitas militer, dan menyerukan negara-negara yang bertikai segera mengimplementasikan Resolusi DK PBB No. 424.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 37.

Peristiwa kekerasan lainnya yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina adalah invansi Israel ke Lebanon tahun 1982 yang dilakukan untuk menghancurkan kekuatan PLO (*Palestine Liberation Organization*). PLO sering melakukan serangan ke wilayah pemukiman Yahudi yang berada di utara berbatasan dengan Lebanon. Sejak PLO terusir dari Yordania pada tahun 1970 (peristiwa *Black September*), PLO kemudian membangun basisnya di Lebanon Selatan dimana di wilayah ini banyak terdapat pengungsi Palestina. Di basisnya yang baru ini Palestina melanjutkan perlawanan terhadap Israel.

Sebelum invansi ini terjadi, antara Israel dan PLO sudah sering saling menukar tembakan dan serangan di wilayah perbatasan antara Israel dan Lebanon. Israel langsung menyerang basis PLO di Lebanon Selatan setelah kelompok teroris Abu Nidal, pecahan PLO, mencoba membunuh duta besar Israel untuk Inggris pada awal Juni 1982. Sebagai tindakan balasan, Israel kemudian melancarkan invansi ke Lebanon Selatan yang dikenal dengan operasi perdamaian untuk Galilea (*Operation Peace for Galilee*).¹⁰⁴

Invansi Israel ke Lebanon ini mendapat kecaman dari masyarakat internasional terlebih setelah terjadi peristiwa pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Tindakan pembantaian itu dilakukan oleh militan Phalangist yang keberadaannya didukung oleh Israel. Dalam peristiwa itu ribuan pengungsi Palestina tewas. Invansi Israel ke Lebanon ini berhasil menghancurkan basis PLO di Lebanon. akibat invansi ini, pasukan-pasukan perjuangan PLO menjadi tersebar ke beberapa negara Arab sekitar. Yasser Arafat mengungsi ke Tunis, Tunisia dan mendirikan basis PLO di kota ini. Israel baru menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 1985. Untuk melindungi wilayahnya yang berada di sebelah utara ini dari serangan kelompok Hizbullah, Israel membuat zona keamanan secara sepihak (*self security zone*) di wilayah Lebanon bagian selatan.¹⁰⁵

Kekerasan yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina kembali terjadi di akhir tahun 1980-an. Pada bulan Desember 1987, penduduk Arab Palestina yang tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat melakukan perlawanan terhadap tentara Israel yang bertugas di wilayah tersebut. Gerakan perlawanan ini umumnya dilakukan oleh anak-anak dan para wanita dengan cara melempari batu kepada

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 46.

¹⁰⁵ Anwar M. Aris., *op. cit.*, hlm. 57.

tentara-tentara Israel yang tengah bertugas di wilayah pendudukan, membakar ban-ban bekas dan melakukan aksi demonstrasi. Gerakan perlawanan yang cukup besar ini kemudian dikenal dengan nama *intifadah*. Aksi ini merupakan akumulasi ketidakpuasan dan ketidaksenangan bangsa Arab Palestina atas pendudukan Israel di Tepi Barat.¹⁰⁶

Intifadah dipicu dari peristiwa tabrakan yang terjadi di Gaza. Dalam insiden tersebut, empat pekerja Arab tewas dan tujuh orang luka serius ketika sebuah truk tentara Israel menabrak truk yang berisi orang-orang Arab Palestina yang baru saja pulang kerja dari wilayah pendudukan. Supir dari tank tersebut adalah kakak dari seorang Israel yang baru saja terbunuh di wilayah Gaza, kemudian berkembang kalau tabrakan ini dilakukan dengan sengaja.

Upacara pemakaman orang Arab yang meninggal berubah menjadi demonstrasi melawan pendudukan Israel dan kebijakannya. Tentara Israel kemudian datang untuk menghentikan aksi demonstrasi tersebut yang disambut lemparan batu dari masyarakat Palestina. Kemudian, tentara Israel membalasnya dengan gas air mata dan tembakan peluru karet ke arah demonstran. Tindakan tentara Israel ini menyebabkan terbunuhnya seorang pemuda Palestina berusia 20 tahun yang kemudian menjadi martir pertama gerakan *intifadah*.

Untuk menghentikan aksi *intifadah* ini, pemerintah Israel menerapkan kebijakan yang cukup tegas seperti “*breaking their bones policy*”, mendeportasi, menahan tanpa diadili terlebih dahulu, dan memberlakukan jam malam. Kebijakan Israel ini mendapat kecaman dari masyarakat internasional dan meminta Israel untuk menerapkan cara-cara yang lebih manusiawi dalam menghadapi orang-orang Palestina yang terlibat dalam *intifadah*. *Intifadah* ini akhirnya dapat kembali menarik perhatian masyarakat dunia terhadap konflik Israel-Palestina yang selama ini tidak begitu mendapat perhatian karena adanya perang antara Iran dan Irak. *Intifada* ini berakhir pada tahun 1993.¹⁰⁷

Bila diperhatikan, dari tahun 1948 hingga akhir tahun 1970-an, kekerasan menjadi pendekatan yang paling dominan digunakan oleh negara-negara Arab dan Israel untuk menyelesaikan konflik yang ada di antara mereka. Pendekatan dengan

¹⁰⁶ *Ibid.*, 58.

¹⁰⁷ Dionnisius, *op., cit.*, hlm. 47.

cara-cara damai seperti perundingan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik sangat jarang atau hampir tidak pernah dilakukakan selama kurun waktu tersebut.

Pendekatan dengan cara damai untuk menyelesaikan konflik tersebut baru berlangsung pada saat Perjanjian Camp David 1978. Meskipun pihak Palestina tidak diikutsertakan dalam Perjanjian Camp David 1978, namun pertemuan dapat dikatakan merupakan kesempatan pertama dalam membahas upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam suatu perundingan. Pada bulan Desember 1973, di Jenewa sempat berlangsung konferensi internasional untuk membahas penyelesaian konflik antara Israel dan negara-negara Arab. Isu palestina juga menjadi satu agenda konferensi. Konferensi ini disponsori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dan diadakan dalam kerangka kerja Resolusi DK PBB No. 338. Konferensi ini hanya dihadiri oleh Israel, Mesir, dan Yordania, sedangkan Syria menolak untuk hadir dalam konferensi ini. Belum sempat membahas substansi lebih jauh, konferensi ini berhenti di tengah jalan karena pihak-pihak yang bertikai saling melempar kesalahan sehingga membuat suasana memanas. Hasil yang dicapai dalam pertemuan Camp David ini telah membuka jalan mengenai apa yang selanjutnya dikenal dengan “*peace proses*”.

Pertemuan Camp David tahun 1978 berlangsung dari tanggal 5 sampai 17 September.¹⁰⁸ Pertemuan ini merupakan prakarsa Perdana Menteri Amerika Serikat, Jimmy Carter, yang diadakan dengan maksud “mengisolasi” Presiden Mesir, Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, dari dunia luar sehingga mereka dapat dengan leluasa, tanpa tekanan, membahas penyelesaian konflik yang ada antara Israel dan Mesir. Hasil yang dicapai dalam Perjanjian Camp David tahun 1978 ini juga menjadi rujukan pertemuan-pertemuan dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina selanjutnya seperti Konferensi Madrid pada tahun 1991, Pertemuan Washington tahun 1991-1992, dan Perundingan Rahasia Oslo tahun 1993. Namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa semua perundingan damai yang disebutkan, kecuali Perundingan Rahasia Oslo, diadakan atas desakan Amerika Serikat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Camp David adalah nama tempat peristirahatan presiden AS yang terletak di perbukitan masryland. Tempat ini sering digunakan oleh presiden-presiden AS untuk berlibur. *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

Sebelum bertemu di Camp David, Sadat dan Begin sebenarnya sudah bertemu dua kali yaitu di Kairo dan Ismailiah. Pertemuan tersebut diadakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan bersejarah Sadat ke Yerusalem pada bulan November 1977. Kedua pertemuan tersebut berlangsung pada akhir tahun 1977. Kedua pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak sama-sama masih menyimpan kecurigaan. Lebih buruk lagi, pertemuan tersebut kembali mengobarkan kebencian di antara kedua belah pihak. Untuk menyelamatkan hubungan baik Israel-Mesir yang baru saja terbina sejak kunjungan Sadat ke Yerusalem, Presiden Jimmy Carter mengambil inisiatif dengan mengundang Sadat dan Begin untuk bertemu secara informal di Camp David. Dalam pertemuan Camp David, Amerika Serikat hanya bertindak sebagai fasilitator.

Pertemuan Camp David tidak hanya membahas mengenai penyelesaian wilayah Mesir yang diduduki Israel tapi juga membicarakan masa depan Tepi Barat dan Jalur Gaza serta wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. perlu diketahui, bahwa sejak tahun 1977, Israel berada dibawah pemerintahan Partai Likud. Sebelumnya, pemukiman di Tepi Barat diorientasikan untuk kepentingan pertanian. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Likud, Tepi Barat difokuskan sebagai pemukiman Yahudi.

Dalam pertemuan Camp David ini, Mesir menempatkan diri sebagai wakil bangsa Arab Palestina yang kemudian ditentang oleh bangsa Palestina sendiri karena kesepakatan yang dihasilkan dinilai tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan rakyat Palestina seperti penarikan mundur tentara Israel dari Tepi Barat dan Gaza, kemerdekaan Palestina, penyelesaian masalah pengungsi, dan status kota Yerusalem. Kesepakatan antara Begin dan Sadat mengenai wilayah Tepi Barat dan Gaza tertuang dalam *framework for settling the future of the West Bank and Gaza*.

Hasil yang dicapai dalam pertemuan di Camp David mengenai masalah Palestina merupakan suatu terobosan besar karena dalam *framework* tersebut Israel bersedia memberikan otonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Otonomi tersebut akan dilaksanakan oleh Dewan Administrasi yang akan dipilih secara langsung oleh warga Palestina yang

tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Otonomi yang diberikan adalah otonomi dalam mengurus urusan-urusan sipil warga Palestina seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Urusan keamanan dan hubungan luar negeri tetap berada di tangan Israel.

Selain otonomi, *framework* juga mengatur tahapan-tahapan yang akan dijalankan sehubungan dengan masa depan Tepi Barat dan Gaza, yaitu pemerintahan transisi sementara selama 5 tahun, pemilihan *self-governing authority* untuk menjalankan otonomi selama transisi, penarikan tentara Israel secara bertahap dari kedua wilayah tersebut, dan negosiasi mengenai status akhir wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza dilaksanakan paling lama tiga tahun setelah pemerintahan transisi dijalankan.

Perundingan Camp David membawa perubahan besar di Timur Tengah, meskipun hasil-hasil pertemuan pada akhirnya tidak dilaksanakan secara konsisten oleh Israel khususnya *framework* mengenai wilayah Palestina, membawa kosekuensi bagi Mesir. Mesir dikucilkan dari pergaulan antar negara-negara Arab dengan cara dikeluarkan dari Liga Arab serta institusi-institusi keuangan Arab seperti *Federation of Arab Banks* dan *the Arab Investment Company*.

Sebagian besar negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir. Pada pertemuan di Baghdad pada bulan November 1978, negara-negara Arab sepakat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Mesir. Masih merasa belum cukup menghukum Mesir, negara-negara Arab menambah hukuman dengan mengeluarkan Mesir dari keanggotan OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) pada bulan April 1979 dan melarang penjualan minyak ke Mesir. Hukuman-hukuman tersebut diberikan oleh negara-negara Arab karena mereka tidak senang dengan tindakan Mesir yang mengadakan perjanjian sepihak dengan Israel. Tindakan Mesir tersebut dipandang telah mengkhianati dan melemahkan perjuangan negara-negara Arab melawan Israel.¹¹⁰

Dari dua perjanjian yang dihasilkan dalam pertemuan Camp David 1978 Israel hanya dapat melaksanakan secara konsisten perjanjian yang pertama. Adanya resistensi dari publik Israel khususnya dari kelompok Yahudi garis keras

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

menjadi salah satu penyebab tidak konsistennya Israel dalam menjalankan perjanjian mengenai masa dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kemudian, setelah vakum selama lebih dari 10 tahun sejak pertemuan Camp David 1978, upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah kembali dilakukan pada konferensi damai Timur Tengah (*The Middle East Peace Conference*) yang diadakan di Madrid pada bulan Oktober 1991. Semua negara Arab yang bertikai secara langsung dengan Israel seperti Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina hadir dalam konferensi ini.¹¹¹ Kemudian, konferensi ini dikenal dengan nama Konferensi Madrid.

Konferensi Madrid merupakan prakarsa Presiden Amerika Serikat, George Bush, yang menganggap bahwa konflik Timur Tengah dapat menjadi sumber utama instabilitas di Timur Tengah dan mengancam kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, masalah di Timur Tengah harus segera diselesaikan. Bush menyampaikan pandangannya di depan kongres Amerika Serikat sebagai berikut:

“We must work to creat new oportunities for peace and stability in the Middle East...all of us know the depth of bitterness that has made the dispute between Israel and its Arab neighbours so painful and intractable. Yet, in the conflict just concluded, Israel and may of the Arab states have for the first time found themselves confronting the same agressor. By now, it should be plain to all parties that peacemaking in the Middle East requires compromise...we must do all that we can close the gap between Israel and the Arab states-and between Israelis and Palestinian... the time had come to put an end to the Arab-Israeli conflict.”¹¹²

(Kita harus berusaha menciptakan peluang-peluang baru bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah... kita semua sangat mengetahui kepahitan yang sangat menyakitkan dan pelik telah ditimbulkan oleh perselisihan antara Israel dengan negara-negara Arab disekitarnya. Sekalipun begitu, Israel dan negara-negara Arab, untuk pertama kali telah menemukan diri mereka menghadapi agresor yang sama. Sekarang, hal tersebut harus disadari oleh semua pihak bahwa pembuatan perdamaian di Timur Tengah memerlukan kompromi...kita harus melakukan segala yang kita dapat lakukan untuk menutup kesenjangan antara Israel dan negara-negara Arab-dan antara bangsa Israel dan Palestina... sudah saatnya untuk menciptakan perdamaian bagi konflik Arab-Israel)

¹¹¹ Dalam konferensi ini, delegasi Palestia bergabung bersama dengan delegasi Yordania

¹¹² *Ibid.*, hlm. 53.

Konferensi Madrid dibuka pada tanggal 30 Oktober 1991 oleh Bush dan Gorbachev. Meskipun Moskow menjadi *co-sponsor* pada konferensi ini, namun dalam hal persiapan Amerika Serikat lebih banyak berperan. Untuk membujuk negara-negara Timur Tengah agar ikut dalam konferensi, Bush mengirim Menteri Luar Negerinya, James Baker, ke tiap-tiap negara yang terlibat dalam konflik Israel-Arab. Konferensi ini hampir tidak terlaksana karena dua negara kunci yaitu Israel dan Syria tidak menunjukkan minat yang serius untuk berpartisipasi. Namun setelah diadakan pendekatan yang cukup intensif, kedua negara akhirnya bersedia untuk berpartisipasi.¹¹³

Syria bersedia berpartisipasi lebih disebabkan karena alasan ekonomi, yaitu memerlukan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Selama Perang Dingin berlangsung, Syria banyak memperoleh bantuan ekonomi dan militer dari Uni Soviet yang tidak mungkin diharapkan lagi pasca-Perang Dingin. Lain halnya dengan Israel yang bersedia ikut setelah persyaratan mengenai delegasi Palestina dipenuhi. Syarat-syarat yang diajukan Israel untuk orang-orang Palestina yang duduk dalam delegasi Yordania-Palestina yaitu:

1. Harus merupakan penduduk di Tepi Barat dan Jalur Gaza, namun bukan penduduk Yerusalem. Israel tidak membolehkan orang Palestina yang tinggal di Yerusalem duduk dalam delegasi karena Israel tidak ingin muncul kesan di pihak Palestina bahwa Israel bersedia berkompromi mengenai Yerusalem.
2. Anggota delegasi tersebut bukan merupakan wakil dari PLO atau anggota Dewan Nasional Palestina (PNC), karena Israel tidak ingin bernegosiasi dengan organisasi yang selama ini dipandang sebagai organisasi teroris.
3. Anggota delegasi tersebut juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan teoritis dan menyetujui perjanjian sementara dimana dalam perjanjian tersebut pihak Palestina paling sedikit bersedia menghentikan klaim mengenai pembentukan negara Palestina paling sedikit 5 tahun ke depan.
4. Semua anggota delegasi palestina harus bebas dari tekanan PLO.¹¹⁴

¹¹³ Mufti Wardani, "Prospek Peta Jalan Damai Palestina-Israel: Perspektif Resolusi Kionflik", Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 2004, hlm, 42.

¹¹⁴ Dionnisius., *Op.,cit.*, hlm., 54.

Meskipun Israel menetapkan persyaratan yang begitu ketat bagi delegasi Palestina, namun pihak Palestina yang mendukung konferensi tidak merasa keberatan. Bagi mereka, keikutsertaan delegasi Palestina dalam konferensi adalah suatu kesempatan untuk merubah status quo. Selain itu, delegasi Palestina juga dapat berhadapan secara langsung dengan delegasi Israel dimana selama ini Israel menganggap bahwa apa yang dinamakan bangsa Palestina itu tidak pernah ada. Jadi adalah suatu penghargaan yang besar bagi Palestina dapat duduk berhadapan dengan pemerintah Israel. Konferensi Madrid berakhir pada tanggal 2 November 1991.¹¹⁵

Konferensi ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai. Pertemuan bilateral antara Israel dan Palestina berlangsung pada tanggal 3 November 1991. Dalam pertemuan ini pihak Palestina mengajukan tuntutan agar Israel segera mengakhiri pendudukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), mengakui negara Palestina, dan mengembalikan atau membayar kompensasi atas seluruh harta benda orang-orang Palestina yang mengungsi di tahun 1948. Tuntutan pihak Palestina tidak dapat diakomodasi oleh Israel pada pertemuan ini sehingga pertemuan bilateral tersebut gagal menghasilkan kesepakatan.

Meskipun konferensi ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun, namun konferensi ini telah berhasil mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Dennis Ross mengatakan bahwa *“Madrid was designed to launch a process, not to conclude it. It succeeded in getting negotiation underway, but it accomplished little else”*. Selain itu, Konferensi Madrid telah berhasil menghancurkan suatu pemikiran yang selama ini dipegang oleh negara-negara Arab untuk tidak melakukan negosiasi dengan Israel. Pemikiran tersebut dipegang sejak pertemuan Liga Arab di Khartoum tahun 1967 yang dikenal dengan tiga *“no”*: *no to recognition, no to negotiation, and no to peace with Israel*.¹¹⁶

Tidak mudah bagi Israel untuk berdamai dengan negara-negara tetangganya karena sama saja memberikan konsesi-konsesi yaitu melepas wilayah Arab yang didudukinya sejak tahun 1967. Pemberian konsesi ini sulit dilakukan karena tidak sedikit masyarakat dan para pemimpin Israel yang menentang

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

pemberian konsesi tersebut baik karena alasan strategis maupun ideologis. Selain mendapat tantangan dari dalam, keinginan Israel untuk berdamai juga mendapat tantangan dari luar. Beberapa negara-negara Timur Tengah ada yang sama sekali tidak ingin berhubungan dengan Israel seperti Iran. Meskipun banyak menghadapi tantangan, Israel dari waktu ke waktu tetap berupaya mengusahakan perdaamain dengan negara-negara tetangganya.

Perundingan damai Washington merupakan kelanjutan dari konferensi madrid. Dari seluruh rangkaian Pertemuan Washington yang dimulai sejak Desember 1991 terasa sedikit berbeda karena Yitzak Rabin bersedia melakukan negosiasi dengan Palestina secara tersendiri bukan dalam delegasi Yordania-Palestina. Pertemuan ini tetap melanjutkan pertemuan yang dijalankan dalam Konferensi Madrid yaitu pertemuan bilateral dan multilateral, untuk kedua pertemuan itu, Rabin membagi kerja dengan Shimon Peres. Rabin memimpin pertemuan bilateral sedangkan untuk multilateral dipimpin oleh Simon peres.

Dari Agustus 1992 hingga bulan Agustus 1993, pertemuan bilateral Israel Palestina berlangsung sebanyak enam kali. Akan tetapi, pertemuan-pertemuan tersebut secara substansi tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Shimon Peres berpendapat bahwa Israel dalam pertemuan Washington ini tidak berani memberikan konsesi wilayah. Hal lainnya yang membuat pertemuan ini gagal menghasilkan kesepakatan adalah karena tim negosiasi Palestina sangat tergantung pada instruksi PLO yang berbasis di Tunisia. Mereka tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan PLO.¹¹⁷

Pertemuan Washington antara Israel dan Palestina ini sempat terhenti beberapa saat menyusul tindakan Rabin yang mendeportasi 415 orang anggota Hamas di bulan Desember 1992 dan menutup perbatasan Israel dengan Tepi Barat dan Gaza untuk mencegah aksi-aksi teror dari kelompok-kelompok perjuangan Palestina pada Maret 1993. Rabin melakukan ini semua untuk membalas aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pejuang Palestina dimana dalam aksi-aksi tersebut banyak prajurit dan penduduk Israel yang tewas.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

Setelah berhenti beberapa saat, pertemuan dilanjutkan lagi pada bulan April 1993. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan ini Rabin bersedia menerima Faisal Husseini, penduduk Yerusalem Timur yang dikenal sebagai wakil informal PLO, sebagai salah satu anggota delegasi Palestina. Sesuai dengan kesepakatan dalam Konferensi Madrid, warga Palestina yang tinggal di Yerusalem timur tidak dibolehkan menjadi anggota delegasi dalam perundingan damai. Namun atas desakan Amerika Serikat, Rabin bersedia menerima Faisal Husseini. Pada pertemuan ini, kedua delegasi menyampaikan *draft declaration of principles or statement of principles*. Israel menyerahkan *Informal Draft of Interim Self Governing Authority*. Palestina menanggapi dengan menyerahkan *draft Proposal for A Declaration of Principles Calling for PISGA (Palestinian Interim Self-Governing Authority)*. Meskipun keduanya sudah menyampaikan *draft*, namun secara substansi Pertemuan Washington ini tidak mengalami kemajuan yang berarti hingga perundingan rahasia yang berlangsung di Oslo.

Sebelum Pertemuan Washington dilanjutkan kembali oleh Rabin, ada usulan dari sebagian kalangan elit Israel, khususnya Partai Buruh agar Israel mulai mempertimbangkan untuk bernegosiasi secara langsung dengan PLO. Usulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam Pertemuan Washington, Israel sebenarnya tidak secara langsung telah berhubungan dengan PLO karena tim negosiasi Palestina pada pertemuan Washington tidak dapat mengambil keputusan tanpa instruksi dari PLO yang berbasis di Tunis tersebut. Namun usulan untuk melakukan negosiasi langsung dengan PLO ini ditolak oleh Rabin dengan alasan bahwa PLO adalah organisasi teroris. Selain itu, agenda yang dibawa oleh PLO dalam perundingan sudah jelas menurut Rabin yaitu menuntut kemerdekaan Palestina dan menuntut hak kembalinya pada pengungsi Palestina. Kedua agenda tersebut ditentang oleh Rabin. Beberapa pihak memandang bahwa pembicaraan langsung antara Israel dan PLO justru merupakan syarat penting bagi perdamaian. Pandangan ini dimiliki oleh beberapa pejabat Israel Yossi Beilin dan Shimon Peres.

Perundingan Oslo dimulai ketika pertemuan antara Abu Ala'a dan Hirschfeld di London pada bulan Desember 1992. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Cavendish ini, juga dihadiri oleh Larsen, membahas mengenai pelaksanaan pertemuan rahasia di Norwegia dimana pemerintahan Norwegia bersedia menjadi fasilitator. Sebelum melakukan pertemuan yang kedua di sore harinya, Hirschfeld berkonsultasi dengan Beilin yang tidak mengetahui adanya pertemuan di pagi harinya. Setelah berkonsultasi, Beilin menyatakan persetujuannya untuk menyelenggarakan pertemuan rahasia di Oslo. Ketika pertemuan di London ini berlangsung, pertemuan Washington masih tetap berjalan.¹¹⁸

Perjanjian Damai Oslo terjadi pada 20 Agustus 1993 dan secara resmi ditandatangani di Washington D.C. pada 13 September 1993 oleh Mahmoud Abbas mewakili PLO dan Shimon Peres mewakili Israel. Peristiwa itu disaksikan oleh Warren Christopher dari Amerika Serikat dan Andrei Kozyrev dari Rusia, di depan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, dan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO Yasser Arafat.¹¹⁹

Perjanjian Damai Oslo berlanjut dengan diadakan Kesepakatan Damai Oslo II yang dilakukan pada tahun 1995. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Menteri Ekonomi Palestina, Ahmad Qurei alias Abu Alaa dan Dirjen Deplu Israel, Uri Safir serta disaksikan oleh Yasser Arafat dan Shimon Peres. Dokumen setebal 400 halaman ini merupakan hasil suatu pembicaraan maraton selama tujuh malam, bahkan sempat diwarnai dua kali aksi boikot Yasser Arafat. Namun, pada akhirnya acara penandatanganan kesepakatan akhir tentang pelaksanaan Kesepakatan Oslo tahap II ini berlangsung di Washington pada Kamis, 28 September 1995.

Secara garis besar kesepakatan ini menegaskan penarikan pasukan Israel dari tujuh kota utama dan desa-desa Palestina. Tujuh kota Palestina tersebut adalah Hebron, Rammalah, Nebus, Jenin, Qalqilyah, Tulkarem, dan Bethlehem. Lainnya mengatur penyelenggaraan pemilu Palestina bulan Maret tahun 1996.¹²⁰ Kemudian pada tahun 1997, terbentuklah persetujuan Hebron yang merupakan

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

¹¹⁹ Anwar M. Aris, *Israel is not Israel: Negara Fiktif di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing House, 2009, hlm. 111.

¹²⁰ "Palestina-Israel Akhirnya Tanda Tangan Kesepakatan", *Kompas*, 25 September 1995.

masa implementasi kedua dari Oslo Accord (Perjanjian Damai Oslo) yang menghasilkan kesepakatan bahwa Israel harus segera mundur dari 80% wilayah Hebron dan perumusan jangka waktu penarikan mundur pasukan Israel yang dimulai pada bulan Maret dan harus diakhiri pada bulan September 1998.¹²¹

Pada tahun 1998, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian damai yang disebut sebagai Memorandum Wye River. Memorandum ini secara umum berisi tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan, definisi mengenai masalah keamanan, dan pembuatan bandara Palestina di Jalur Gaza. Akan tetapi, perundingan ini gagal karena Israel banyak melakukan pelanggaran kesepakatan yang ada di memorandum ini, khususnya masalah wilayah pendudukan.

Kemudian perjanjian damai kembali dilakukan dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Camp David (KTT Camp David). Akan tetapi, KTT Camp David ini menemui kegagalan karena aksi radikal Ariel Sharon pada tanggal 28 September 2000 yang kemudian memicu terjadinya *intifadah* kedua. Kemudian, Amerika Serikat berusaha untuk mengupayakan perdamaian kembali dengan mengadakan KTT di Sharm El Sheikh, dimana tiap pihak sepakat untuk memulihkan kembali kerjasama keamanan bilateral, mengurangi tekanan Israel terhadap Palestina dan upaya masing-masing untuk mengurangi kekerasan.

Pada bulan April 2001, komisi ini menyampaikan rekomendasi yang intinya menghimbau dipulihkannya perundingan, upaya membangun kepercayaan, kerjasama keamanan dan penghentian kekerasan. Dalam rekomendasi tersebut terdapat pula himbauan untuk menghentikan pemukiman baru oleh Israel. Himbauan untuk menghentikan pembangunan pemukiman baru berkembang menjadi diskusi yang besar sehingga timbul kesan seolah-oleh ini merupakan satu-satunya rekomendasi dari komisi penyidik. Respon Israel atas himbauan ini adalah memodifikasi inisiatif penghentian pembangunan pemukiman, yang mana signifikasinya di masa sekarang tidak jelas. Namun, pemerintah Israel mengumumkan gencatan senjata sepihak dan Perdana Menteri Sharon dalam pidatonya tanggal 30 Mei Knesset menyatakan bahwa pihaknya menerima Rekomendasi Mithcell secara penuh.

¹²¹ Mufti Wardani, *op., cit.*, hlm. 45.

Dalam Rekomendasi Mitchell, pemerintah Israel dan Otoritas Palestina dihimbau melakukan tindakan cepat untuk menghentikan kekerasan. Kedua pihak harus membangun kembali kepercayaan dan memulihkan upaya perundingan. Upaya pemulihan kepercayaan ini sangat penting artinya dan masing-masing pihak harus mengambil langkah afirmatif untuk mencapai hal tersebut.¹²² Namun, Rekomendasi Mitchell pada kenyataannya belum dapat menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Seiring dengan kegagalan Rekomendasi Mitchell untuk menghentikan kekerasan antara Israel dan Palestina, Direktur CIA (*Central Intelligence Agency*), George Tenet berusaha merancang rencana untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan kembali upaya perundingan. Rencana tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 13 Juni 2001. Namun pemulihan perundingan hanya dapat dilakukan dengan syarat terdapat satu minggu tanpa kekerasan. Pada bulan Maret 2002, Perdana Menteri Ariel Sharon menyatakan pihaknya bersedia menjalankan satu minggu tanpa kekerasan. Namun, pasukan Israel pada saat itu telah menduduki wilayah Palestina dan Palestina menolak berunding hingga Israel menarik mundur pasukannya.¹²³

Organisasi keamanan Israel dan Otoritas Palestina kemudian menyatakan kembali komitmen mereka atas perjanjian keamanan yang terkandung dalam KTT Sharm al-Sheik bulan Oktober 2000. Premis operasional dari rencana ini adalah kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk melakukan gencatan senjata yang komprehensif, sesuai pernyataan kedua pemimpin di depan publik. Selain itu, Komite Keamanan Gabungan akan menyelesaikan isu-isu yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya kemudian.¹²⁴

Organisasi keamanan Israel dan Otoritas Palestina sepakat untuk memulai langkah keamanan yang spesifik, kongkrit dan realistis untuk membangun kembali kerjasama keamanan dan memulihkan situasi di lapangan seperti sebelum tanggal 28 September dengan cara-cara tertentu. Pertama, Pemerintah Israel dan Otoritas Palestina akan secepatnya memulihkan kerjasama keamanan. Kemudian, kedua pihak mengambil langkah cepat untuk memberlakukan gencatan senjata

¹²² *Ibid.*, hlm 45-46.

¹²³ "Israel Isyaratkan Proposal Damai", *Kompas*, 31 Juli 2001.

¹²⁴ "Israel dan Palestina Hormati Gencatan Senjata", *Kompas*, 5 Juni 2001.

dan menstabilkan lingkungan keamanan. Petugas keamanan Israel dan Palestina akan menggunakan Komite Keamanan sebagai wadah untuk saling memberikan informasi mengenai ancaman teroris, termasuk informasi mengenai operasi kelompok teroris yang diketahui akan atau sedang berlangsung di wilayah yang berada di bawah kontrol pihak lain. Kedua belah pihak akan secara agresif mencegah individu ataupun kelompok yang ada di wilayah masing-masing untuk melakukan kekerasan. Kedua belah pihak juga akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa wilayah mereka tidak akan digunakan untuk melancarkan serangan kepada pihak lain. Selanjutnya, melalui Komite Keamanan Tingkat Tinggi, akan merumuskan jadwal pelaksanaan penarikan mundur pasukan pertahanan Israel ke posisi sebelum 28 September 2000. Kemudian dalam waktu satu minggu pengumuman pertemuan Komite Keamanan dan Pemulihan Kerjasama Keamanan akan dirumuskan jadwal pembukaan tempat-tempat yang selama ini ditutup termasuk jalan-jalan internal, Jembatan Allenby, Bandara Gaza, Pelabuhan Gaza dan perbatasan. Tempat pemeriksaan keamanan akan dikurangi sesuai persyaratan yang sah dan konsultasi antara dua pihak.¹²⁵

4.2 Eksistensi Partai Likud di Israel

4.2.1 Sistem Politik Israel

Bagi Israel, kebijakan penyelesaian konflik Palestina masih merupakan bagian dari kebijakan luar negerinya. Di Israel, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dibantu oleh para menteri. Perdana Menteri dan para menteri ini tergabung dalam sebuah kabinet. Di kabinet inilah proses pembuatan seluruh kebijakan termasuk kebijakan luar negeri berlangsung. Masing-masing menteri bebas mengemukakan pendapatnya pada rapat-rapat pembuatan keputusan begitu pula dengan kelompok-kelompok kepentingan yang berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai suatu kebijakan tetap terletak di tangan Perdana Menteri. Beranjak dari kenyataan tersebut, David Makosvsky berpendapat bahwa untuk menganalisis mengapa Israel memilih kebijakan luar negeri tertentu sebenarnya cukup mudah yaitu

¹²⁵ Mufti Wardani, *op. cit.*, hlm. 47.

cukup menganalisis si pembuat keputusannya yakni Perdana Menteri karena proses pengambilan keputusan di Israel itu menurutnya “*its highly personalized*”.¹²⁶

Seorang Perdana Menteri di Israel itu adalah anggota Knesset dan biasanya adalah ketua partai yang paling banyak memiliki jumlah kursi di Knesset. Perdana menteri memiliki hak prerogatif memilih menteri yang berasal dari partainya sendiri namun tidak dapat menolak calon menteri yang diajukan oleh partai lain yang menjadi mitra koalisinya. Perdana menteri tidak dapat menonaktifkan seorang menteri, yang dapat menonaktifkan seorang menteri adalah Knesset dengan mosi tidak percaya. Sebelum menjalankan pemerintahannya, seorang Perdana Menteri harus menyampaikan susunan kabinetnya terlebih dahulu kepada Knesset untuk memperoleh persetujuan. Perdana menteri beserta jajaran kabinetnya bertanggung jawab kepada Knesset. Pemerintah tidak dapat membubarkan Knesset.¹²⁷

Meskipun konstitusi Israel tidak mengharuskan pemerintah menyampaikan setiap kebijakan kepada Knesset, namun pada prakteknya selama ini, pemerintah tetap menyampaikan kebijakan tersebut kepada Knesset dengan maksud untuk memperoleh persetujuan terlebih jika kebijakan itu adalah kebijakan perdamaian. Hal ini cukup penting agar pemerintah dapat lebih leluasa menjalankan kebijakannya tersebut. Hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut akan datang bila Knesset tidak menyetujui kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seorang Perdana Menteri tidak begitu khawatir jika kebijakannya akan dihambat apabila partainya memiliki kursi mayoritas di Knesset.

Sebagai negara yang menganut sistem parlementer, maka pemilu anggota parlemen menjadi penting. Masing-masing partai politik ingin memperoleh kursi di Knesset sebanyak mungkin. Parpol yang mengantongi sedikitnya 61 kursi (separuh lebih 1) dari seluruh Knesset (120), maka partai tersebut berhak memegang kekuasaan di Israel. Selama ini belum ada partai di Israel yang memperoleh mayoritas suara sehingga pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan koalisi beberapa partai.¹²⁸

¹²⁶ Peri Yoram, “Rabin: From Mr. Security to Nobel Peace Prize Winner”, *The Rabin Memoirs*, Los Angeles: University Of California Press, 1996, hlm. 344.

¹²⁷ Dionnisius, *op., cit.*, hlm. 39.

¹²⁸ *Ibid.*,

Knesset adalah otoritas tertinggi di Israel yang memegang kekuasaan legislatif. Knesset merupakan suatu badan *unicameral* yang terdiri dari 120 anggota yang dipilih melalui pemilu. Di Israel, pemilu untuk memilih anggota Knesset diadakan setiap empat tahun, tetapi apabila diperlukan dapat dipercepat. Hanya knesset yang dapat mempercepat pelaksanaan pemilu. Umumnya dalam pemilu, rakyat Israel lebih senang memilih gambar partai dan bukan nama orang meskipun partai telah membuat daftar nama kadernya yang akan duduk di Knesset. Setelah pemilihan, kursi di Knesset kemudian dihitung. Partai yang berhak memperoleh kursi di Knesset paling sedikit harus memperoleh 1,5% dari seluruh jumlah suara yang sah. Knesset memiliki masa tugas tidak lebih dari 4 tahun.¹²⁹

Fungsi utama Knesset hampir sama dengan fungsi parlemen di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Fungsi tersebut antara lain menyatakan mosi tidak percaya atau percaya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, membuat perundang-undangan, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan nasional dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, Knesset juga berfungsi menyetujui anggaran belanja dan pajak yang diajukan oleh pemerintah, memilih Presiden, dan berpartisipasi dalam penunjukan hakim. Knesset dibagi kedalam sejumlah komisi yang bertanggung jawab terhadap isu-isu tertentu dan membuat perundang-undangan menyangkut isu tertentu.¹³⁰

4.2.2 Eksistensi Likud dalam Pemerintahan di Israel

Israel menganut sistem demokrasi parlementer Barat. Pada bulan Januari 1949, pemilu diselenggarakan guna membentuk parlemen satu kamar (Knesset) yang beranggotakan 120 wakil. Partai-partai politik yang telah ada pada masa pemerintahan mandat terus melanjutkan eksistensinya dengan beberapa perubahan nama atau komposisi. Partai Sosialis Moderat (Mapai) pimpinan Ben Gurion merupakan partai yang terbesar, sedangkan tiga partai besar lainnya ialah sosialis Sayap Kiri (Mapam), Yahudi Ortodoks, dan Revisionis (Herut).¹³¹

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Lalu Suryade, *op., cit.*, hlm 53.

Masyarakat Yahudi memiliki sejumlah partai politik yang terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. Partai milik organisasi zionis
2. Kelompok revisionis yang berhubungan dengan zionis diatas
3. Kelompok non zionis¹³²

Kelompok zionis dibagi lagi ke dalam partai-partai berikut ini:

1. Mapai (Miflagath Poalei Israel), Partai Buruh Sosialis, dengan anggota paling banyak dan paling kuat, dipimpin oleh David Ben Gurion.
2. Hashomer Hatzair, Partai sosialis sayap kiri, terbesar kedua, dan menginginkan negara dwibangsa Arab-Yahudi
3. Poalei Zion, kelompok sayap kiri yang kecil.
4. Zionis Umum, mewakili kalangan menengah dan profesional. Kelompok ini dibagi ke dalam faksi "A" dan "B". Faksi "A" mengikuti kepemimpinan Dr. Weizeman yang lebih progresif dan cenderung bekerja sama dengan sosialis, sedangkan faksi "B" lebih konservatif.
5. Mizrahi, suatu partai keagamaan orthodox dalam organisasi zionis, cenderung ke kanan dan menghendaki pendidikan agama.
6. Aliya Hadasha (partai imigran baru), yang dibentuk pada tahun 1942 oleh para imigran Jerman Austria, dan Cekoslovakia. Mereka melontarkan kritik terhadap kaum Zionis.
7. Ihud (persatuan), kelompok cendekiawan yang dipimpin oleh Magnes, Rektor Universitas Ibrani, Yerusalem, menginginkan negara dwibangsa di Palestina dan lebih banyak menyerahkan diri kepada supermasi Arab.¹³³

Kelompok pertama terdiri atas kaum Zionis yang telah melepaskan diri dari organisasi Zionis tahun 1935 dan membentuk organisasi Zionis baru di bawah pimpinan Vladimir Zhabothinsky. Kelompok ini disebut juga revisionis, menentang setiap politik moderat, dan menghendaki pendirian negara Yahudi atas seluruh wilayah Palestina dan Transyordania. Kelompok ketiga terdiri atas Yahudi

¹³² *Ibid.*, hlm. 54.

¹³³ *Ibid.*,

non-Zionis yang dipimpin dalam organisasi bernama Agushat Israel, aliran agama keras yang tidak berlandaskan politik.¹³⁴

Dari sekian macam bentuk partai politik ini, partai politik di Israel dapat digolongkan kembali menjadi dua golongan besar. Pertama Partai Buruh yang menguasai parlemen secara terus menerus sejak pemilu pertama tahun 1949 sampai dengan pemilu ke-8 tahun 1973, dan selama itu pula mereka menguasai pemerintah eksekutif. Secara resmi Partai Buruh Israel (Mifleget Ha'avoda Ha Israelit) baru berdiri pada 21 Januari 1968. Mereka merupakan aliansi beberapa Partai Buruh yang dulu bernama Mapai, Mapam, Ahud Ha'avoda Poale Zion, dan Rafi.¹³⁵

Kelompok kedua adalah partai Likud yang berjaya dalam pemilu ke-9 tahun 1977 dan ke-10 tahun 1981. Dalam dua periode itu, partai Likud berhasil menguasai pemerintahan Israel secara mutlak, kendati nama Likud baru muncul dalam pemilu 1973. Partai ini adalah gabungan dari beberapa partai yang dalam pemilu sebelumnya selalu menjadi rival Partai Buruh. Mereka adalah Herut, Gahal, Liberal, Shlomzion, dan Progresif.¹³⁶

Kedua kelompok ini selalu bersaing, bahkan terjadi sebelum Israel berdiri. Kelompok Buruh yang sudah ada sejak tahun 1920-an menghimpun pekerja Yahudi di Palestina dan para imigran Yahudi yang datang awal abad ini. Mereka menguasai kehidupan perekonomian warga Yahudi Palestina. Sementara Likud berasal dari imigran Yahudi Eropa yang datang pada tahun 1930-an. Mereka berimigrasi akibat tekanan dan kekejaman Nazi Jerman. Para pendatang baru ini terdiri dari orang-orang terpelajar dan kalangan menengah yang menimbulkan suatu kelas baru dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Maka persaingan dan perbedaan tidak dapat dihindarkan. Perbedaan ini tampak, misalnya, dalam menghadapi orang Arab Palestina. Orang partai buruh yang lebih lama berada di Palestina bisa menghargai kehidupan orang Arab. Sedangkan sebaliknya orang Likud ingin mengusir orang arab.¹³⁷

¹³⁴ Paul Findley, *Diplomasi Munafik Zionis Israel*, Bandung: Mizan, 2006, hlm. 239.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 240.

¹³⁶ Riza Sihbudi, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya, 1995, hlm.

11

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

Kelompok ketiga yang ikut dalam pergulatan politik Israel adalah partai-partai agama. Mereka antara lain adalah Mizrahi, Hapoal Hamizrahi, Agudat Israel, Poalei Agudat Israel, Front Agama Torah, Front Agama Nasional, Front Persatuan Agama, Partai Shas dan Partai Kach. Partai terakhir di bawah pimpinan Rabbi Meir Kahane ini adalah partai yang paling radikal dan rasialistis. Karena sikap itu, maka pada mulanya mereka dilarang ikut pemilu pada tahun 1948, tetapi akhirnya mereka memenangkan satu kursi Knesset setelah pengadilan tinggi mencabut larangan itu. Karena alasan yang sama, pada pemilu 1988 partai Kach dilarang ikut serta. Kelompok keempat adalah partai-partai arab. Mereka antara lain adalah Demokratik Arab, Arab Progresif, Petani Arab dan Persatuan Arab. Kelompok kelima adalah partai-partai komunis yang antara lain Rakah, Maki, Front Demokratik untuk Perdamaian dan Persamaan. Kelompok keenam adalah partai-partai gerakan independen. Mereka anatara lain adalah Sephardim, Organisasi Wanita Zionis Internasional (WIZO), Yemenitas, Haolam Hazah, Gerakan Pembela Hak Asasi, Gerakan Demokrastik Untuk Perubahan, dan Moked. Dari sekian kelompok dan nama partai, namun pertarungan yang sebenarnya terjadi setiap pemilu adalah antara Partai Buruh dan Likud. Yang lain hanyalah partai kecil yang kadang-kadang bisa menentukan kemenangan salah satu blok. Kedua partai besar itulah yang banyak berkiprah dalam kehidupan politik Israel.¹³⁸

Likud merupakan partai kanan nasionalis, cenderung radikal, dan anti perdamaian terhadap persoalan Palestina. Dalam *platform* Partai Likud disebutkan dengan gamblang bahwa Tepi Barat (Judea dan Samaria) dan Jalur Gaza merupakan wilayah Israel. Selain itu, dinyatakan pula dalam *platform* partai pendirinya tidak lepas dari sosok Jabotansky itu bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel yang tak terbagi. Artinya partai itu tidak mengakui keberadaan bangsa Palestina.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 114-115.

¹³⁹ Yahuda Luckacs, ed., *Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990*, New York: Cambridge University press, 1992, hlm. 277.

Tampilnya Likud dibawah Menachem Begin pada 1977, menurut Paul Findley, merupakan suatu gempa bumi dalam politik dan kebijaksanaan Israel. Kemenangan Begin menyingkirkan Partai Buruh pimpinan Ben-Gurion, yang telah memerintah Israel sejak kelahirannya pada 1948 dan menggantikannya dengan Zionisme Revisionis. Itu merupakan kemenangan nasionalisme atas arus utama Zionisme pragmatis dan sekular. Likud berjaya dari 1977 hingga 1992, kecuali selama periode 1984-1988, ketika ia berbagi kekuasaan dengan partai buruh.

Manifesto Partai Likud pada tahun 1973 mengatakan bahwa hak rakyat Yahudi atas *Eretz Yisrael* adalah abadi dan tidak terbantah.¹⁴⁰ Terjadi perbedaan selama beberapa dasawarsa antara faksi moderat dan sekular yang diwakili oleh Partai Buruh dengan Zionisme mesianik yang diwakili oleh Likud. Perbedaan tersebut diperlihatkan oleh kedua pemimpin mereka David Ben-Gurion dan Menachem Begin. Ben-Gurion biasa menyebut kaum Revisionis sebagai kelompok Nazi dan membandingkan Begin dengan Hitler. Sedangkan Begin dan para pengikutnya menyebut Ben-Gurion seorang pengkhianat Yahudi. Pejabat Partai Buruh menjalankan Zionisme yang manusiawi dan mau berkompromi serta menerima gagasan tentang pembagian Palestina pada tahun 1947 berikut rumusan pertukaran tanah untuk perdamaian sebagaimana termuat dalam Resolusi PBB 242. Akan tetapi, para pejabat Likud tidak mau melakukan kepura-puraan semacam itu. Prinsip utama dan menjadi penuntun dari kepercayaan mereka adalah klaim Yahudi atas *Eretz Yisrael*.

Begin berkuasa selama enam tahun dan tiga bulan antara tahun 1977 dan 1983. Sepanjang masa jabatannya Begin mencurahkan segenap energinya yang sangat besar untuk mengamankan seluruh tanah air bangsa Yahudi kuno bagi Israel serta membentuk suatu pemukiman Yahudi. Ada sekitar 50.000 orang Yahudi yang hidup di Jerusalem Timur milik Arab yang telah diduduki dan kira-kira 7.000 orang di empat puluh lima pemukiman di tempat-tempat lain di wilayah-wilayah pendudukan ketika Begin memangku kekuasaan. Ketika Begin meletakkan jabatan enam tahun kemudian, ada 112 pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan lima di Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan serta Jerusalem Timur milik

¹⁴⁰ Elfi Pallis, "The Likud Party: A Primer," *Journal of Palestine Studies*, Winter 1992, hlm.42.

Arab telah secara resmi dicaplok sebagai bagian integral Israel. Jumlah para pemukim Yahudi lebih dari 40.000 orang, belum termasuk perkiraan kasar kira-kira 100.000 orang Yahudi yang tinggal di Jerusalem Timur milik Arab.¹⁴¹

Begin berusaha dikenal sebagai orang yang menetapkan perbatasan-perbatasan *Eretz Yisrael* untuk selamanya. Eric Silver menyimpulkan *statement* tersebut dengan mengatakan bahwa prioritas Begin adalah mengamankan seluruh tanah air lama di bagian barat Yordania bagi bangsa Yahudi. Ketika Begin pensiun, bahkan para penentangannya mengakui bahwa dibutuhkan seorang pemimpin dengan dedikasi dan kekuatan yang kurang lebih sama untuk mengembalikan batas-batas pembagian itu. Israel yang diciptakan Menachem Begin dalam citranya sendiri lebih Yahudi, lebih agresif, dan lebih terisolasi.

Ketika Yitzhak Shamir menggantikan Menachem Begin pada 1983 dia bersumpah dalam pidato pengukuhanannya untuk melanjutkan “tugas suci” membangun pemukiman-pemukiman di Tepi Barat. Shamir memang menepati sumpahnya. Dia memacu laju pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan, dengan menjalankan aktivitas pemukiman paling besar dalam sejarah Israel.

Ketika Shamir dikalahkan pada 1992, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, jumlah pemukim yang ada telah berlipat ganda dibandingkan ketika dia baru meraih kekuasaan: 129.000 orang Yahudi di Jerusalem Timur milik Arab, dengan 155.000 orang Palestina, 97.000 orang Yahudi di 180 pemukiman Tepi Barat dengan separuh tanah sepenuhnya berada di bawah kontrol Yahudi, 3.600 orang di 20 pemukiman di Jalur Gaza, dan 14.000 orang di 30 pemukiman di Dataran Tinggi Golan.¹⁴² Kekalahan Shamir datang tepat ketika dia tengah terlibat dalam kampanye terbesar untuk pembangunan di wilayah-wilayah pendudukan. Suatu telaah oleh kelompok Israel Peace Now merujuk bahwa Israel telah memulai pembangunan 13.650 unit perumahan di wilayah-wilayah pendudukan pada Tahun 1991, satu penambahan dalam 1 tahun yang setara

¹⁴¹ Angka-angka tersebut merupakan bukti kuat bahwa Partai Buruh tidak menentang pemukiman. Para pejabatnya hanya kurang jujur saja mengenai keinginan-keinginan mereka. Lihat Yayasan untuk Pemahaman Timur Tengah, Report on Israel Settlement in the Occupied Territories, Laporan Khusus, Juli 1991. *Ibid.*,

¹⁴² Departemen Luar Negeri AS, Israeli Settlement in the Occupide Territories, Mei 1991, dikutip dari Report on Israeli Settlement in the occupide Territories, Yayasan untuk Perdamaian Timur Tengah 1992.

dengan 65 persen dari seluruh unit yang dibangun selama dua puluh tiga tahun sebelumnya di wilayah-wilayah tersebut.¹⁴³

4.3 Strategi Pemerintahan Konservatif Likud dalam Konflik Israel Palestina 1996-2003

4.3.1 Pembangunan Pemukiman Yahudi dan Pembuatan Tembok

Pembatas

Pemukiman-pemukiman Yahudi yang didirikan di atas tanah milik bangsa Palestina di wilayah-wilayah pendudukan menjadi rintangan serius bagi usaha mencapai perdamaian. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara spesifik menyatakan tidak sah perebutan wilayah dengan kekerasan, dan Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Masa Perang pada 1949 secara khusus melarang kekuatan pendudukan agar tidak memindahkan bagian dari pendudukannya sendiri ke wilayah yang didudukinya. Israel terus-menerus melanggar kedua perjanjian internasional ini. Sejak tahun 1967 Israel menduduki Jerusalem Timur Arab, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Jalur Gaza melalui tindak kekerasan dan pada saat yang sama terus mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di semua wilayah tersebut.¹⁴⁴

Resolusi Majelis Umum PBB yang dimaksud sebagai landasan berdirinya negara Israel adalah Resolusi MU-PBB No. 181 Tahun 1947 yang berisikan pembagian wilayah Palestina menjadi tiga yaitu:

1. Wilayah Yahudi mencakup 57% dari total tanah Palestina dan meliputi hampir seluruh area yang subur, dengan pertimbangan penduduk 498,000 orang Yahudi dan 497,000 orang Arab.
2. Wilayah Palestina mencakup 42% dari total tanah Palestina dan merupakan area berbukit, dengan pertimbangan penduduk 10,000 Yahudi dan 725,000 orang Arab.
3. Zona internasional meliputi Yerusalem dengan pertimbangan penduduk 100,000 orang Yahudi dan 105,000 orang Arab.¹⁴⁵

¹⁴³ Jackson Diehl, Washington Post, 27 Januari 1992. Lihat Peace Now, "Report Number Four of the Settlement Watch Committee" (Jerusalem and Washington DC), 22 Januari 1992.

¹⁴⁴ Paul Findley, *op. cit.*, hlm.260.

¹⁴⁵ Paul Findley, *Deliberate Deception-Facing the Facts about The US-Israeli Relationship*, New York: Lawrence Hill Books, 1993, hlm. 53.

Dalam fase berikutnya, wilayah Palestina terus menerus mengalami penyusutan menyusul perampasan dan kekalahan yang dialami dalam berbagai peperangan, hingga akhirnya dalam Perang 1967, seluruh wilayah Palestina diduduki dan dikuasai oleh Israel. Perbatasan sebelum Perang 1967 yang meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza tetap diakui oleh PBB dan dijadikan landasan dalam perundingan-perundingan yang dilakukan kemudian hari. Namun, pendudukan yang dilakukan oleh Israel segera diikuti dengan pendirian pemukiman-pemukiman baru kaum Yahudi yang semakin mempersempit wilayah Palestina.

Sebelum tahun 1948, hanya ada tujuh komunitas Yahudi di tanah-tanah pendudukan dan pemilikan tanah Yahudi hanya sekitar 1 persen saja. Pemukiman tersebut semakin bertambah seperempat abad kemudian. Pada tahun 1992, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan bahwa ada 129.000 orang Yahudi di Jerusalem Timur Arab, 970.000 orang Yahudi di 180 pemukiman di Tepi Barat dengan separuh tanah berada di bawah kontrol Yahudi sepenuhnya, 3.600 di 20 pemukiman di Jalur Gaza, dan 14.000 di 30 pemukiman di Dataran Tinggi Golan.¹⁴⁶ Menurut laporan lain, dalam jangka waktu seperempat abad, Israel telah menyita 55% dari tanah di Tepi Barat, 42 persen di Jalur Gaza, dan seluruh Dataran Tinggi Golan termasuk Yerusalem Timur, yang telah dicaplok oleh Israel dari kepemilikan bangsa Palestina. Seluruh sumber air berada di bawah kontrol Israel dan 30% air di Tepi Barat dialihkan ke Israel atau para pemukimnya.¹⁴⁷ Selain itu, kaum ultranasionalis Yahudi seperti anggota Ateret Kohanim, yang berusaha mengambil alih Temple Mount atau Haram Al-Syarif di Kota Tua Yerusalem, secara agresif bermukim di tempat itu. Pada 1992, atas dorongan pemerintahan Shamir, sekitar 600 pemukim Yahudi, terutama siswa seminari, tinggal di Kota Tua, yaitu di wilayah-wilayah Kristen, Armenia, dan Muslim.¹⁴⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa Israel tidak ingin melepaskan eksistensinya di wilayah Palestina. Hal ini tersirat dalam pernyataan mantan Menteri Perumahan dalam kabinet Shamir, Ariel Sharon.

¹⁴⁶ Kementerian Luar Negeri AS, *Israeli Settlements in the Occupied Territories*, Mei 1991, dikutip dalam Yayasan untuk Perdamaian Timur Tengah, *Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories*, Juli 1992. Lihat Paul Findley, *op. cit.*, hlm. 267.

¹⁴⁷ Walid Khalidi, "The Palestine Problem: An Overview," *Journal of Palestine Studies*, Musim Gugur 1991, hlm. 9-10. Lihat Paul Findley. *Ibid.*,

¹⁴⁸ Yayasan untuk Perdamaian Timur Tengah, *Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories*, Juli 1992. *Ibid.*, hlm. 268.

“Kami mencanangkan suatu cita-cita dalam diri kami sendiri untuk tidak meninggalkan satu lingkungan pun di Jerusalem Timur tanpa adanya orang-orang Yahudi. Inilah satu-satunya yang dapat memastikan adanya sebuah kota yang menyatu di bawah kekuasaan Israel.”¹⁴⁹

Pembangunan pemukiman Yahudi mulai intens dilakukan sejak Israel dipimpin oleh Partai Likud yaitu sejak tahun 1977. Aktivitas pembangunan pemukiman mencapai puncaknya pada tahun 1982. Antara tahun 1980 dan pertengahan 1981, Begin telah menyetujui pembangunan 21 pemukiman Yahudi sehingga total orang Yahudi yang tinggal di wilayah pendudukan menjadi 110.000 orang. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintahan Likud, antara tahun 1977-1992, untuk menarik minat orang-orang Yahudi untuk tinggal di wilayah pendudukan adalah dengan memberikan subsidi biaya hidup, menetapkan harga sewa yang murah, dan pajak yang rendah.¹⁵⁰

Perkembangan pemukiman Yahudi sangat pesat di Yerusalem Timur. Perkembangan pemukiman yang pesat tersebut tidak lepas dari upaya Israel untuk menyatukan Yerusalem. Hingga tahun 1993, orang Yahudi yang mendiami kota Yerusalem mencapai 197.000 orang, sedangkan warga Palestina hanya 68.000 jiwa. Israel terus mendesak keberadaan warga Palestina dengan memperluas wilayah pemukiman Yahudi di kota Yerusalem dan sekitarnya seperti Jabal Abu Ghneim, Talpiot, dan Givat Shapira. Pemukiman Yahudi di pinggiran Yerusalem Timur membentuk formasi bulan sabit mulai dari Kalandia di utara ke Gilo di Selatan sehingga mengisolasi komunitas Palestina di Yerusalem Timur dari wilayah-wilayah Tepi Barat lainnya.

Pembangunan pemukiman Yahudi mendapat protes keras dari masyarakat dunia. Pembangunan pemukiman Yahudi dinilai telah melanggar hukum internasional yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 khususnya pasal 49. Menurut konvensi tersebut, suatu negara dilarang menduduki wilayah lain untuk memindahkan warganya ke wilayah pendudukan tersebut.

Konvensi Jenewa Keempat membicarakan secara langsung masalah pemindahan penduduk dalam Artikel 49 yang mengatakan bahwa penguasa pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian dari

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ Dionnisius Elvan Swasono, *op., cit.*, hlm. 60.

penduduknya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemukiman kembali penduduk sipil Israel di wilayah-wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur adalah tidak sah. Opini lain juga dikemukakan oleh penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Hebert Hansell. Hansell secara resmi mengemukakan posisi hukum Washington, dengan mengatakan bahwa pemukiman-pemukiman itu tidak sesuai dengan hukum internasional. Opini ini juga menegaskan bahwa Konvensi Jenewa Keempat berlaku untuk Tepi Barat dan Gaza, meskipun Israel menyatakan sebaliknya sebab kekuasaan atas daerah-daerah itu masih diperselisihkan.¹⁵¹

Pembangunan 6.500 unit rumah dikawasan Har Homa alias Jabal Abu Ghneim telah ditunda oleh pemerintah Israel. Hal tersebut terasa berat bagi Netanyahu, sebab enam rencana perdamaian yang mengharuskan Israel mengizinkan berdirinya pemerintahan otonomi Palestina, menarik sejumlah pasukan Israel dari Tepi Barat, memberikan keleluasaan kepada tentara Palestina, membuka lapangan Gaza sebagai bandar internasional dan membatalkan pembangunan perumahan Yahudi di kawasan bangsa Palestina. Netanyahu mau tak mau harus menerapkan rancangan itu, mengingat Amerika bersama negara-negara Uni Eropa yang terlibat dalam penyusunan rencana itu tidak mau setengah-setengah. Langkah pemanasan yang dilakukan Inggris dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Robin Cook, seorang anti Israel.¹⁵²

Netanyahu melihat bahwa Robin Cook merupakan suatu ancaman bagi Israel karena Cook berjanji kepada Arafat akan menyuntikan dana untuk membiayai latihan tentara Palestina guna memerangi terorisme. Kemudian, Netanyahu meresponnya dengan mengatakan bahwa rencana pembangunan pemukiman Yahudi tetap dilanjutkan. Pernyataan Netanyahu itu ditanggapi sinis

¹⁵¹ Kantor Penasihat Hukum, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, *Digest of States Practices in International Law* 1978, 1575-83. Teks itu terdapat dalam Komite Dewan Mengenai Hubungan Internasional, "Israeli Settlement in the Occupied Territories: Hearings before the Subcommittee on the International Organization and on Europe and the Middle East of the Committee on the International Relations", Kongr. Ke-95, sesi pertama, 1978, 167-72, dan dalam Thorpe, *Prescription for Conflict*, 153-58. Kutipan-kutipan utama terdapat dalam Yayasan untuk Timur Tengah, *Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories*, Laporan Khusus, Juli 1991. Lihat Findley, *op. cit.*, hlm. 263.

¹⁵² Secara terus terang menumpahkan sikapnya yang anti Israel menolak suatu acara penting bagi tamu negara meletakkan karangan bunga di museum korban keganasan Nazi, Yad Vashem di Jerusalem, dan yang paling menghebohkan, ia nekad berkunjung ke kawasan Abu Ghneim, yang akan dijadikan sebagai lokasi perumahan kaum Yahudi yang berada dalam kekuasaan Palestina.

oleh sejumlah diplomat Eropa, karena mereka tahu bahwa Israel memang tidak ingin Eropa terlibat dalam proses perdamaian Timur Tengah, sebab dikhawatirkan bakal mempengaruhi Amerika Serikat yang selama ini membela kepentingan Israel. Sebagai mitra dagang Israel terbesar Uni Eropa tidak bisa dianggap remeh oleh Netanyahu. Jadi, mau tidak mau ia harus tunduk dan mengakui peran yang dimainkan oleh Uni Eropa. Dan itu berarti, ia harus memenuhi enam butir rancangan Perdamaian Timur Tengah.¹⁵³

Akan tetapi, kebekuan proses perdamaian Israel-Palestina yang sejak bulan Mei 1996 terhenti kini mulai mencair, karena sikap keras kepala Netanyahu dan enam koalisinya di kabinet maupun di Knesset yang selalu mengulur waktu dengan semboyan keamanan untuk perdamaian, kali ini luluh. Perundingan di tepi sungai Wye Maryland Amerika Serikat pada Oktober 1998 akhirnya ditandatangani juga. Isi dari perjanjian Wye River adalah:

1. Penarikan pasukan dari Tepi Barat. Israel harus menyerahkan 13 persen wilayah Tepi Barat kepada Palestina dalam tiga tahap.
2. Komite bersama untuk membahas penarikan pasukan Israel berikutnya dari Tepi Barat.
3. Kedua Pihak membicarakan hasil akhir mengenai Palestina, Pemukiman Yahudi dan Yerusalem.
4. Merevisi Palestine Liberation Organization (PLO) dimana Dewan Pusat PLO harus menghapus pasal anti-Israel dalam tiga bulan sejak dimulainya penarikan pasukan.
5. Jaminan keamanan dimana Otoritas Palestina harus memerangi militan bersenjata anti-Israel.
6. Jaminan keselamatan dimana Israel memberikan jaminan keselamatan berpergian kepada orang Palestina antara Jalur Gaza dan wilayah selatan dan utara di Tepi Barat.
7. Israel harus membebaskan 750 dari 3.500 orang Palestina yang telah ditahan selama tiga bulan.

¹⁵³ "Sodokan Robin Cook", *Gatra*, Jakarta, 28 Maret 1988.

8. Palestina harus menangkap 30 dari 36 orang yang terdaftar sebagai teroris.¹⁵⁴

Akan tetapi, sebelum perjanjian itu terlaksana, bahkan sebelum Perdana Menteri Netanyahu kembali ke Israel, perlawanan dari kubu militan sudah muncul. Sekelompok pemukim Yahudi, menutup sekitar puluhan persimpangan utama di Tepi Barat, sebagai protes atas kesediaan pemerintahan koalisi sayap kanan Israel menerima kesepakatan “tanah untuk perdamaian”. Perdana Menteri Netanyahu yang mengakui “Wye Memorandum” sangat menyakitkan bagi Israel dan merupakan hal terbaik yang bisa dicapai dalam kondisi buruk, langsung menerapkan strategi bertahan begitu tiba kembali di Israel. Untuk menghadapi “serangan” dari kelompok garis keras, partai-partai religius, dan para pemukim Yahudi di wilayah pendudukan, Netanyahu mengatakan bahwa Israel baru akan menyerahkan tambahan 13 persen wilayah Tepi Barat kepada Palestina bila sederetan kewajiban itu dilaksanakan. Musuh utama pelaksanaan Wye Memorandum adalah kelompok radikal Israel dan Palestina yang lebih mengandalkan dan lebih percaya pada kekuatan fisik.¹⁵⁵

Kemudian, masalah pendudukan ini diteruskan oleh Ariel Sharon. Setelah dilantik menjadi Perdana Menteri, salah satu program penting kabinet Sharon adalah perluasan baru pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Melalui Menteri Perumahan, Natan Sharansky, disampaikan program pembangunan 700 rumah baru bagi orang-orang Yahudi di Tepi Barat untuk menambah jumlah 200.000 warga Yahudi yang hidup di 145 pemukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza.¹⁵⁶ Program perluasan ini tentu saja mendapat tentangan keras dari Palestina dan menyulut terjadinya serangan dari beberapa kelompok militan. Di pihak lain, pada 8 Mei 2001, ratusan penghuni pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza menggelar unjuk rasa di depan kediaman Perdana Menteri Ariel Sharon di Yerusalem. Mereka memprotes ketidakberdayaan Sharon memberi keamanan pada mereka atas serangan-serangan militan palestina.

¹⁵⁴ “Menunggu Matahari Perdamaian Timur Tengah”, *Kompas*, 26 Oktober 1998.

¹⁵⁵ “Setelah Palestina-Israel Sepakat Berdamai, Muncul Muncul Dari Dalam”, *Media Indonesia*, Jakarta 27 Oktober 1998.

¹⁵⁶ Lalu Suryade, *Politik Kekerasan Israel di Bawah Perdana Menteri Ariel Sharon dalam Konflik Israel Palestina*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 47

Kemudian, Ariel Sharon melakukan aksi radikal pada tanggal 10 Januari 2002 dengan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di Kota Rafah, Jalur Gaza pada 10 Januari 2002. Penghancuran tersebut menyebabkan 500 orang warga kehilangan tempat tinggal. Dari dalam Israel, kecaman disampaikan Menteri Luar Negeri Shimon peres dan anggota kabinet lainnya dari Partai Buruh. Kecaman juga datang dari Menteri Ilmu Pengetahuan dan Budaya Matan Cilnai, dan surat kabar berpengaruh Haaretz. Sharon sendiri beralasan bahwa aksi tentaranya dilakukan untuk menghentikan penyelundupan senjata dan menghancurkan basis penyerangan kaum militan Palestina terhadap pasukan Israel.¹⁵⁷

Ariel Sharon juga mempertegas rencana Israel untuk membangun tembok pemisah. Tembok ini disebut pagar keamanan (*fence of security*) oleh pihak Israel. Tembok ini mulai dibangun pada 16 Juni 2002, dengan alasan untuk mengantisipasi masuknya orang yang melakukan aksi bom bunuh diri. Menteri Pertahanan Ben-Eliezer yang juga ketua Partai Buruh, memimpin dimulainya pembangunan tembok itu dalam sebuah perayaan di Kfar Salem, wilayah Arab di Israel yang terletak sekitar 12 km barat daya dari kota Tepi Barat, Jenin. Panjang tembok itu mencapai 280 mil, dengan biaya US\$ 1.6 juta permil, yang memotong Yerusalem Timur dari Tepi Barat dan dibangun jauh menjorok ke wilayah Palestina.

Pembangunan tembok pemisah Israel, yang dimaksudkan mencegah warga Palestina memasuki wilayah Israel untuk melakukan aksi bom bunuh diri, telah menimbulkan perdebatan hebat di kalangan kelompok-kelompok politik Israel. Menteri Pertahanan Benyamin Ben Eliezer, ketua Partai Buruh, dalam perayaan dimulainya proyek menyampaikan bahwa tembok pembatas ini adalah pagar keamanan, bukan pagar diplomatik atau politik. Pagar ini ditujukan hanya untuk mempertahankan jiwa rakyat Israel".¹⁵⁸

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁵⁸ Namun, kelompok politik sayap kanan melihat pembangunan tembok itu secara jelas menunjukkan niat Israel untuk kembali ke garis batas 1967 di setiap perundingan dengan Palestina. Proters tersebut disampaikan oleh Effi Eitam, pemimpin Partai Keagamaan Nasional yang anti perdamaian. Proters tersebut mewakili pandangan umum rakyat Israel yang melihat tembok itu sebagai gambaran kasar dari perbatasan masa depan dan negara Palestina.

4.3.2 Penguasaan Yerusalem

Status Yerusalem merupakan salah satu isu krusial dalam konflik Israel Palestina. Kota Yerusalem merupakan tempat yang disucikan oleh tiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 181 Tahun 1947 tentang Pembagian Wilayah Palestina, kota Yerusalem berada di bawah pengawasan Internasional atau yang disebut sebagai *Corpus Separatum*. Hal ini bermakna, Yerusalem merupakan sebuah kota yang terpisah dan tidak boleh dikuasai baik oleh bangsa Arab maupun Yahudi melainkan oleh suatu rezim internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Israel menerima pengaturan ini ketika menerima rencana pembagian dan juga ketika negara ini diterima sebagai anggota PBB pada 1949. Namun, Paul Findley memaparkan bahwa Israel secara konsisten selalu bertindak sebaliknya dengan menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota abadi bangsa Yahudi. David Ben-Gurion, seorang pemimpin Israel, mengatakan bahwa Jerusalem adalah jantung dari jantungnya Israel. Pada 10 Juli 1980, Israel secara resmi mencaplok kota Jerusalem dan menyatakan bahwa seluruh Jerusalem adalah ibu kota Israel.¹⁵⁹

Pada Juni 1989, dalam perjalanannya ke Konstatinopel Theodore Herzl berhenti sejenak di Sofia, ibukota Bulgaria. Herzl diterima oleh warga Yahudi setempat dengan seruan "*Next Year in Jerusalem*".¹⁶⁰ Jauh hari sebelumnya seorang penyair Rumania bernama Naphtali Herz Imber, mengarang sebuah puisi berjudul *Hatikvah (The Hope)* yang menjadi himne kaum Zionis, dan kelak menjadi lagu kebangsaan Israel. salah satu bait lagu kebangsaan tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Our hope is not yet lost
The hope of two thousand years,
To be a free people in our land
The land of Zion and Yerusalem.*¹⁶¹

¹⁵⁹ Paul Findley, *op. cit.*, hlm. 499.

¹⁶⁰ Seruan ini dalam berbagai kesempatan diulang kembali oleh Ariel Sharon. Martin Gilbert, *Israel: A History*, Black Swan, London, 1999, hlm. 12.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 7

(Harapan kita belum hilang
Harapan dua ribu tahun
Untuk menjadi sebuah bangsa yang bebas di tanah kita
Tanah Zion dan Yerusalem)

Baik Partai Buruh maupun Partai Likud sepakat mengenai Yerusalem. Hal inilah yang kemudian menjadi halangan bagi terciptanya perdamaian. Walaupun Partai Buruh bersedia melakukan perundingan damai dengan Palestina, tetapi perundingan tersebut harus terjebak dalam status Yerusalem. Zionisme dengan tegas mengatakan bahwa Yerusalem merupakan mutlak milik Israel. Di bawah pemerintahan Likud, Israel tidak mau memberikan konsensi apapun mengenai masalah Jerusalem.

Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ariel Sharon bahkan tidak melanjutkan proses perdamaian. Dari beberapa pernyataan politiknya, sebelum dan sesudah menjadi Perdana Menteri, Sharon menandakan obsesinya untuk menciptakan keamanan nasional, menjaga status tempat suci Yahudi, dan keamanan warga di wilayah-wilayah pemukiman di tanah pendudukan. Penegasan tersebut juga disertai komitmen untuk mempertahankan selamanya Yerusalem yang utuh sebagai ibukota abadi negara Israel. Dua hal ini, keamanan nasional dan status Yerusalem, adalah isu yang paling sensitif dan belum pernah terpecahkan dalam setiap perundingan damai sebelumnya. Baik perundingan dari pemerintah Partai Buruh maupun Partai Likud bersikukuh tentang status Yerusalem yang tak terbagi.

Bagi Palestina, Yerusalem Timur adalah hak dasar yang harus dikembalikan oleh Israel. Terhadap isu ini tidak ada perbedaan diantara faksi-faksi pejuang Palestina. Yerusalem Timur tidak hanya diinginkan oleh kelompok pejuang garis keras, namun kelompok moderat seperti pemerintahan Otoritas Palestina. Masalah depan kota Yerusalem Timur bahkan bukan semata-mata urusan Palestina tetapi juga bangsa Arab, Muslim, dan Kristen. Yasser Arafat tidak berani memberikan konsensi menyangkut kedaulatan kota Yerusalem.

Usai KTT Camp David, misalnya Arafat langsung meminta Liga Arab dan Komite Yerusalem OKI (Organisasi konferensi Islam) untuk menggelar sidang khusus guna menegaskan sikap mereka atas kedaulatan kota Yerusalem. Arafat juga mendatangi pemimpin gereja Khatolik di Vatikan untuk membahas status kota tersebut.¹⁶²

Partai Likud menganggap bahwa Jerusalem merupakan milik Israel dan tidak terbagi. Hal ini tertulis dalam *platform* partai likud yang mengatakan bahwa Jerusalem merupakan ibukota abadi Israel. Dalam Platform Partai Likud tertulis:

*Jerusalem is the eternal, united capital of the State of Israel and only of Israel. The government will flatly reject Palestinian proposals to divide Jerusalem, including the plan to divide the city presented to the Knesset by the Arab factions and supported by many members of Labor and Meretz. The government firmly rejects attempts of various sources in the world, some anti-Semitic in origin, to question Jerusalem's status as Israel's capital, and the 3,000-year-old special connection between the Jewish people and its capital. To ensure this, the government will continue the firm policies it has adopted until now.*¹⁶³

(Yerusalem adalah kekal, ibukota negara Israel yang satu dan hanya milik Israel. Pemerintahan akan menolak secara tegas proposal Palestina mengenai pembagian Yerusalem, termasuk rencana pembagian kota tersebut oleh faksi Arab di Knesset yang didukung oleh banyak anggota Buruh dan Meretz. Pemerintah secara teguh menolak usaha dari pihak manapun di dunia ini, sebagian berasal dari anti-Semit, untuk mempertanyakan tentang status Yerusalem sebagai ibukota Israel dan hubungan istimewa yang telah ada selama 3000 tahun antara bangsa Yahudi dan ibukotanya. Untuk meyakinkan ini, pemerintah akan meneruskan kebijakan tegas yang telah diadopsi sampai sekarang.)

Benjamin Netanyahu mengaplikasikan prinsip ini ketika dia menjadi Perdana Menteri Israel. Tanggal 18 Juni 1998, pemerintahan Israel memutuskan rencana perluasan kota Jerusalem dan akan menjadikan kota suci tiga agama ini sebagai *super municipality* atau apa yang mereka sebut *Greater Jerusalem*. Rencana perluasan tersebut dengan cara mengubah batas kota Yerusalem dan tidak hanya akan memasukan kota-kota di bagian barat Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan Israel, tetapi juga mencakup wilayah pemukiman Yahudi di

¹⁶² Mustafa Abd. Rahman, *Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2002, hlm. 171.

¹⁶³ http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback_knesset_eng.asp (diakses pada tanggal 12 November 2009)

Tepi barat yaitu di bagian utara, selatan dan timur kota Yerusalem yang merupakan wilayah Palestina.¹⁶⁴

Pemerintah Israel mengesahkan suatu resolusi tanggal 14 Mei 1999 yang berisi penolakan untuk menyerahkan setiap bagian dari wilayah Jerusalem Timur di bawah pengawasan Palestina atau di bawah pengawasan internasional. Israel tidak menerima setiap hal mengenai pembagian atau internasionalisasi Yerusalem, dimana wilayah tersebut secara eksklusif akan tetap berada di bawah kedaulatan negara Israel.

Prinsip ini kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan tokoh Likud selanjutnya yaitu Ariel Sharon. Seorang pengamat politik Israel Tore Kjeilen berpendapat, bahwa Sharon tidak pernah menyembunyikan pandangan dan tujuan politiknya. Ia selalu berdiri di atas pendiriannya sendiri, meskipun hal itu membuatnya tidak populer dan dicela. Kebijakan politik Sharon ditunjukan untuk menghancurkan infrastruktur Palestina, sembari mendeklarasikan perhatian penuh pada tercapainya keamanan nasional dan perdamaian.¹⁶⁵

Sikap keras Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibukota secara utuh tanpa kompromi dengan Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur dan kompleks Masjid Al-Aqsa, juga dipengaruhi oleh klaim-klaim teologis. Mereka menganggap bahwa Masjid Al-Aqsa didirikan di atas reruntuhan Solomon Temple atau Haikal Sulaiman. Gambaran-gambaran pilar kuno (*ancient pillars*) dari Haikal Kuil tersebut ditayangkan dalam situs khusus yang digunakan untuk penyampaian informasi perang melawan teror (*Israel Was Against Terror*).¹⁶⁶

Ada tiga versi tentang lokasi persis Salomon Temple. Pertama persis di bawah *Dome of the Rock* (Kubah Emas Masjid Al-Aqsa), anggapan ini disebut lokasi tradisional. Kedua, di sebelah utara kubah masjid, dan ketiga di sebelah selatan kubah masjid. Dikatakan lebih jauh:

¹⁶⁴ "Laporan Tahunan 1998-1999", Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman, Buku II, hlm. 48. Lihat Mustafa Abd. Rahman., *op.cit.*, hlm. 54.

¹⁶⁵ http://i-cias.com/cgi-bin/eo-direct.pl?sharon_ariel.htm (diakses pada tanggal 23 November 2009)

¹⁶⁶ <http://mideast-archive.co.nr/> (diakses pada tanggal 23 November 2009)

“The traditional site of the Temple is said to lie beneath or very near to Moslem shrine known as the Dome of the Rock. Certain historical accounts say that this building was built by the Moslems to overlay the location of the original Jewish Temple(s) and most rabbis in Israel today associate the original temple location with this site. Dr. Leen Ritmeyer has researched and written on the original 550 cubit square boundaries of the original Temple Mount site based on this assumption.”¹⁶⁷

(Situs kuil tradisional dikatakan tertanam atau berada di dekat tempat suci umat Islam yang dikenal dengan Kubah Batu. Catatan sejarah tertentu mengatakan bahwa bangunan ini dibangun oleh orang muslim untuk menutupi lokasi kuil Yahudi dan kebanyakan Rabbi di Israel mengaitkan lokasi kuil yang sebenarnya ada di situs tersebut. Dr. Leeb Ritmeyer telah meneliti dan menulis asumsi bahwa 550 meter kubik kuil Yahudi mengelilingi situs tersebut.)

Obsesi terhadap Temple Mount dengan jelas pula tergambar dari suat Ariel Sharon menjawab pertanyaan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Medeleine Albright tanggal 2 Oktober 2000, atas kunjungan ke kompleks masjid tersebut:

“I wish to emphasize, Mrs. Secretary, that Prime Minister Barak has already stated very clearly that every Israeli citizen, be it Arab or Jew, has a right to visit any place which is under Israeli sovereignty. The united city of Jerusalem, which you are all very familiar with, as well as the temple mount, are under full Israeli sovereignty. Neither I, nor any Israeli citizen, need to seek permission the PA or from any foreign entity to visit there or any other site which is sovereign territory of the states of Israel.”¹⁶⁸

(Saya menegaskan, Nyonya Sekertaris, bahwa Perdana Menteri Barak telah menyatakan secara jelas bahwa setiap warga Israel, baik orang Arab atau Yahudi, memiliki hak untuk mengunjungi tempat manapun yang termasuk didalam kedaulatan Israel. Kota Jerusalem, yang kau kenal dengan kuil suci, berada penuh di dalam kedaulatan Israel. Baik saya maupun warga Israel, tidak membutuhkan izin dari Otoritas Palestina atau dari lembaga luar negeri manapun untuk mengunjunginya atau situs lainnya yang termasuk kedaulatan teritorial Israel.)

Dalam artikelnnya dia juga mengatakan:

“...we still can control our destiny. United, I believe, we can win the battle for peace. But, it must be a different peace, one with full recognition of the rights of the jews in their one and only land: peace with security for generations and peace with a united Jerusalem and the eternal, undivided capital of the Jewish people in the state of Israel forever. You know, as Jews we have been praying for 2,000 years, “next year in Jerusalem”.”

¹⁶⁷ www.skullandcrossbones.org/articles/solomontemple2.htm. (diakses pada tanggal 23 November 2009)

¹⁶⁸ www.freeman.org/m_online/oct00/sharon.htm. (Diakses pada tanggal 23 November 2009)

Thanks God, we are in Jerusalem. Every year, every day, every night in Jerusalem. Forever in Jerusalem."¹⁶⁹

(...kita masih bisa mengontrol takdir kita. Saya percaya, kita dapat memenangkan peperangan untuk menciptakan perdamaian. Akan tetapi, hal tersebut pasti merupakan sebuah perdamaian yang berbeda, satu perdamaian dengan pengakuan penuh terhadap hak-hak bangsa Yahudi di satu dan satu-satunya tanah mereka. Perdamaian untuk keamanan generasi-generasi Yahudi dan keamanan dengan sebuah persatuan Yerusalem sebagai ibukota bangsa Yahudi yang tidak terbagi di negara Israel selamanya. Kalian tahu, sebagai bangsa Yahudi kita telah berdoa selama 2000 tahun, "tahun depan di Yerusalem". Bersyukur kepada Tuhan, kita ada di Yerusalem sekarang. Setiap tahun, setiap hari, setiap malam di Yerusalem. Selamanya di Yerusalem).

Ariel Sharon berbicara perdamaian dalam artikel di atas, dengan penegasan bahwa "*we can win the battle for peace*". Sebuah perdamaian dengan pra-syarat keutuhan tanah dan Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Sharon tidak menyebut kata "dialog" atau "berunding" dalam kalimatnya tersebut. Perundingan damai merupakan hal yang berat bagi Sharon karena tema-tema yang dinegosiasikan diantaranya menyangkut status Yerusalem. Bagi Sharon dan semua kelompok politik Israel, status Yerusalem sudah final sebagai ibukota abadi Israel dan tak terbagi. Berkompromi dengan Palestina tentang Jerusalem, dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Zionisme untuk kembali ke "zion" atau Yerusalem.

Pada masa pemerintahan Ehud Barak, Ariel Sharon melakukan tindakan radikal dengan mengunjungi kawasan Al-Aqsa di Jerusalem Timur, yang merupakan milik bangsa Palestina. Tindakan Ariel Sharon ini memicu terjadinya *intifadah* yang kedua atau yang biasa disebut dengan intifadah Al-Aqsa. *Intifadah*, yang berarti "pemberontakan" dalam Bahasa Arab, adalah nama untuk perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang Palestina, yang bersenjatakan batu-batu, melawan salah satu musuh terbesar dunia, yaitu orang yang menjawab lemparan batu itu dengan peluru, roket, dan rudal.

Selama tahun-tahun *Intifadah*, sebuah peristiwa terjadi di desa Kristen Beit Sahour di dekat Bethlehem. Kejadian ini, yang disaksikan oleh penduduknya Norman Finkelstein, hanyalah satu dari banyak contoh yang tidak mendukung

¹⁶⁹ New York Post, 14 Nov 2000, http://www.freeman.org/m_online/dec00/sharon.htm (Diakses pada tanggal 23 November 2009)

bahwa campur tangan militer didorong oleh keinginan membela diri. Suatu kali di kamp pengungsian Jalazoun, anak-anak membakar ban ketika sebuah mobil menepi.

"Pintu dibiarkan terbuka, dan empat pria (pemukim Israel maupun tentara berpakaian preman) melompat keluar, menembak membabi buta ke segala penjuru. Anak-anak di samping saya tertembak di punggungnya, peluru keluar dari pusarnya. Hari berikutnya *Jerusalem Post* melaporkan bahwa tentara itu menembak untuk membela diri."¹⁷⁰

Intifadah rakyat Palestina, yang dilakukan dengan sambitan batu dan kayu untuk melawan tentara paling modern di dunia, berhasil menarik perhatian internasional pada wilayah ini. Gambar-gambar mengenai kekejaman Israel terhadap anak-anak berusia sekolah sekali lagi menunjukkan kebijakan teror pemerintah pendudukan. Masa ini berlanjut hingga Kesepakatan Oslo tahun 1993, ketika Israel dan PLO duduk bersama di meja perundingan. Pada pertemuan ini, Israel mengakui Yasser Arafat untuk pertama kalinya sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina.

Setelah Intifadah pertama mencapai puncaknya dalam kesepakatan damai, rakyat menunggu dengan sabar perdamaian dan keamanan kembali ke wilayah Palestina. Penantian ini berlanjut hingga September 2000, ketika Ariel Sharon, yang dikenal sebagai "Penjagal dari Libanon," melakukan kunjungan yang menghebohkan ke Masjid al-Aqsa bersama puluhan polisi Israel. Kejadian ini memicu bangkitnya Intifadah al-Aqsa. Rasa sakit dan penderitaan tak berujung orang-orang Palestina meningkat dengan adanya Intifadah al-Aqsa.

Semenjak awal September 2000 hingga Desember 2001, Organisasi Kesehatan Palestina melaporkan bahwa terdapat sebanyak 936 orang Palestina tewas.¹⁷¹ Sepanjang pertikaian, satuan-satuan tentara Israel menjadikan banyak warga sipil, termasuk anak-anak yang pulang sekolah menjadi sasaran pengeboman dengan helikopter. Tentara Israel menggunakan senjata mereka bukan untuk melucuti senjata anak-anak Palestina, melainkan untuk membantai dan membunuh mereka.

¹⁷⁰ Ian Gilmour, "Israel's Terrorists," *The Nation*, April 21, 1997.

¹⁷¹ Health Development and Policy Institute, http://www.hdip.org/reports/Martyrs_statistics.htm.

Intifadah ini terlahir dari kekejaman Zionis Israel dan provokasi terhadap rakyat Palestina dan hal-hal yang kami anggap suci. Karena ikatan kuat rakyat Palestina terhadap tempat-tempat suci ini, khususnya Masjid Al-Aqsa, yang merupakan kiblat pertama Muslimin, mesjid mereka, dan salah satu titik pusat *Haram Asy-Syarif*, Israel menunjukkan tindak kekejaman.¹⁷²

Di Palestina, di mana 70% penduduk terdiri atas kalangan muda, bahkan anak-anak pun telah mengalami perpindahan, pengusiran, penahanan, pemenjaraan, dan pembantaian semenjak pendudukan tahun 1948. Mereka diperlakukan seperti warga kelas dua di tanahnya sendiri. Mereka telah belajar bertahan hidup dalam keadaan yang paling sulit. Menurut data yang didapat dijelaskan bahwa 29% dari orang yang terbunuh selama *Intifadah* al-Aqsa berusia di bawah 16 tahun, 60% dari yang terluka berusia di bawah 18, dan di wilayah tempat bentrokan paling sering terjadi, paling tidak lima anak terbunuh tiap hari, dan setidaknya 10 orang terluka.¹⁷³

Tentara Israel menjadikan warga sipil dan anak-anak sebagai sasaran. Mereka tidak ragu menembakan peluru kepada anak-anak yang tengah bermain di tempat bermain sekolah. Karena jam malam yang diberlakukan oleh Israel, dalam tahun itu mereka lebih sering tidak pergi ke sekolah. Ketika mereka bisa bersekolah, mereka menjadi sasaran serangan Israel. Salah satu serangan itu terjadi pada 15 Maret 2001. Sewaktu murid-murid Sekolah Dasar Ibrahim di al-Khalil tengah bermain selama jam istirahat, tentara Israel menembaki mereka.¹⁷⁴

Dalam *The Palestine Chronicle*, wartawan sekaligus penulis, Ruth Anderson menggambarkan beberapa bentuk kekerasan dalam Intifadah al-Aqsa. Dia menggambarkan tentang seorang lelaki muda yang baru menikah yang pergi berdemonstrasi hanya untuk menjadi martir, meninggalkan pengantin wanitanya menjadi janda. Tak ada yang menyebutkan seorang anak kecil berusia 8 tahun yang tertembak mati oleh tentara Israel. Kemudian dia mendeskripsikan bagaimana para pemukim Yahudi, yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata dan disokong oleh pemerintah Barak, menyerang desa-desa Palestina dan mencabuti pohon-pohon zaitun dan membunuh orang-orang sipil Palestina.

¹⁷² <http://www.tragedipalestina.com/intifada01.html>. (diakses pada tanggal 1 Desember 2009)

¹⁷³ *Ibid.*,

¹⁷⁴ Defence for Children International/ Palestine Section, lihat <http://www.dci-pal.org>. (diakses pada tanggal 1 Desember 2009)

Selain itu, dia menceritakan bayi-bayi Palestina yang meninggal ketika rumah mereka dibom dengan serangan udara atau orang yang dihujani oleh peluru Israel ketika dipindahkan ke tempat aman.¹⁷⁵

Untuk memahami kekerasan yang terus berlanjut di luar kendali pada bulan April 2001 dapat dilihat dari bagaimana *Intifadah* terakhir dimulai. Promotor peristiwa ini adalah Ariel Sharon. Ariel Sharon melakukan kunjungan ke Mesjid Al-Aqsa. Di bawah kawalan 1200 orang polisi, dia memasuki Mesjid al-Aqsa. Setiap orang, termasuk para pemimpin Israel dan rakyat Israel sepakat bahwa masuknya Sharon ke tempat suci ini, suatu perbuatan yang biasanya terlarang bagi non-Muslim, adalah sebuah provokasi yang dirancang untuk mempertegang keadaan yang sudah memanas dan memperbesar pertentangan. Ia jelas-jelas berhasil. Penentuan waktunya sama pentingnya dengan tempat itu, karena pada hari sebelumnya Ehud Barak telah mengumumkan bahwa Yerusalem mungkin dibagi dua dan dimungkinkan perundingan dengan orang-orang Palestina. Bagi Sharon, yang dengan keras mengkritik setiap jalan damai dan menolak berdebat untuk persoalan Yerusalem, semua ini adalah alasan yang dibutuhkannya untuk membuat kunjungan menentukan.¹⁷⁶

Hampir semua perundingan antara pejabat Israel dan Palestina tidak berhasil dilakukan dalam persoalan Yerusalem. Semenjak Israel didirikan di tahun 1948, berbagai pemecahan telah diusulkan untuk Yerusalem yang menyatakan kota Yerusalem yang netral dan bebas, kedaulatan bersama Israel dan Yordania, sebuah pemerintahan yang terdiri atas perwakilan semua agama, memberikan hak tanah pada warga Palestina dan udara serta hasil bumi untuk Israel, dan banyak usulan serupa itu. Namun, Israel menolak semuanya dan akhirnya merebut Yerusalem dengan kekuatan dan mengumumkannya sebagai “ibu kota abadi” Israel. Sepanjang Israel menolak menghapus kebijakan kekerasannya yang telah berkepanjangan, menarik dirinya dari Daerah Pendudukan, atau berunding dengan rakyat Palestina, kedudukan Yerusalem di masa depan dan semua masalah terkait lainnya tidak dapat dipecahkan.

Dengan kenyataan ini, belum lama ini para Zionis radikal telah melakukan banyak upaya untuk menghancurkan Mesjid Aqsa. Serangan pertama dilakukan

¹⁷⁵ Ruth Anderson, "Intifada Al-Aqsa and American Propaganda," *The Palestine Chronicle Online*, www.palestinechronicle.com.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

oleh Rabbi Shlomo Goren, pendeta pada Angkatan Bersenjata Israel, pada bulan Agustus 1967. Goren, yang kemudian menjadi kepala Rabbi Israel, memasuki tempat suci Islam itu dengan 50 pria bersenjata di bawah pengawasannya. Pada 21 Agustus 1969, Zionis melancarkan tembakan langsung ke mesjid tersebut, merusakkan sebuah mimbar yang terbuat dari kayu dan gading. PBB hanya merasa perlu mengutuk kejadian itu, sebuah serangan langsung atas tempat ibadah Islam.¹⁷⁷

Pada 3 Maret 1971, pengikut pemimpin radikal Gershon Solomon juga menjadikan Haram asy-Syarif sebagai sasaran. Meskipun mereka mundur setelah kontak senjata dengan tentara keamanan Palestina, mereka tidak kapok dan melancarkan lagi serangan serupa tiga hari berikutnya. Kemudian, pada 1980, sekitar 300 anggota kelompok teroris radikal Gush Emunim menggunakan senjata berat dan menyerang Mesjid Al-Aqsa. Dua tahun berikutnya, seorang Israel yang membawa paspor Amerika bergerak ke mesjid dengan senapan serbu M-16 dan menembakkannya pada orang Islam yang tengah sholat di sana. Setelah kejadian tragis ini, di mana dua orang Palestina tewas dan banyak lainnya terluka, tak seorang pun mempertanyakan bagaimana seorang lelaki bersenjata bisa menembus barikade tentara Israel. Pada tahun yang sama seorang murid dari pemimpin teroris keji Rabbi Meir Kahane menyerang mesjid ini dengan dinamit.¹⁷⁸

Cerita penyerangan seperti itu tidaklah berhenti di sini. Pada 10 Maret 1983, anggota Gush Emunim memanjat dinding Haram asy-Syarif dan mencoba menaruh bahan peledak. Para teroris ini diperiksa dan dibebaskan beberapa bulan kemudian. Segera setelah serangan ini, sekelompok teroris Yahudi radikal yang dipersenjatai dengan banyak alat-alat peledak termasuk lusinan granat, dinamit, dan 12 rudal mortar, mencoba meledakkan Mesjid al-Aqsa. Kemudian pada tahun 1996, Benjamin Netanyahu melakukan tindakan radikal dengan membuat terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa dengan alasan penelitian sejarah.¹⁷⁹

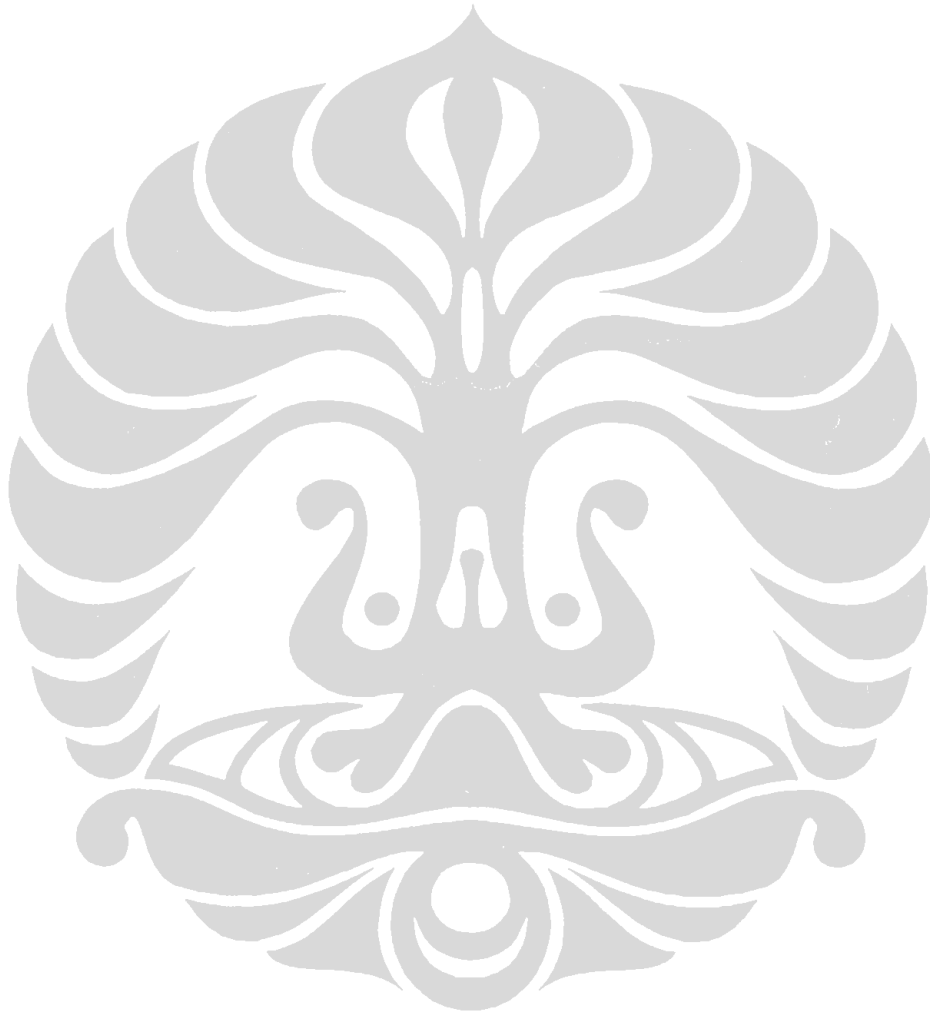
Kejadian yang disebutkan di atas hanyalah beberapa contoh tentang bagaimana Masjid Al-Aqsa sangat diperjuangkan oleh Israel. Perjuangan Israel ini

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁷⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

tentunya mendapat banyak halangan dari rakyat Palestina. Kunjungan Sharon pada tahun 2000 membuktikan bahwa Israel menganggap bahwa Israel memiliki kedaulatan atas Yerusalem. Kunjungan yang disertai dengan penggunaan militer oleh Israel telah kembali memicu reaksi rakyat Palestina yang sama-sama berpendapat bahwa Yerusalem merupakan tempat yang harus mereka perjuangkan.



BAB V

ANALISIS PENGARUH KONSERVATISME PEMERINTAHAN LIKUD TERHADAP KONFLIK ISRAEL-PALESTINA TAHUN 1999-2003

Konservatisme berarti menjaga atau mempertahankan tradisi yang dimuliakan oleh suatu bangsa atau negara. Istilah konservatisme itu secara tidak langsung menyatakan ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dasyat, penghormatan terhadap pranata dan aturan yang telah mapan, dukungan terhadap elit dan serta hirarkhi, serta ketidakpercayaan umum terhadap teori yang berlawanan dengannya. Semangat konservatisme menekankan pada asal-usul, tradisi dan pengalaman bersama, untuk memberikan landasan yang amat kuat bagi pembangunan dan kebebasan politik yang stabil.¹⁸⁰

Konservatisme Likud terkait dengan ideologi Zionisme Theodore Herzl mengenai *Eretz Yisrael* atau Tanah Israel. Likud berusaha agar konsep mengenai *Eretz Yisrael* terwujud. Konsep *Eretz Yisrael* ini menjadi keyakinan yang paling teguh dipegang oleh Partai Likud dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Likud tidak mempercayai bahwa jalur perundingan merupakan cara yang tepat untuk menciptakan suatu perdamaian. Jalur perundingan akan memberikan konsesi-konsesi yang akan mengganggu terwujudnya *Eretz Yisrael*.

Hal yang paling penting dalam membangun *Eretz Yisrael* adalah membangun pemukiman Yahudi di Israel. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan wilayah atau tempat untuk warga Yahudi Israel. Pembangunan pemukiman tersebut menjadi masalah karena Israel membangunnya di atas tanah pendudukan. Hal ini tentunya mendapat kecaman dari berbagai pihak, warga Palestina dan dunia internasional karena hal tersebut telah melanggar hukum internasional yang berlaku. Selain itu, masalah yang paling krusial adalah masalah status Yerusalem. Baik Likud maupun Partai Buruh sepakat bahwa Yerusalem merupakan kota yang tidak terbagi dan hanya milik Israel.

Jika dilihat dari tahapan konflik menurut Simon Fisher, maka pada masa pemerintahan Yitzak Rabin, konflik Israel-Palestina sudah masuk pada tahapan pasca konflik. Tahapan pasca konflik diindikasikan dengan berakhirnya

¹⁸⁰ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah Definisi, dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2007, hlm. 65.

konfrontasi kekerasan, turunnya tingkat eskalasi, dan terjalinnya hubungan kepada yang lebih normal diantara kedua pihak. Tahapan ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian damai Oslo pada tahun 1993 baik oleh pihak Israel maupun PLO.

Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak dapat diatasi dengan baik, tahapan ini sering kembali lagi menjadi situasi konflik. Hal ini terjadi ketika politik di Israel mengalami perubahan aktor pemerintahan. Pada Tahun 1996, Benjamin Netanyahu dari partai konservatif Likud berhasil menggantikan posisi Shimon Peres dari Partai Buruh. Berubahnya aktor menimbulkan perubahan kebijakan dalam konflik Israel-Palestina.

Jika pada masa pemerintahan Partai Buruh konflik Israel-Palestina menggunakan landasan *land for peace* maka pada pemerintahan Partai Likud landasan tersebut berubah menjadi *land for security*. Pemerintah Likud sangat mengutamakan keamanan negara Israel. Prinsip ini membuat proses perdamaian menjadi macet karena pemerintahan Likud, khususnya pada masa Ariel Sharon, tidak bersedia untuk duduk dalam suatu perundingan damai. Hal ini disebabkan Likud tidak ingin memberikan konsesi kepada Palestina. Menurut mereka, memberikan konsesi kepada Palestina akan menimbulkan ancaman instabilitas keamanan Israel.

Konflik kembali ke tahapan krisis saat kelompok radikal Palestina memberikan reaksi atas perubahan yang terjadi. Mereka menggunakan instrumen kekerasan dan bunuh diri sebagai bentuk reaksi atas perilaku pemerintahan Likud. Reaksi ini muncul karena dipicu oleh kebijakan pemerintahan Likud yang dianggap merugikan bangsa Palestina. Akibat dari reaksi ini, tingkat eskalasi kembali meningkat. Kekerasan kembali menjadi instrumen dalam konflik antara Israel dan Palestina. Oleh karena itulah perdamaian antara Israel dan Palestina kembali menemukan kemacetan.

5.1 Perubahan Landasan Perdamaian *Land For Peace* Menjadi *Land For Security*

5.1.1 Berorientasi pada Keamanan untuk Kepentingan Nasional Israel

Konservatisme berusaha untuk menjaga agar terciptanya suatu stabilitas politik yang baik dan terjaganya status quo. Konservatisme tidak terlalu menginginkan perubahan yang radikal karena hanya akan menimbulkan instabilitas. Hasil tindakan radikal dari waktu lalu dan waktu sekarang selalu tidak dapat diramalkan, tetapi mungkin lebih berakibat banyak penderitaan dan kesukaran dibandingkan dengan kesinambungan yang baik. Akibatnya, konservatisme sangat enggan untuk memprakarsai perubahan. Khususnya lembaga-lembaga masyarakat yang telah lama berdiri-gereja, struktur sosial-ekonomi, dan lembaga-lembaga politiknya- harus diperhatikan dengan penuh rasa hormat, dan unsur-unsurnya yang kecil diubah, kalau semuanya harus diubah, perubahan itu haruslah dilakukan dengan hari-hati.¹⁸¹

Sesuatu yang harus dijaga bagi konservatisme Israel adalah *Eretz Yisrael*. Menerapkan kebijakan *land for peace* telah menimbulkan suatu perubahan mengenai batas wilayah negara Israel. Kebijakan ini, bagi kaum konservatif, telah membuka jalan bagi bangsa Palestina untuk hidup di bumi Israel. Membiarkan bangsa Palestina untuk hidup di wilayah Israel bukan hanya akan merugikan Israel yang tidak bisa membangun pemukiman Yahudi secara maksimal, tetapi juga akan mengancam keamanan nasional negara Israel. Hal ini menjadi alasan mengapa para pemimpin Likud seperti Menachem Begin dan Yitzhak Shamir menolak Rencana Pembagian PBB 1947 karena rencana itu tidak memberikan seluruh tanah Palestina kepada bangsa Yahudi.

Begin mengatakan bahwa tanah air Israel tidak dapat dibagi-bagi. Baginya setiap usaha untuk memotong-motongnya adalah tindakan kriminal dan tidak sah. Orang yang tidak mengakui hak mereka atas seluruh tanah air ini berarti tidak mengakui eksistensi mereka. Dia juga menambahkan bahwa mereka tidak akan pernah menyetujui pembagian atas tanah air mereka.¹⁸²

¹⁸¹ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Press 1988, hlm 175.

¹⁸² Paul Findley, *Diplomasi Munafik Zionis Israel: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006, hlm. 112-113

Sejak Likud berdiri, para pembesar partai ini mencurahkan segenap energinya untuk mengamankan seluruh tanah air bangsa Yahudi. Prioritas Likud adalah mengamankan seluruh tanah air lama di bagian barat Yordania bagi bangsa Yahudi.

*“The Likud government will act with vigor to continue Jewish habitation and strengthen Israeli sovereignty in the eastern parts of the city, while emphasizing improvements in the welfare and security of the Arab residents. Despite protests from the left, the Likud government consistently approved the continuation of Jewish living within the Old City and in ‘City of David’.”*¹⁸³

(Pemerintahan Likud akan bekerja dengan giat melanjutkan pemukiman Yahudi dan memperkuat kedaulatan Israel di bagian timur kota itu, seraya menekankan pada perbaikan kesejahteraan dan keamanan penduduk Arab. Meskipun ada protes dari kubu kiri, pemerintahan Likud secara konsisten menyetujui kelanjutan dari pemukiman Yahudi di *Old City* dan di kota David)

Orientasi keamanan nasional ini juga terlihat dalam *platform* paratai Likud. Oleh karena itu, dengan menyetujui formula *land for peace* sama saja memberikan tanah Yahudi kepada bangsa Palestina dan hal tersebut akan menyulitkan bangsa Israel. Pertikaian antara bangsa Israel dan Palestina akan terjadi ketika laju perpindahan bangsa Yahudi ke Palestina semakin bertambah cepat. *Land for Peace* merupakan suatu landasan dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Landasan ini merupakan landasan utama dalam upaya menciptakan perdamaian diantara kedua belah pihak. Landasan *Land For Peace* dalam proses perdamaian Israel Palestina mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) No. 242 Tahun 1967 dan Resolusi DK PBB No. 338 Tahun 1973.

Intisari Resolusi DK-PBB No. 242 yang dikeluarkan tanggal 22 November 1967 adalah sebagai berikut:

1. Penarikan mundur Israel dari teritorial yang didudukinya dalam peperangan terakhir (*six day war*);
2. Penghapusan keadaan perang dan sikap bermusuhan, menghormati dan mengakui kedaulatan masing-masing wilayah, integritas teritorial, kemerdekaan politis setiap negara di Timur Tengah, serta hak mereka

¹⁸³ *Ibid.*, 116

untuk hidup damai dan bebas dari ancaman dan kekerasan dalam perbatasan yang diakui dunia internasional.¹⁸⁴

Sedangkan Resolusi DK PBB No. 338 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1973, intinya adalah:

1. Penghentian segera tembak menembak dan manuver militer;
2. Pelaksanaan segera resolusi DK PBB No. 242 Tahun 1967;
3. Perundingan segera demi terciptanya perdamaian yang langgeng dan adil.¹⁸⁵

Kampanye Partai Likud mengangkat isu keamanan sebagai pokok kampanye dengan mengangkat isu kegagalan Peres dalam mempertahankan keamanan, termasuk melindungi rakyat sipil Israel setelah penandatanganan perdamaian. Serangkaian kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras Palestina seperti Hamas, membuktikan kegagalan dan kelemahan Peres dalam menekan pemimpin Palestina, Yasser Arafat untuk menjamin hilangnya segala aksi kekerasan dan terorisme. Selain itu, keberadaan Hamas di Tepi barat dan Hizbullah di Lebanon Selatan serta Otoritas Palestina di Jalur Gaza membuktikan kepada sebagian besar masyarakat bahwa pengorbanan Israel untuk perdamaian hanya memberikan keuntungan bagi bangsa Arab saja tanpa diikuti adanya hasil yang seimbang bagi Israel yaitu jaminan keamanan yang maksimum.

Partai Likud memanfaatkan keterangan Peres yang mengatakan bahwa selama konflik Arab-Israel yang muncul sejak pendirian negara Israel tahun 1948, sikap Palestina telah berubah dengan melakukan penghapusan salah satu isi piagamnya yang menyatakan penghancuran Israel. Akan tetapi, bagi partai Likud yang konservatif, mempertahankan ideologi tradisional untuk mewujudkan negara Israel Raya yang mencakup seluruh wilayah yang dijanjikan yaitu mulai sungai Jordan sampai ke Laut Tengah termasuk Tepi Barat, merupakan hal yang penting untuk dipertahankan.

¹⁸⁴ Dionnisius Elvan Swasono, "Kebijakan Luar Negeri Israel Mengenai Penyelesaian Konflik Israel-Palestina pada Masa Pemerintahan Yitzhak Rabin (1992-1995)", Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 78.

¹⁸⁵ *Ibid.*,

Kampanye Partai Likud berhasil membangkitkan kecemasan mendasar bagi rakyat Israel bahwa Arab akan terus berusaha mengusir Israel dengan alasan bahwa tanah Israel saat ini sepenuhnya milik Arab. Dalam pidatonya saat dipilih menjadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan meneruskan usaha “perdamaian dan keamanan” dengan semua tetangga Arab-Israel dengan berusaha hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara Arab lainnya. Dalam pidatonya tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan Palestina mengenai Yerusalem. Dia juga menolak kedaulatan Palestina di Yerusalem Timur.

Konsep “*land for security*” kemudian dilanjutkan oleh Ariel Sharon. Kritik Sharon terhadap konsep “*land for peace*” sudah dikemukakan pada saat pemerintahan Ehud Barak. Dia memiliki obsesi untuk menciptakan keamanan bagi rakyat dan negara Israel. Hal ini diungkapkan dalam artikelnya yang berjudul “*I am for the lasting peace*”.¹⁸⁶

Sharon menyakini adanya perdamaian dan keamanan yang didasari oleh kekuatan dan kemenangan, bukan suatu harapan yang muncul dari meja perundingan. Hal inilah, menurut Lalu Suryade, yang menjadi alasan tindakan unilateral selalu menjadi pilihan terbaik. Di harian *Jerusalem Post*, pada tanggal 18 agustus 2000, Sharon yang menjabat sebagai ketua Partai Likud mengkritik kebijakan Pemerintahan Ehud Barak ketika itu. Artikelnya berjudul “*state in turmoil*” mengungkapkan kegusarannya tentang keamanan Israel:

*“in any viable democracy a Prime Minister who always vows to safeguard his country’s security, protect its holy sites and uphold its unity, and who then violates them, simply goes home. The Prime Minister violated his security promised and agreed to hand over the vital Jordan Valley to Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat. Ehud Barak has promised to keep and protect the holy shrines, but accepted the American ideas of handing over sovereignty of a large part of the Old City to the Palestinians; offering them control of the Temple Mount, an office for Arafat, and Free access without Israel inspection!”*¹⁸⁷

(Dalam jalannya sebuah demokrasi, seorang perdana menteri adalah seseorang yang selalu bersumpah untuk menjamin keamanan negerinya, melindungi situs sucinya dan mempertahankan kesatuannya, dan yang kemudian melanggarnya. Perdana Menteri melanggar janji keamanan dan bersedia menyerahkan hal yang vital, bukit Yordania, kepada pemimpin

¹⁸⁶ New York Post, 14 Nov 2000, http://www.freeman.org/m_online/dec00/sharon.htm

¹⁸⁷ http://www.freeman.org/m_online/sharon.htm

Otoritas Palestina, Yasser Arafat. Ehud Barak telah berjanji untuk mempertahankan dan menjaga kuil-kuil suci, tetapi menerima ide amerika untuk menyerahkan kedaulatan sebagian besar Kota Tua kepada orang-orang Palestina; menawarkan mereka kontrol terhadap *Temple Mount*, sebuah kantor untuk Arafat, dan kebebasan akses tanpa inspeksi Israel!)

Perubahan *land for peace* menjadi *land for security* akan membawa dampak bagi proses perdamaian Israel Palestina. Jika dikaitkan dengan kalah dan menang, maka Likud akan selalu berusaha memposisikan dirinya di pihak yang menang. Mereka menolak segala konsesi yang akan membuat mereka kalah seperti perundingan perdamaian Oslo dan Wye River. Kedua perundingan ini menuntut adanya pembagian wilayah yang sangat bertentangan dengan partai Likud. Aksi Ariel Sharon mengunjungi Masjid Al-Aqsa pada tahun 2000, merupakan tindakan yang ingin menandai bahwa tanah itu adalah milik Israel.

5.1.2 Meminimalisasi Jalur Perundingan sebagai Instrumen Perdamaian

Wallensteen dan Sollenberg mengungkapkan dengan sederhana bagaimana sebuah kondisi yang disebut perdamaian. Mereka mengatakan bahwa situasi damai berarti tidak ada kekerasan bersenjata. Sebuah pandangan konvensional mengatakan bahwa akhir dari sebuah perang adalah ketika satu pihak atau pihak yang lain memperoleh kemenangan militer, atau ketika kedua belah pihak sepakat untuk menarik diri. Tetapi, yang lebih sering terjadi, konflik bersenjata gagal berlanjut tanpa kemenangan militer atau sebuah penyelesaian semata-mata karena pihak-pihak yang bertikai tidak lagi menginginkan atau mampu melanjutkan pertempuran. Mungkin ada gencatan senjata tetapi pihak-pihak yang bertikai tetap tidak mampu mencapai kesepakatan.¹⁸⁸

Pada saat Israel berada di bawah kekuasaan Partai Buruh, situasi perdamaian seperti apa yang dijelaskan oleh Wallensteen dan Sollenberg terjadi dengan indikasi bahwa baik Israel maupun Palestina bersedia menjalankan kesepakatan Perdamaian Oslo. Akan tetapi, ketika Partai Likud berkuasa kesepakatan ini menjadi terhambat dan bahkan peluang usaha untuk melakukan kesepakatan damai menjadi kecil. Kondisi ini merupakan salah satu penghambat terjadinya suatu perdamaian.

¹⁸⁸ Hugh Miall, *op. cit.*, hlm. 265.

Benjamin Netanyahu maju sebagai Perdana Menteri dengan kemenangan tipis melalui formulasi “*land for security*”. Setelah itu kesepakatan Damai Oslo menjadi berantakan karena terbentur formulasi “*land for security*” yang sangat terkait dengan kepentingan nasional Israel. Netanyahu muncul dan mengakhiri jalur negosiasi antara Israel dengan dunia Arab. Netanyahu menentang kesepakatan damai yang dilakukan oleh Pemerintah Buruh dengan Palestina.

Harian *Kompas* pada tanggal 29 Mei 1997, mendeskripsikan penegasan mengenai penentangan tersebut. Dalam harian tersebut, dikatakan bahwa Benjamin Netanyahu menganggap bahwa kesepakatan damai akan mengakibatkan pembagian Yerusalem dan terciptanya negara independen Palestina yang selamanya akan mengancam keamanan Israel. Dengan keistimewaan sisi nasionalis dan sayap kanan, Benjamin Netanyahu berjanji tak akan melucuti satupun pemukiman Yahudi di kawasan Palestina. Netanyahu juga mendorong impian Zionis tentang Israel Raya.¹⁸⁹

Kebijakan Netanyahu kemudian mengundang reaksi dari PBB. Pada tanggal 23 sampai 25 Maret 1998, Kofi Annan mengunjungi Israel dan Palestina. Dalam kunjungan tersebut, Kofi Annan membahas mengenai kemacetan proses perundingan damai antara Israel-Palestina. Sekjen PBB ini telah mengingatkan Perdana Menteri Israel bahwa formula *land for peace* adalah landasan bagi perundingan dalam proses perdamaian. Sekjen PBB memahami apa yang menjadi tuntutan Israel dalam masalah keamanan dan mengenai masalah ini, Kofi Annan menghimbau Netanyahu agar tidak meminta terlalu berlebihan terhadap Arafat. Perlu diakui bahwa Arafat telah banyak berbuat untuk itu dan upaya itu harus dibantu. Ditegaskan oleh sekjen PBB bahwa perdamaian akan memperkuat keamanan dan keamanan akan memperkuat perdamaian, dan perlu diberikan jalan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁹⁰

Sehubungan dengan kecaman Sekjen PBB terhadap perluasan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, Perdana Menteri Netanyahu bertahan pada sikapnya yang antara lain mengemukakan bahwa tanah kosong yang

¹⁸⁹ “Setahun Netanyahu Berkuasa Perdamaian Timur Tengah Rusak”, *Kompas*, 29 Mei 1997.

¹⁹⁰ “Laporan Tahunan 1997-1998”, Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman, Buku II, hlm. 57. Dedy Jayadi Putra, “Politik Luar Negeri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Terhadap Perjanjian Wye River (1996-1999)”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000, hlm 52.

dipermasalahan itu berada di bawah pengawasan Palestina, tetapi memiliki dampak terhadap keamanan Israel. Dikatakan oleh Netanyahu bahwa bangsa Israel mencintai setiap jengkal tanah, batu dan pohon di wilayah itu. Oleh karena itu tidak mudah bagi Israel menarik diri dari wilayah tersebut. Penegasan Netanyahu ini ditanggapi oleh Kofi Annan, bahwa bangsa Palestina juga berpendirian sama yang mencintai tanah yang mereka diami selama ribuan tahun. Selama kunjungan di Israel, ketua Parlemen Israel, Dan Tichon dalam kesempatan ini telah mengkritik badan dunia tersebut. Dia mengatakan bahwa PBB telah mengambil strategi yang mengisolir Israel. Dia menyerukan agar resolusi-resolusi PBB mengenai Israel dihapuskan. Resolusi-resolusi ini dikecamnya sebagai sikap yang berprasangka dan bermusuhan terhadap Israel terutama yang menyamakan Zionisme dengan rasisme. Ini merupakan penghinaan dan penolakan terhadap hak Israel untuk hidup. Bahkan dikatakan oleh Tichon, bahwa PBB yang merupakan rintangan bagi hubungan Israel dengan Arab. Sekjen PBB menolak dengan halus kritik tersebut, dengan menghimbau agar Israel merubah pandangannya dan membuat tempat untuk dirinya di PBB.¹⁹¹

Proses perdamaian kemudian diusahakan Amerika Serikat dengan mengajukan sebuah rekomendasi. Pada tanggal 27-28 Maret 1998, telah terjadi dua kali pertemuan antara Amerika Serikat yang diwakili Denis Ross dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Utusan khusus Presiden Clinton tersebut sama sekali tidak berhasil meyakinkan pemimpin Israel untuk menerima usul Amerika Serikat agar melakukan penarikan diri wilayah Tepi Barat sebesar 13,1% dalam waktu tiga bulan. Netanyahu tetap tidak beranjak dari penawarannya yang hanya bersedia melakukan penarikan sebesar 9% dan tawaran ini dikatakannya telah ada peningkatan dari segi kualitas terhadap wilayah yang akan diserahkan kepada Palestina.

Penolakan itu dikaitkan dengan masalah keamanan, yang dikatakan bahwa apabila ia menerima usul Amerika Serikat tersebut, maka akan dapat merupakan bencana terhadap keamanan Israel yaitu terbukanya peluang serangan teroris terhadap wilayah-wilayah vital di Israel termasuk bandara Ben Gurion.¹⁹² Tanggal 18 Juni 1998, pemerintahan Israel memutuskan rencana perluasan kota Yerusalem

¹⁹¹ *Ibid.*, 53.

¹⁹² *Ibid.*,

dan akan menjadikan kota suci tiga agama ini sebagai *super municipality* atau apa yang mereka sebut *Greater Jerusalem*. Rencana perluasan tersebut dengan cara mengubah batas kota Yerusalem dan tidak hanya akan memasukan kota-kota di bagian barat Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan Israel, tetapi juga mencakup wilayah pemukiman Yahudi di Tepi Barat yaitu di bagian utara, selatan dan timur kota Yerusalem yang merupakan wilayah Palestina.¹⁹³

Paket perundingan ditawarkan Amerika Serikat menyatakan bahwa Israel harus menarik 10-15 persen pasukannya dari Tepi Barat. Akan tetapi, anggota parlemen berhaluan kanan ekstrem mengatakan kepada Netanyahu agar sang Perdana Menteri menolak usul penarikan mundur pasukan Israel dari Tepi Barat. Ancaman mereka, jika Netanyahu menerima desakan Amerika Serikat, maka dia akan kehilangan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan pemerintahannya akan segera bubar. Karena ada tuntutan dan ancaman para anggota koalisi berhaluan keras itu, maka Perdana Menteri Netanyahu tidak akan memenuhi permintaan Amerika Serikat. Sejak memerintah 18 bulan, Netanyahu tetap memperlihatkan sikap keras dan menghambat setiap proses menuju perdamaian yang sudah diamanatkan dalam Perjanjian Oslo I dan II.

Pemerintah Israel mengesahkan suatu resolusi tanggal 14 Mei 1999 yang berisi penolakan untuk menyerahkan setiap bagian dari wilayah Jerusalem Timur di bawah pengawasan Palestina atau di bawah pengawasan internasional. Israel tidak menerima setiap hal mengenai pembagian atau internasionalisasi Yerusalem, dimana wilayah tersebut secara eksklusif akan tetap berada di bawah kedaulatan negara Israel. Resolusi ini sebagai langkah untuk membantah pernyataan Uni Eropa pada awal bulan Maret 1999, bahwa berdasarkan hukum internasional Yerusalem ditetapkan dengan kedudukan terpisah dari Israel. Pernyataan Uni Eropa ini ditanggapi Israel dengan mengeluarkan resolusi tersebut dan dengan menyebutkan pula bahwa pernyataan tersebut merupakan fakta yang keliru dari pandangan hukum dan sama sekali tidak dapat diterima. Pihak oposisi dari partai buruh sebagaimana disampaikan oleh ketuanya Ehud Barak mengomentari

¹⁹³ "Laporan Tahunan 1998-1999", Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman, Buku II, hlm. 48. *Ibid.*, 54.

resolusi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Netanyahu tersebut sebagai suatu tipu muslihat.¹⁹⁴

Sebagai tokoh konservatif, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak tertarik pada proposal “*land for peace*” yang dianut oleh pemerintahan Partai Buruh pada Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Melihat hal ini, seharusnya Benjamin Netanyahu menolak segala bentuk perjanjian apapun dengan Palestina. Akan tetapi, pada Oktober 1998, Netanyahu mengambil keputusan untuk bersedia menandatangani suatu kesepakatan damai yang bernama *Wye River*.

Ketika ia menandatangani kesepakatan baru dengan Palestina, masyarakat internasional menyaksikan Netanyahu yang jauh berbeda, kesediannya menyerahkan tambahan 13% wilayah Tepi Barat, tentu merupakan perubahan sikap yang sangat mendasar bagi seorang tokoh sayap kanan seperti Netanyahu, sekaligus merupakan perjuangan batin yang sangat berat. Ia mengakui hal tersebut pada upacara penandatanganan *Wye Memorandum* di Gedung Putih, pada tanggal 23 Oktober 1998.¹⁹⁵

Penandatanganan tersebut bukanlah suatu indikasi bahwa pemerintahan Likud tidak konsisten pada paham konservatisme yang dianutnya. Netanyahu menandatangani perjanjian *Wye River* tersebut dengan setengah hati. Keputusan Netanyahu tersebut telah mengundang protes dari Knesset. Protes ini membuat kedudukan Netanyahu di pemerintahan menjadi terancam. Hal inilah yang memicu perilaku yang tidak konsisten Netanyahu terhadap perjanjian tersebut. Pada Konferensi Tingkat Tinggi di Eretz, kota perbatasan Israel dengan Jalus Gaza, pertengahan Desember 1998, Netanyahu telah mementahkan persetujuan *Wye River*. Netanyahu memberi tiga persyaratan baru kepada Arafat yaitu penyitaan senjata gelap yang beredar di wilayah otoritas Palestina, pengurangan jumlah polisi, penghentian hasutan kekerasan, dan pembatalan niat mengumumkan kemerdekaan Palestina. Tentu saja otoritas Palestina menolak persyaratan baru yang memang tidak menjadi bagian dari persetujuan *Wye River*.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Dedy Jayadi Putra, *op. cit.*, hlm. 55.

¹⁹⁵ “Netanyahu, Lain Dulu Lain Sekarang”, *Media Indonesia*, Jakarta, 30 Oktober 1998.

¹⁹⁶ “Lebih penting selamatkan kursi”, *Tempo*, Jakarta, 18 Januari 1999

Netanyahu tidak memperdulikan aksi penolakan Palestina. Baginya menyelamatkan kursi perdana menteri tentu jauh lebih penting daripada mengembalikan tanah rampasan ke rakyat Palestina. Tindakan tidak konsisten Netanyahu ini bisa dipahami karena ia terdesak oleh ancaman rekan koalisi di kabinet yang mengajukan rancangan undang-undang ke Knesset untuk mempercepat pemilu. Partai radikal sayap kanan menganggap Netanyahu telah berkhianat dengan memberi konsensi pengembalian wilayah pendudukan ke Palestina lewat perjanjian *Wye River*.

Reaksi dari sikap yang tidak konsisten ini antara lain adalah pengunduran diri Menteri Luar Negeri David Levy, diikuti oleh 5 orang pengikutnya dari anggota Geshet Party di Knesset, ancaman Menteri Pertahanan Yitzhak Mordechai apabila Netanyahu tidak menarik pasukan Israel dari Tepi Barat, serta ancaman kelompok garis keras dari Modelet Party yang melancarkan mosi tidak percaya apabila pemerintahan Netanyahu memutuskan untuk menarik pasukan Israel baik dalam jumlah maupun jadwal, membuat Netanyahu berada di persimpangan jalan.¹⁹⁷

Selain itu, dukungan terhadap Perdana Menteri Netanyahu pun semakin menipis, maka setiap ketegangan yang ditimbulkan sangat mungkin akan memancing anggota koalisi lain, seperti Modelet, untuk menarik dukungannya dari koalisi. Dan ini akan mengiringi koalisi menuju kebangkrutan total. Jika ini yang terjadi, maka tepatlah pernyataan pemimpin oposisi Ehud Barak, yakni pemerintahan Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan sampai tahun 2000, dan pemilihan umum yang baru akan segera dilaksanakan.¹⁹⁸

Perundingan, menuntut pengakuan terhadap Resolusi DK-PBB No. 242 dan 338 yang dijadikan landasan *land for peace* mengharuskan Israel menarik diri dari perbatasan pendudukan 1967. Sehingga kosekuensinya antara lain:

1. Terlepasnya Yerusalem Timur yang menurut ketentuan PBB, termasuk wilayah Palestina
2. Diakhirinya pendudukan atas Tepi Barat dan Jalur Gaza

¹⁹⁷ Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman, *Op., Cit.*, hlm. 48

¹⁹⁸ "Krisis Politik Israel dan Proses Perdamaian", *Suara Pembaharuan*, 6 Januari 1998.

3. Dikembalikannya pengungsi Palestina ke wilayah asalnya di Israel yang dapat mengubah dominasi komunitas Yahudi atas Arab Israel;
4. Dibongkarnya pemukiman Yahudi di tanah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza yang akan mendapat ganjalan luar biasa dari para pemukim;
5. Berdirinya negara Palestina merdeka, yang dapat menjadi ancaman masa depan Israel.¹⁹⁹

Tokoh Likud seperti, Perdana Menteri Ariel Sharon tidak mau berspekulasi dengan perundingan damai, karena ia menyadari setiap proposal resolusi konflik Israel-Palestina berkaitan dengan kosekuesnsi-kosekuensi tersebut. Termasuk yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Bagi Sharon, tanah yang dapat dimiliki oleh bangsa Palestina, adalah yang diberikan oleh Israel tanpa tekanan, yang dapat ditafsirkan “tanpa perundingan”. Pengembalian yang dilakukan kemungkinan adalah atas keputusan Israel secara unilateral. Keputusan membongkar sebagian pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan rencananya mundur dari Jalur Gaza, diambil secara sepihak oleh kabinet Israel pada Juni 2004.

Oleh karena itu, perundingan jalan damai bukan pilihannya, Sharon mengerahkan pasukan militer untuk menumpas sendiri infrastruktur teroris di tanah pendudukan. Sharon sudah tidak mempercayai Arafat dan pemerintahan otonominya untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok pejuang Palestina. Hal tersebut ditunjukkan untuk menciptakan *national security*, juga sekaligus memperlemah posisi politik Otoritas Palestina.

5.2 Eskalasi Konflik Antara Israel dan Palestina: Penggunaan Instrumen Kekerasan dan Bom Bunuh Diri

Upaya untuk menyelesaikan masalah ini diusahakan baik dari pihak Israel maupun pihak Palestina. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan dalam upaya tersebut. Seperti apa yang dijelaskan oleh Hugh Miall dalam buku *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, mengenai dilema strategis dalam proses perdamaian. Hugh Miall mengatakan bahwa hambatan bagi sebuah proses perdamaian hampir selalu dilematis. Pihak-pihak yang bertikai dalam konflik dengan kekerasan

¹⁹⁹ Dedi Jayadiputra, *op., cit.*, hlm 56.

berkeinginan untuk menang, dan karenanya mereka terkunci dalam sebuah proses interaksi strategis yang membuat mereka secara sangat sensitif bagi prospek kalah dan menang.²⁰⁰

Setiap konsesi melibatkan landasan politik yang diabaikan, maka dari itu setiap penarikan dari posisi yang telah diduduki dalam waktu lama merupakan hambatan yang menyakitkan. Jalan keluar yang diperlukan untuk dilema ini adalah dengan sepakat untuk bergerak bersama-sama ke arah pilihan penyelesaian damai dan karenanya mencapai sebuah pilihan dimana sebelumnya mereka masing-masing lebih menyukai konflik untuk dilanjutkan. Agar dapat melakukan hal ini, pihak-pihak yang bertikai harus menciptakan rasa saling percaya yang memadai, atau menjamin bahwa mereka akan mendedikasikan diri mereka sendiri pada apa yang mereka janjikan. Bagi kedua belah pihak, ada resiko bahwa yang lain akan mengingkari kesepakatan yang pernah ada. Satu cara membuat komitmen bagi para pemimpin kedua belah pihak adalah dengan mengunci keberuntungan politik personal mereka dengan begitu kuatnya untuk satu pilihan dimana mereka tidak dapat melewati jalan yang lain tanpa lebih dahulu mengundurkan diri.²⁰¹

Akan tetapi, dalam proses perdamaian Israel-Palestina terdapat suatu ketidakpercayaan bagi kelompok radikal bahwa upaya perdamaian tersebut akan membawa hasil yang menguntungkan bagi negara mereka masing-masing. Akibatnya, mereka lebih memilih menggunakan jalan kekerasan untuk mendapatkan kepentingan nasional mereka. Kelompok radikal yang dimaksud dalam konflik Israel-Palestina adalah pemerintahan Likud dari pihak Israel dan Hamas dari pihak Palestina. Kedua kelompok ini memilih menggunakan aksi kekerasan dalam menanggapi kebijakan satu dengan yang lainnya.

Semenjak awal, sebetulnya perjuangan kelompok radikal Palestina seperti Hamas adalah untuk mengakhiri pendudukan Israel di atas tanah Palestina. Perjuangan tersebut ditempuh dengan Jihad, yaitu perjuangan dengan melalui gerakan politik, kesejahteraan sosial, dan perlawanan militer. Hamas mengkombinasikan pesan-pesan religiusnya dengan reformasi sosial. Jihad hamas

²⁰⁰ Hug Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 264-266.

²⁰¹ *Ibid.*,

adalah dalam rangka membela hak-hak Palestina.²⁰² Seiring dengan meningkatnya kekerasan diantara kelompok pejuang palestina dengan Israel, peranan pemerintah Otoritas Palestina semakin berkurang. Popularitas Yasser Arafat sebagai sosok pelindung bangsa Palestina cenderung menurun dan tergantikan oleh Hamas. Arafat lebih sebagai simbolis kesatuan Palestina dibandingkan sebagai penentu arah gerakan perjuangan pembebasan Palestina itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Arafat tidak bisa mengontrol dan menghentikan aksi-aksi kekerasan.²⁰³

Johan Galtung, penemu disiplin dari studi perdamaian dan konflik, mengatakan bahwa sebuah kontradiksi dapat dialami sebagai frustrasi, dimana tujuan dihambat oleh sesuatu, yang menimbulkan agresifitas sebagai sebuah sikap dan menimbulkan perilaku agresif pihak lain. Perilaku agresif dari pihak lain dan akan menimbulkan kontradiksi baru pada puncak kontradiksi lama, dan mungkin memicu lebih banyak agresivitas dan agresi dari semua pihak terkait. Kekerasan melahirkan kekerasan, segitiga kekerasan menjadi proyeksi sebuah spiral kekerasan yang bersifat seperti api, akan berhenti ketika sebuah rumah terbakar habis.²⁰⁴

Bom bunuh diri awalnya dilakukan oleh kelompok kanan Palestina yang tidak setuju dengan kesepakatan Oslo dan proses-proses perdamaian berikutnya yang lebih menguntungkan Israel dan pemberian konsensi terlalu besar oleh pihak otoritas Palestina. Faksi kanan Palestina tersebut adalah kelompok Hamas dan Jihad Islam. Namun dalam perjalanannya, aksi bom bunuh diri juga dilakukan oleh sayap militer Fatah pimpinan Yasser Arafat, Brigade Al-Aqsa, Gerakan Pemuda Fatah pimpinan Marwan Bargouti, Tanzim yang merupakan satuan elit pengawal Yasser Arafat, Force 17, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang merupakan kelompok kiri Palestina.²⁰⁵

Perjuangan rakyat Palestina terhadap pendudukan dan penjajahan Israel dipicu oleh aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel sendiri, serta kelompok garis keras Israel. Ketika pembangunan pemukiman Yahudi seperti Har Homa pada bulan Maret 1997 dilaksanakan, protes warga Palestina berlangsung,

²⁰² *Ibid.*, hlm. 124-126.

²⁰³ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban, Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 33.

²⁰⁴ Hugh Miall, *op. cit.*, hlm 118.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 298.

dan militer Israel menghalau protes tersebut dengan kekuatan militer yang menimbulkan korban tewas berjatuhan.²⁰⁶ Peristiwa lain adalah munculnya *intifadah* Al-Aqsa yang tidak lain adalah dipicu oleh kunjungan Ariel Sharon yang memasuki kawasan Masjid Al-Aqsa pada tanggal 28 September 2000.

Kemenangan Ariel Sharon dalam Pemilu 6 februari 2001 atas Ehud Barak dianggap oleh para analisis politik Internasional sebagai wujud protes rakyat Israel terhadap situasi yang penuh dengan ketidakamanan akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Semula, perlawanan militan Palestina dalam Intifadah tahun 1987 dilakukan dengan pelemparan batu kepada pasukan Israel, fase berlawanan berikutnya berkembang dengan kontak senjata terbatas antara gerilyawan Palestina dengan pasukan Israel dan peluncuran rudal Palestina yang disebut “Al-Qassam”. Dalam *intifadah* kedua, aksi militan Palestina menggunakan sarana baru yaitu bom bunuh diri (*suicide bombing*) yang mereka sebut dengan “Bom Syahid”.²⁰⁷

Ariel Sharon menghadapi tekanan dan kritikan dari dalam negara dan dunia internasional atas tindakan tentara Yahudi yang membongkar rumah warga Palestina di kota Rafah, Jalur Gaza pada 10 Januari 2002. Penghancuran rumah-rumah tersebut menyebabkan 500 orang warga kehilangan tempat tinggal. Dari dalam Israel, kecaman disampaikan Menteri Luar Negeri Shimon Peres dan anggota kabinet lainnya dari partai buruh. Kecaman juga datang dari Matan Vilnai, Menteri Ilmu Pengetahuan dan Budaya Israel yang memiliki pengaruh besar di Haaretz, sebuah harian terkemuka di Israel. Sharon sendiri beralasan bahwa aksi tentaranya dilakukan untuk menghentikan penyelundupan senjata dan menghancurkan basis penyerangan kaum militan Palestina terhadap pasukan Israel.²⁰⁸

Di tengah kecaman berbagai pihak, gaya agresif Ariel Sharon mendapat dukungan dari Dinas Keamanan Domestik Israel, Shin Beth. Pada 20 Januari 2002, Shin Beth mengajukan proposal kepada kabinet Sharon untuk mencabut

²⁰⁶ Musrafa Abd. Rahman, *Dilema Israel antara Krisis Politik dan Perdamaian*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hlm. 55.

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

²⁰⁸ Lalu suryade, *Politik Kekerasan Israel di bawah PM Ariel Sharon dalam Konflik Israel-Palestina: Analisis sejak intifadah II hingga pemilu 2003*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 49.

larangan orang Yahudi mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, larangan berkunjung ke Haram Al Sharif tersebut diberlakukan menyusulnya bangkitnya perlawanan *Intifadah* Al-Aqsa.²⁰⁹

Pada tanggal 1 Februari 2002, lembaga militer Israel pada tanggal diguncang oleh makin meluasnya gerakan anti pendudukan Palestina di kalangan anggotanya. Natan direktur Shin Beth, Ami Ayalon menyerukan agar pasukan Israel yang ditugaskan di wilayah Palestina tidak mematuhi perintah yang ilegal. Seruan tersebut disambut oleh lebih dari 60 pasukan dan perwira cadangan Israel. Mereka menandatangani surat terbuka yang isinya menolak bertugas di wilayah Palestina. Perintah yang diberikan kepada tentara, dianggap sebagai hal yang menunjukkan radikalisme Israel terhadap rakyat Palestina. Dalam surat yang disampaikan dan ditegaskan bahwa tanah pendudukan bukan bagian dari tanah Israel, dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza harus dibongkar. Aksi sebagian kalangan militer Israel ini, dituduh sebagai bagian dari gerakan kampanye politik oleh kepala staff angkatan bersenjata Israel, Shaul Mofaz.²¹⁰

Dari kalangan sipil, muncul aksi unjuk rasa ribuan warga Israel yang cinta damai di Tel Aviv pada 17 Februari 2002. Aksi tersebut dimaksudkan untuk mendesak Perdana Menteri Ariel Sharon mengakhiri pendudukan atas wilayah-wilayah Palestina. Sebagian besar pengunjung rasa berasal dari anggota partai sayap kiri dan kelompok cinta damai seperti *Peace Now*. Unjuk rasa dilakukan di Taman Rabin, tempat yang diberi nama untuk mengabdikan bekas Perdana Menteri Israel yang terbunuh, Yitzak Rabin.

Pada waktu yang bersamaan, seorang militan Palestina meledakan dirinya di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Aksi pemboman tersebut menewaskan dua remaja Israel tersebut dibalas dengan serangan jet tempur F-16 terhadap berbagai sasaran. Sasaran-sasaran serangan balasan Israel antara lain kantor utama gubernur Nablus, markas besar polisi Palestina, kantor Front Rakyat Bagi Pembebasan Palestina, dan sebuah gedung milik Yasser Arafat. Serangan Israel, dibalas dengan empat rangkaian serangan

²⁰⁹ *Ibid.*,

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 49-50.

bom bunuh diri militan Palestina yang menewaskan 21 warga Israel dan 11 warga Palestina.²¹¹

Setelah rangkaian peristiwa pengeboman itu, para menteri dan pejabat keamanan Israel menyetujui peningkatan tekanan militer terhadap Palestina. Akan tetapi, media massa Israel masih menganggap pemerintah tidak berdaya, putus asa, dan tanpa arah.

Media Israel mengadakan jajak pendapat. Rilis yang dilakukan oleh surat kabar, *Yediot Athornot*, menyebutkan 76% warga Israel kecewa dengan cara-cara yang dilakukan oleh Perdana menteri Ariel Sharon menangani persoalan-persoalan keamanan di Israel. 72% responden mengaku bahwa Sharon sama sekali tidak memenuhi harapan mereka akan jaminan keamanan. Mereka kecewa, karena selama 17 bulan setelah aksi *intifadah* al-Aqsa, telah menjatuhkan korban 300 warga Israel dan 1000 warga Palestina. Jajak pendapat serupa juga dirilis oleh surat kabar Israel lainnya, yaitu *Maariv*. Dalam jajak pendapat yang diselenggarakan oleh koran *Yedioth Ahronoth*, 55% responden mengatakan bahwa Sharon tidak memiliki program politik untuk menghentikan gelombang *intifadah* rakyat Palestina yang sudah berjalan selama 22 bulan. Dalam jajak pendapat itu pula ditegaskan bahwa 60% responden tidak yakin Sharon bisa mengatasi terorisme. Meski begitu, 57% responden yang terdiri atas kaum Yahudi dan Arab Israel itu tetap mempercayakan pemerintahan Israel kepada Sharon.²¹²

Sikap kritis media dianggap sebagai sebuah sinisme terhadap pemerintahan Ariel Sharon. Sikap ini kemudian ditanggapi oleh pemerintahan Ariel Sharon secara tegas. Pada Juni 2002, Menteri Komunikasi Israel Reuven Rivlin menegur jaringan berita televisi CNN (*Cable News Network*) dan BBC (*British Broadcasting Corporation*) karena dinilai menyudutkan negara Israel dan menganggapnya sebagai juru bicara Yasser Arafat, karena memberikan porsi pemberitaan yang lebih besar kepada pihak penyerang ketika aksi bom bunuh diri terjadi. Bukan hanya itu, dia juga mengancam akan memblokade siaran kedua media tersebut.²¹³

²¹¹ *Ibid.*, hlm 50.

²¹² *Ibid.*, hlm. 51.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 52.

Pada bulan yang sama, Ariel Sharon merencanakan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza. Pada 23 Juni 2002, sidang kabinet Israel memutuskan untuk mengusir dan mengasingkan keluarga pelaku bom bunuh diri dari Palestina. Dalam waktu yang sama, kebijakan mengizinkan tentara Israel memasuki dan melakukan operasi di kota-kota Palestina sudah mulai dilakukan, dengan masuknya pasukan lapis baja Israel ke kota Qalqilya, dan menduduki sejumlah lokasi penting di barat laut Tepi Barat. Sejalan dengan keputusan kabinet Israel tersebut, pada 12 Agustus 2002, sebuah pengadilan militer Israel menyetujui pengusiran tiga keluarga Palestina yang terlibat kegiatan terorisme, dari tepi Barat ke Gaza. Pengusiran ketiga keluarga Palestina ini dianggap sebagai suatu taktik baru untuk mengecilkan nyali warga Palestina agar tidak melakukan serangan-serangan terhadap Israel.²¹⁴

Dari daftar pelaku bom bunuh diri yang diberikan *Newsweek* sepanjang 2001-2001, terungkap bahwa mereka seluruhnya adalah anak-anak muda. Diantara mereka juga terdapat gadis-gadis muda seperti Ayat Akhras, berumur 16 tahun, yang tewas dalam aksinya pada 29 Maret 2002. Selain Akhras, juga ada Idris Wafa 28 tahun yang merupakan gadis pelaku “kamikaze” pertama. Ia tewas dalam aksinya pada tanggal 27 Januari 2002, dan mendapat julukan “Joan d’Arc” bagi bangsa Palestina.²¹⁵

Motivasi melakukan aksi bom bunuh diri warga Palestina, sebagai mana diungkapkan dalam surat wasiat pelaku, antara lain karena cinta kepada Allah, membela Masjid Al-Aqsa dan balas dendam atas tewasnya warga Palestina di tangan Israel. Hal ini diungkapkan oleh Jamal Nasser yang meledakan dirinya di dalam bis dekat kota Jenin pada Maret 2001. Zaidan Zaidan, warga Palestina yang gagal meledakan dirinya pada sasaran yang ditetapkan mengaku terpaksa melakukan serangan bunuh diri karena balas dendam melihat tentara Israel melecehkan kaum wanita Palestina dan menelanjangi mereka di tengah keramaian.²¹⁶

²¹⁴ *Ibid.*,

²¹⁵ Azyumardi Azra, *op., cit.*, hlm. 31.

²¹⁶ Mustafa Abd. Rahman, *op., cit.*, hlm. 62.

Aksi-aksi bom bunuh diri juga dilakukan oleh kelompok Hamas. Akan tetapi, Hamas memiliki landasan yang lebih prinsipil, sesuai dengan garis politik Hamas yang menyangkut operasi militer. Prinsip-prinsip pokok tersebut dijelaskan sebagaimana yang tertera dalam piagam maupun pernyataan resmi pimpinannya, antara lain:

- a. Membatasi operasi bersenjata di tanah pendudukan dan konsisten tidak akan melancarkan sasaran militer terhadap Israel di luar negeri;
- b. Hanya mengarahkan serangan bersenjata terhadap sasaran militer, dan bukan sasaran sipil. Pada awalnya Hamas konsisten dengan prinsip yang kedua ini. Namun semenjak pembantaian ekstrimis Yahudi, Baruch Goldstein yang membawa korban Palestina yang sedang menjalankan shalat subuh di Masjid Ibrahim, Hebron, sasaran operasional tidak lagi memisahkan sipil dan militer.
- c. Hamas selalu mengaitkan tindakan kekerasannya dengan aksi kekerasan yang dilancarkan Israel sebelumnya. Sebagai contoh, ledakan bom bunuh diri di Yerusalem Ashkelom dan Tel Aviv pada Maret 1996 yang menelan korban 60 warga sipil Israel tewas dalam sepekan, adalah sebagai aksi balas dendam terhadap tewasnya Yahya Ayyas, pemimpin mereka, pada Januari 1996 oleh Shin Beth.
- d. Aksi kekerasan yang dilakukan Hamas juga dikaitkan dengan keputusan politik Israel seperti berkaitan dengan pembangunan pemukiman Yahudi, atau tekanan terhadap para pekerja Palestina. Sebagai contoh, ledakan di Pasar Kahane dikaitkan dengan pembangunan pemukiman Har Homa dan Ras el-Amud.²¹⁷

Aksi bom bunuh diri telah menimbulkan konflik di luar militer dan meluas ke jalanan. Hamas telah menyerang rasa kerentanan dan teror ke tengah masyarakat Israel. Karena begitu efektifnya penggunaan kekerasan, maka penggunaan instrumen tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya kekerasan, pemboman, serangan rudal, dan pembunuhan terhadap para pemimpin Palestina yang dilakukan oleh pemerintah Ariel Sharon. Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, seorang pemimpin senior, meyakini bahwa orang-orang Israel tidak akan merasakan

²¹⁷ Ibid., hlm. 106-109.

stabilitas dan keamanan hingga aksi pendudukan berakhir. Para pengebom bunuh diri adalah masa depan Israel.²¹⁸

Meningkatnya serangan kelompok pejuang garis keras Palestina dianggap sebagai peningkatan eskalasi serangan terorisme di Israel. Serangan terorisme harus dihentikan, berikut jaringan organisasinya dan pihak-pihak yang menjadi sumber pendanaannya. Israel sangat intensif memanfaatkan momentum ini, sehingga William Pfaff menganggap, Sharon mengeksploitasi deklarasi Bush untuk melakukan perang global melawan terorisme.

Di Palestina, Arafat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap eksistensi kelompok juang garis keras seperti Hamas dan Jihad Islam. Pihak Israel berpendapat bahwa Kesepakatan Oslo disertai prasyarat berupa kewajiban Arafat untuk menghancurkan kelompok garis keras tersebut. Namun sejauh ini, Arafat dianggap telah gagal menjalankan kewajibannya tersebut. Upaya-upaya untuk menyudahi eksistensi Arafat mulai ditunjukkan dengan upaya mencari lapis kedua tokoh Otoritas Palestina seperti Mahmoud Abbas yang dianggap lebih moderat. Dengan dukungan Bush, usaha ini berhasil dilakukan dengan penempatan Mahmoud Abbas sebagai Perdana Menteri Palestina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Philip T. Reeker menyampaikan bahwa, *“Arafat not only must arrest the perpetrators of the weekend terrorist attacks in Israel but completely destroy the Hamas and Islamic Jihad organizations.”* Sedangkan Kepala Biro Timur Tengah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Edward S. Walk mengatakan bahwa, *“Everybody is fed up with Arafat”*. Akan tetapi, ia masih menaruh harapan dengan mengungkapkan:

“I certainly hope the Israelis keep in mind who the enemy is. I don’t think the focus at this point should be on Arafat or the Palestinian Authority. The focus should be on the two terrorist organizations. If Sharon does go after Arafat, it was not clear what the administration would do about it. Most officials insisted that the next step is up to Arafat. If he doesn’t take dramatic action against Hamas and Islamic Jihad, Washington might be ready to leave him to his fate.”²¹⁹

(Saya tentunya berharap bangsa Israel mengetahui siapa musuhnya. Saya merasa fokus utama dalam masalah ini bukanlah Arafat atau Otoritas Palestina. Fokus utama seharusnya pada dua organisasi teroris. Jika Sharon

²¹⁸ Esposito, John L., *Unholy War* (diterjemahkan oleh Syarifudin Hasani dengan Judul: Teror Atas Nama Islam), Jakarta: Ikon Teralitera, 2003, hlm. 123.

²¹⁹ http://www-tech.mit.edu/V12/N64/wn_long1_64.64w.html

mengincar Arafat, hal itu tidaklah jelas ada apa yang sedang pemerintahan lakukan dengan itu. Kebanyakan para pejabat bersikeras untuk mengincar Arafat sebagai langkah selanjutnya. Jika dia tidak melakukan aksi yang dramatis untuk melawan Hamas dan Kelompok Jihad Islam, Washington mungkin siap untuk membiarkan dia bersama nasibnya).

Kelompok pejuang Palestina yang diinginkan untuk dihancurkan Israel, tidak hanya Hamas dan Jihad Islam yang merupakan kelompok kanan. Akan tetapi juga kelompok PFLP (*Popular Front for the Liberation of Palestine*) yang merupakan kelompok yang berorientasi pada perdamaian. Hamas dan Jihad Islam hanya prioritas pertama. Ketika Menteri Pariwisata Reham Zeevi mati terbunuh, kantor perdana menteri Israel membuat pernyataan:

*“Prime Minister Sharon noted that at its meeting yesterday following Minister Zeevy’s assassination, the Cabinet unequivocally demanded that the Palestinian Authority extradite all PFLP members and disband all terrorist organizations. If the PA does not meet these conditions, Israel will view the PA as an authority that supports and hosts terrorism and will act towards it in accordance with the international rules that apply to authorities that support terrorism.”*²²⁰

(Perdana Menteri Sharon mencatat, dalam pertemuan kemarin mengenai pembunuhan Menteri Zeevy, Kabinet dengan tegas meminta agar Otoritas Palestina menyerahkan semua anggota PFLP dan membubarkan semua organisasi teroris. Jika Otoritas Palestina membiarkan hal ini, Israel akan memandang bahwa Otoritas Palestina adalah sebuah kekuasaan yang mendukung dan menerima terorisme. Israel akan melakukan tindakan sesuai dengan hukum internasional bagi para penguasa pendukung terorisme).

Kampanye perang melawan teroris ini membuat Sharon menemukan momentum yang lebih tepat untuk menyerang secara fisik tokoh-tokoh perlawanan Palestina. Pemimpin Hamas, Syeik Ahmad Yasin yang duduk di atas kursi roda, tewas ditembak dengan tiga buah peluru kendali di luar masjid, beberapa saat setelah menunaikan ibadah shalat Subuh. Penggantinya, Abdul Aziz Ar-Rantisi mengalami hal yang sama sebulan setelahnya. Setelah kedua peristiwa itu terjadi, Hamas tidak lagi mengumumkan pemimpin mereka.

²²⁰ <http://www.Israel-mfa.gov.il/mfa/go.as?MFAH0kkf0> (diakses pada tanggal 15 November 2009)

Agresivitas Likud telah memicu aksi-aksi radikal bangsa Palestina. Kekerasan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Likud maupun kelompok radikal Palestina, telah menambang tingkat eskalasi atau ketegangan dalam konflik Israel-Palestina. Peningkatan eskalasi yang terjadi antara Israel dan Palestina pada masa Pemerintahan Likud, membawa konflik ini berada di tahapan krisis. Kondisi ini membawa proses perdamaian kembali mundur. Jika dibiarkan maka kondisi yang dideskripsikan Galtung akan terjadi, akan berhenti jika rumah terbakar habis. Konflik ini tidak akan berhenti sampai tidak ada lagi bumi Palestina.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam skripsi ini. Berdasarkan fenomena serta konsep-konsep yang telah digunakan sebagai alat analisis (*analyzing tools*), dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konservatisme pemerintahan Likud telah menimalisasi jalannya perundingan damai dan meningkatkan eskalasi konflik. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan terhambatnya proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Proses perdamaian Israel-Palestina merupakan suatu proses yang kompleks. Proses ini tidak selalu berjalan dengan mulus dikarenakan adanya benturan kepentingan antara Israel dan Palestina. Berkali-kali perundingan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus berakhir tanpa hasil yang signifikan. Pada awalnya, formula *land for peace* dijadikan sebagai landasan dari segala upaya yang dilakukan oleh Israel dan Palestina untuk menciptakan perdamaian. Akan tetapi, landasan ini memudar seiring dengan perubahan politik yang terjadi di Israel pada tahun 1996. Pada tahun tersebut, Israel bukan lagi diperintah oleh partai moderat seperti Partai Buruh. Partai Buruh digantikan tempatnya oleh partai konservatif Likud.

Likud merupakan partai konservatif Israel yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika kehidupan politik di Israel. Konservatif Likud berlandaskan atas ideologi Zionisme mengenai Eretz Yisrael atau Tanah Israel. Orientasi partai Likud adalah pembangunan pemukiman Yahudi dan orientasi pengukuhan Jerusalem sebagai milik Israel sepenuhnya. Partai ini memprioritaskan menjaga keamanan tanah Israel. Partai ini berpandangan bahwa tanah Israel merupakan milik Israel yang tidak terbagi. Oleh karena itulah mereka tidak menerima keputusan PBB mengenai pembagian wilayah.

Partai konservatif Likud membawa perubahan terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Jika pada masa pemerintahan Partai Buruh menggunakan proses perdamaian diorientasikan berjalan dengan menggunakan instrument perundingan

maka hal ini tidak berlaku bagi pemerintahan pemerintahan konservatif Likud. Bagi mereka proses perundingan damai tidak akan menguntungkan mereka.

Setelah Perdana Menteri Yitzhak Rabin meninggal pada tahun 1995 dan Perdana Menteri Shimon Peres harus meletakkan jabatannya pada tahun 1995, kekuasaan politik di Israel berubah. Naiknya Benyamin Netanyahu dari Partai Likud pada tahun 1996 dan Ariel Sharon pada tahun 2001 mengindikasikan bahwa Israel berada dalam pemerintahan konservatif Likud.

Pemerintahan Likud, menganggap bahwa jalur perundingan damai hanya akan memberikan konsesi kepada Palestina. Warga Palestina di wilayah pendudukan akan menghalangi jalannya pembangunan pemukiman Yahudi serta akan mengganggu keamanan nasional Israel. Oleh karena itu, pemerintahan Likud mengubah landasan *land for peace* menjadi *land for security*. Perubahan landasan ini berdampak pada proses perdamaian. Israel meminimalisasi jalan perundingan damai dengan pihak Palestina. Israel meneruskan pembangunan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan. Selain itu, Israel melakukan tindakan radikal dengan menyatakan tidak akan membagi Jerusalem kepada Palestina dan mengklaim bahwa Jerusalem sepenuhnya milik Israel. Bahkan, Ariel Sharon secara radikal membawa pasukannya dan mengunjungi Masjidil Aqsa. Peristiwa inilah yang kemudian memicu terjadinya intifadah kedua atau yang disebut sebagai intifadah Al-Aqsa akhir tahun 1999.

Tindakan pemerintahan Likud telah memicu reaksi radikal dari pihak Palestina. Kelompok radikal muncul dipermukaan dan melakukan tindakan dengan menggunakan instrumen kekerasan seperti penggunaan bom bunuh diri. Dengan adanya tindakan radikal dari baik dari Israel maupun Palestina, tingkat eskalasi konflik meningkat. Konflik Israel-Palestina kemudian kembali berada dalam tahapan kritis.

6.2 Saran

Dukungan masyarakat Israel terhadap pemerintahan konservatif Likud merupakan suatu kekuatan utama bagi eksistensi Likud di Israel. Dukungan ini dikarenakan konservatisme Likud dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional Israel seperti keamanan dan pembangunan pemukiman Yahudi. Selain itu, Israel sendiri mendapat dukungan baik secara financial maupun dukungan dari negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat. Kedua hal ini menjadi dua faktor penting yang menjadi penopang eksistensi pemerintahan Likud di Israel.

Konservatisme memang tidak menyukai adanya perubahan yang radikal, tetapi bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Jika kepentingan nasional Israel menuntut adanya suatu perubahan yang sangat mendesak, maka konservatisme melakukan perubahan kebijakan walaupun tidak mudah dan tidak bisa telalu diharapkan kelanjutannya. Contohnya saja pada perjanjian Wye River yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu. Pertimbangan Netanyahu pada waktu itu adalah pernyataan dari Uni Eropa yang akan memberikan bantuan dana bagi militer Palestina jika Israel tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Pernyataan ini merupakan suatu ancaman bagi keamanan nasional Israel. Hal inilah yang kemudian membuat Netanyahu memutuskan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Walaupun pada akhirnya perjanjian tersebut tidak menghasilkan apa-apa, tetapi hal itu menunjukkan bahwa konservatisme dapat berubah jika terdapat ancaman bagi kepentingan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kekuatan besar yang dapat memberikan ancaman yang pasti bagi kepentingan nasional Israel, khususnya masalah keamanan. Walaupun Israel mendapat dukungan dari negara adidaya seperti Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat pasti akan mempertimbangkan dukungannya jika negara-negara Arab dan negara-negara Islam di seluruh dunia bukan hanya memberikan dukungan, tetapi juga membentuk pernyataan politis bagi perdamaian Israel-Palestina. Pernyataan secara politis tersebut tentunya akan mempengaruhi proses *bargain* negara-negara tersebut dalam melakukan hubungan dengan dunia internasional, bahkan dengan Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ramdan, Anton. *Rahasia Bisnis Yahudi*. Jakarta: Zahra Publishing House. 2009.
- Abd. Rahman, Mustafa. *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Kompas. 2002.
- _____. *Jejak-Jejak Juang Palestina: Dari Oslo Hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta: Penerbit Kompas. 2002
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Findley, Paul. *Diplomasi Munafik Zionis Israel: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*. Bandung: Penerbit Mizan. 2006.
- Gilbert, Martin. *Israel: A History*. London: Black Swan. 1999
- Hermawati. *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Holsti, K.J. *International Politics: A framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc. 1992.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Antar Peradaban: Dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Qalam. 2001.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.
- M. Aris, Anwar. *Israel is not Real: Negara Fiktif di Tanah Rampasan*. Jakarta: Rajut Publishing. 2009.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007.
- Masoed, Mochtar. *Metodelogi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. 1994.
- Miall, Hugh. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .2000.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosda Karya. 1998.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Levi, Werner. *International Politics Foundation of the System*. Minneapolis USA: University of Minnesota Press. 1974.

Luckacs, Yahuda (ed.). *Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990*. New York: Cambridge University press. 1992.

Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press. 1988.

Sihbudi, Riza. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya. 1995.

Suryadi, Budi. *Sosiologi Politik: Sejarah Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2007.

Wormser, Michael D (ed.). *The Middle East, 5th edition*. Washington: Congressional Quartely Inc. 1981.

Yahya, Mukhtar. *Perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. 1985.

Yoram, Peri. *The Rabin Memoirs*. Los Angeles: University Of California Press. 1996.

KARYA ILMIAH/JURNAL/ ARTIKEL/KORAN/MAJALAH/DOKUMEN

A. Rahiem, Minal Aidin. "Teori Zionisme dalam Masalah Palestina Suatu Tinjauan Historis". Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1996.

A. Rahiem, Minal Aidin. "Persaingan Komunitas Etnis Yahudi Ashkenazi dengan Sephardi". *Jurnal Arabia*, Vol.9, Nomor 18/Oktober 2006-2007.

Ian Gilmour, "Israel's Terrorists," *The Nation*, April 21, 1997.

Muzahid, Zis. "Konflik Timur Tengah Sebagai Strategi untuk Mengukuhkan Eksistensi Israel (Studi Kasus Konflik dan Proses Perdamaian Palestina-Israel)". Jakarta: Universitas Indonesia. 2003.

Pallis, Elfi. "The Likud Party: A Primer," *Journal of Palestine Studies*. Winter 1992.

Putra, Dedy Jayadi. "Politik Luar Negeri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Terhadap Perjanjian Wye River (1996-1999)". Jakarta: Universitas Indonesia. 2000.

Suryade, Lalu. "Politik Kekerasan Israel di Bawah Perdana Menteri Ariel Sharon dalam Konflik Israel Palestina". Jakarta: Universitas Indonesia. 2004.

Swasono, Dionnisius Elvan. "Kebijakan Luar Negeri Israel Mengenai Penyelesaian Konflik Israel-Palestina pada Masa Pemerintahan Yitzhak Rabin (1992-1995)". Jakarta: Universitas Indonesia. 2000.

Wardani, Mufti. "Prospek Peta Jalan Damai Dalam Proses Perdamaian Palestina-Israel: Perspektif Resolusi Konflik". Jakarta: Universitas Indonesia. 2004.

Zulkarnain. "Diktat Mata Kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik Internasional". Jakarta: Universitas Nasional. Januari 2005.

"Palestina-Israel Akhirnya Tanda Tangan Kesepakatan". *Kompas*. 25 September 1995.

"Israel Isyaratkan Proposal Damai". *Kompas*. 31 Juli 2001.

"Israel dan Palestina Hormati Gencatan Senjata". *Kompas*. 5 Juni 2001.

"Sodokan Robin Cook", *Gatra*, Jakarta, 28 Maret 1988.

"Menunggu Matahari Perdamaian Timur Tengah", *Kompas*, 26 Oktober 1998.

"Setelah Palestina-Israel Sepakat Berdamai, Muncul Muncul Dari Dalam", *Media Indonesia*, Jakarta 27 Oktober 1998.

WEBSITE

<http://csps.ugm.ac.id/Download-document/Pemetaan-Konflik-UMY-200810.html>

http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback_knesset_eng.asp

<http://www.icg.org>

http://i-cias.com/cgi-bin/ao-direct.pl?sharon_ariel.htm

<http://mideast-archive.co.nr/>

www.skullandcrossbones.org/articles/solomontemple2.htm

http://www.freeman.org/m_online/dec00/sharon.htm

http://www.hdip.org/reports/Martyrs_statistics.htm.

<http://www.tragedipalestina.com/intifada01.html>.

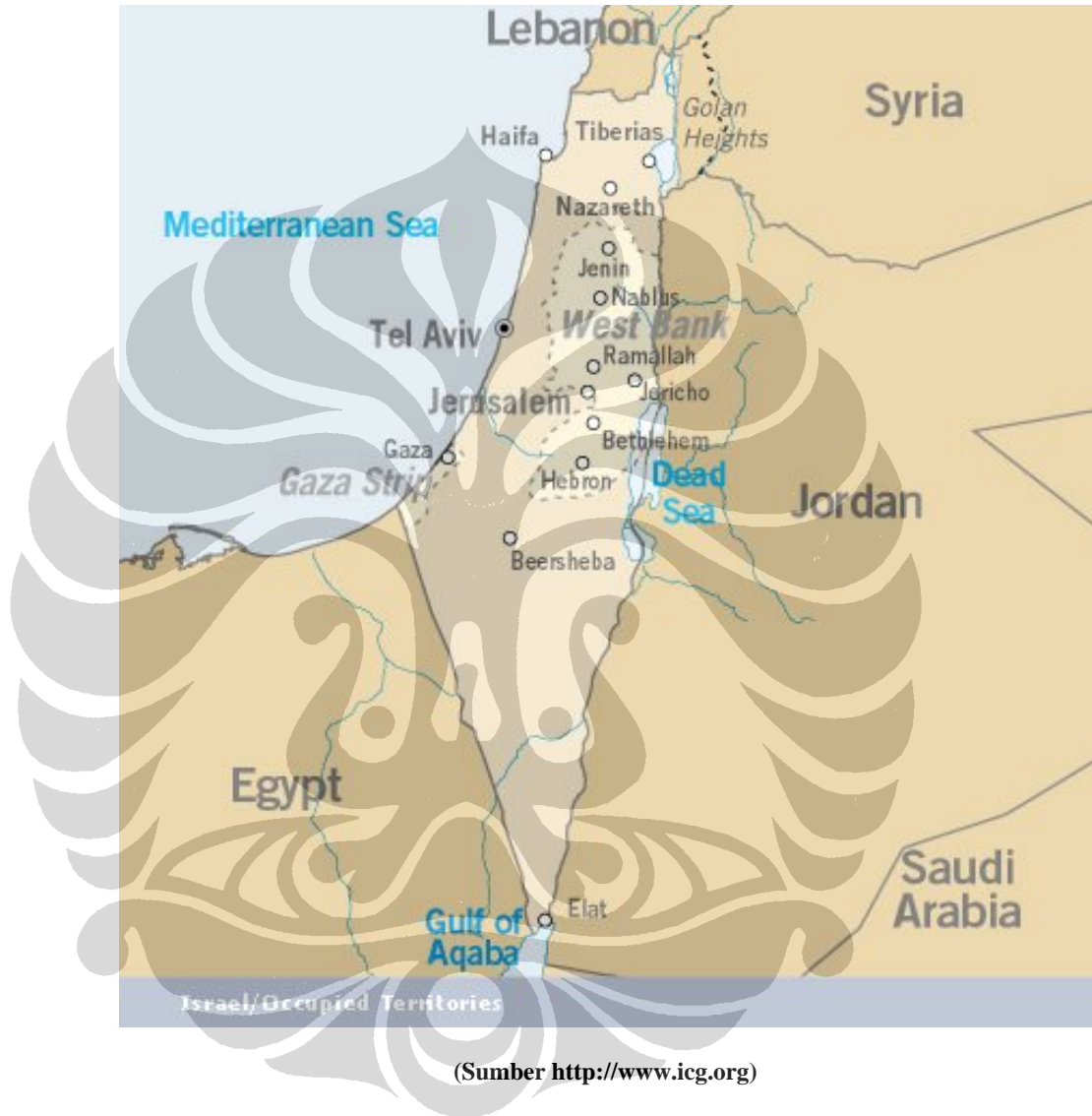
<http://www.dci-pal.org>.

[http:// www.palestinechronicle.com](http://www.palestinechronicle.com).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Konflik Israel-Palestina



Decisions

At its 1373rd meeting, on 9 November 1967, the Council decided to invite the representatives of the United Arab Republic, Israel and Jordan to participate, without vote, in the discussion of the item entitled "The situation in the Middle East: Letter dated 7 November 1967 from the Permanent Representative of the United Arab Republic addressed to the President of the Security Council (S/8226)".¹¹

At its 1375th meeting, on 13 November 1967, the Council decided to invite the representative of Syria to participate, without vote, in the discussion of the question.

Resolution 242 (1967) of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. *Affirms* that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

- (i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;
- (ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. *Affirms further* the necessity

- (a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;
- (b) For achieving a just settlement of the refugee problem;
- (c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area,

¹¹ *Ibid.*

Décisions

A sa 1373^e séance, le 9 novembre 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe unie, d'Israël et de la Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : Lettre, en date du 7 novembre 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe unie (S/8226¹¹)".

A sa 1375^e séance, le 13 novembre 1967, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 242 (1967) du 22 novembre 1967

Le Conseil de sécurité,

Exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient,

Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité,

Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'Article 2 de la Charte,

1. *Affirme* que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants :

- i) Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit;
- ii) Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque Etat de la région et de leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de force;

2. *Affirme en outre* la nécessité

- a) De garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région;
- b) De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés;
- c) De garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque Etat de la région, par

¹¹ *Ibid.*

At its 1736th meeting, on 13 August 1973, the Council decided to invite the representatives of Lebanon, Israel, Egypt and Iraq to participate, without vote, in the discussion of the item entitled "The situation in the Middle East: Letter dated 11 August 1973 from the Permanent Representative of Lebanon to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/10983)".²⁴

At its 1737th meeting, on 14 August 1973, the Council decided to invite the representative of Democratic Yemen to participate, without vote, in the discussion of the question.

Resolution 337 (1973)
of 15 August 1973

The Security Council,

Having considered the agenda contained in document S/Agenda/1736,

Having noted the contents of the letter from the Permanent Representative of Lebanon addressed to the President of the Security Council (S/10983),

Having heard the statement of the representative of Lebanon concerning the violation of Lebanon's sovereignty and territorial integrity and the hijacking, by the Israeli air force, of a Lebanese civilian airliner on lease to Iraqi Airways,²⁵

Gravely concerned that such an act carried out by Israel, a Member of the United Nations, constitutes a serious interference with international civil aviation and a violation of the Charter of the United Nations,

Recognizing that such an act could jeopardize the lives and safety of passengers and crew and violates the provisions of international conventions safeguarding civil aviation,

Recalling its resolutions 262 (1968) of 31 December 1968 and 286 (1970) of 9 September 1970,

1. *Condemns* the Government of Israel for violating Lebanon's sovereignty and territorial integrity and for the forcible diversion and seizure by the Israeli air force of a Lebanese airliner from Lebanon's air space;

2. *Considers* that these actions by Israel constitute a violation of the Lebanese-Israeli Armistice Agreement of 1949, the cease-fire resolutions of the Security Council of 1967, the provisions of the Charter of the United Nations, the international conventions on civil aviation and the principles of international law and morality;

3. *Calls on* the International Civil Aviation Organization to take due account of this resolution when considering adequate measures to safeguard international civil aviation against these actions;

²⁴ *Ibid.*, Supplement for July, August and September 1973.

²⁵ *Ibid.*, Twenty-eighth Year, 1736th meeting.

4. *Calls on* Israel to desist from any and all acts that violate Lebanon's sovereignty and territorial integrity and endanger the safety of international civil aviation and solemnly warns Israel that, if such acts are repeated, the Council will consider taking adequate steps or measures to enforce its resolutions.

Adopted unanimously at the 1740th meeting

Decisions

At its 1743rd meeting, on 8 October 1973, the Council decided to invite the representatives of Egypt, Israel and the Syrian Arab Republic to participate, without vote, in the discussion of the item entitled "The situation in the Middle East: Letter dated 7 October 1973 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/11010)".²⁶

At its 1745th meeting, on 11 October 1973, the Council decided to invite the representatives of Nigeria and Saudi Arabia to participate, without vote, in the discussion of the item.

Resolution 338 (1973)
of 22 October 1973

The Security Council

1. *Calls upon* all parties to the present fighting to cease all firing and terminate all military activity immediately, no later than 12 hours after the moment of the adoption of this decision, in the positions they now occupy;

2. *Calls upon* the parties concerned to start immediately after the cease-fire the implementation of Security Council resolution 242 (1967) in all of its parts;

3. *Decides* that, immediately and concurrently with the cease-fire, negotiations shall start between the parties concerned under appropriate auspices aimed at establishing a just and durable peace in the Middle East.

Adopted at the 1747th meeting by 14 votes to none²⁷

²⁶ *Ibid.*, Twenty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1973.

²⁷ One member (China) did not participate in the voting.

1996 Likud Party Platform

The following is a translation of the entire first chapter of the Likud Party platform. Detailed summaries are provided for the remaining chapters.

Chapter 1: Peace & Security

Preamble

The right of the Jewish people to the Land of Israel is an eternal right, not subject to dispute, and includes the right to security and peace.

Zionism is the liberation movement of the Jewish people, and its fulfilment is at the top of the list of priorities of the Government of Israel. Immigration will be increased, and settlement will be strengthened. The decision to freeze settlements will be rescinded.

Peace will be a central aim of Israel's policy. The Government of Israel will conduct direct negotiations with Arab states to reach peace agreements.

Security is the basis for durable peace in our region. Israel will make security a first condition in any peace agreement.

Operatives

1. The Government of Israel will honor international agreements, and will continue the diplomatic process to achieve a just and lasting peace in the Middle East. It will recognize the facts created on the ground by the various accords, and will act to reduce the dangers to the future and security of Israel resulting from these agreements.

2. The Government of Israel will carry out negotiations with the Palestinian Authority to achieve a permanent peace arrangement, on condition that the Palestinians fully honor all their obligations. Most important among these are that the Palestinians annul in an unequivocal manner the clauses in the Palestinian Charter which call for the destruction of Israel, and that they prevent terror and incitement against Israel.

3. The Government of Israel will enable the Palestinians to manage their lives freely, within the framework of self-government. However, foreign affairs and defense, and matters which require coordination, will remain the responsibility of the State of Israel. The government will oppose the establishment of an independent Palestinian state.

4. Sources of employment for the Palestinians will be developed in the autonomous areas to reduce the number of Palestinian workers in the Israeli market.

5. Jewish settlement, security areas, water resources, state land and road intersections in Judea, Samaria and the Gaza Strip shall remain under full Israeli control.

6. Israel will keep its vital water resources in Judea and Samaria. There shall be no infringement of Israel's use of its water resources.

7. United and undivided Jerusalem is the capital of the State of Israel. Activities which undermine the status of Jerusalem will be banned, and therefore PLO and Palestinian Authority institutions in the city, including the Orient House, will be closed.

8. The Jordan River shall be the eastern border of the State of Israel, south of Lake Kinneret. This will be the permanent border between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan. The Kingdom of Jordan may become a partner in the final arrangement between Israel and the Palestinians, in areas agreed upon in the negotiations.

9. Israel will conduct peace negotiations with Syria, while maintaining Israeli sovereignty over the Golan Heights and its water resources.

Chapter 2: Foreign Relations

1. Israel's foreign policy will serve its security interests and the hope for peace and economic prosperity. Expanding economic ties will be a main task of the Foreign Ministry.

2. Israel will continue to view its relations with the United States as the cornerstone of its foreign policy, with ties between the two countries grounded in shared values of freedom, justice, and democracy.

3. Israel has an interest in a strong Hashemite Jordan. There are a whole range of areas of common interest between Israel and Jordan, and the government will

work to deepen the ties between the two countries.

4. Israel desires good neighborly relations with Egypt, the largest Arab country. However, relations between Jerusalem and Cairo can only develop on the basis of reciprocity.

5. Israel will continue efforts to reach mutual recognition with Arab countries with which it does not have relations, and will try to establish full relations with states with which it has low-level contacts. Particular attention will be given to Morocco and Tunisia, as well as the Gulf states.

6. Israel will seek to strengthen its ties with Russia, along with other CIS states, recognizing Russia's importance in the world arena, its interest in the Middle East, and with an eye to maintaining close ties with Jews living there.

7. Israel looks to become an associate member of the European Community, and will continue its policy of integrating into the European market.

8. Israel will continue to deepen its ties with countries in East Asia -- with China, Japan, India, Singapore, Thailand, South Korea, Vietnam, and Australia - - in areas ranging from trade to military cooperation to culture.

Chapter 3: Israel Defense Forces [IDF]

1. Israel will continue to maintain its full power of deterrence. Israel cannot ignore the threats to its security emanating from the efforts of Iran and other countries to procure arms, and from Syria's determination to prepare for war against Israel.

2. Israel will draw on all its science and technology potential to develop special weapons systems in order to maintain its qualitative edge and prepare the IDF for the battlefield of the next century.

3. A National Security Council will be established for the first time by the prime minister, in accordance with Basic Law: Government.

Chapter 4: Internal Security

1. The government will work to restore a sense of security to Israel's citizens.

2. The war on crime and drugs will be redoubled, and the number of Border Police increased, allowing civilian police to deal with matters of law and order.

Chapter 5: The Jewish People

1. Israel must see to it that Jews of the Diaspora do not abandon their people, for whatever reason. The main way to insure this is through Jewish and Hebrew education for Diaspora youth. The aim is that there will not be a Jewish child anywhere in the world who does not receive some form of Jewish education.

2. The government will initiate the formation of an education system for Diaspora Jewry, with the participation of Israel's Education Ministry, the Jewish Agency, the Zionist Federation, and Jewish communities around the world. Israeli teachers will be sent to to teach in Jewish schools, in rotation of several years, just as diplomats are sent to serve in embassies.

Chapter 6: Aliyah & Absorption

1. The government will set a goal of having seven million Jews in Israel within the next decade. The government will prepare the country to absorb Jews, both new immigrants and returning citizens, viewing this not only as a national undertaking but as strengthening Israel economically and culturally.

2. The government will aid new immigrants with housing and employment, while also giving an equal level of assistance to young native Israelis who are entering the job market.

3. Regarding Soviet immigrants, the government will work to have them employed in their professions. The government will implement a master plan which will create 130,000 jobs for engineers, doctors, scientists, and teachers, according to the recommendations of the Branover Committee.

4. Regarding Ethiopian immigrants, the government will work to improve education among the young by desegregating classes and encouraging parental involvement in school; and then will encourage students to pursue college degrees through grants and other assistance. The government will work to improve the housing situation by finally closing caravan sites and absorption centers and giving special mortgages to Ethiopian immigrants.

Chapter 7: Economy

1. The national camp has always espoused a free-market economy. The experience in Israel and the world has proven that economics based on socialism doesn't work. On the other hand, an economy based on free enterprise brings growth and prosperity over time.

2. Today the Israeli economy is on the brink of a severe slowdown. Over the last few years there is a growing deficit in the balance of payment, which threatens the stability of the economy.

3. The government will make structural reforms in the Israeli economy, which will include the following steps:

Lower taxes -- income tax will be reduced gradually each year

Inflation will be reduced to a single digit level

Cutting bureaucracy in all possible areas

Reducing the poverty level

Modernizing infrastructure in development towns

Transportation -- improving existing roads, while preparing infrastructure for a local and nationwide rail system

Returning credibility and investment to the stock market

Chapter 8: Agriculture & Settlement

1. Settlement in all parts of the Land of Israel is of national importance and part of Israel's defense strategy. The government will allocate special resources for settlement in border and sparsely-populated areas.

Source: [The Likud Party](#)